

OPTIMIS

▶ Tinjauan Operasional

Daftar Isi

- 148 Manajemen Risiko
- 234 Sumber Daya Manusia
- 244 Teknologi Informasi
- 249 Operasional



📍 Manajemen Risiko

“Danamon senantiasa meningkatkan penerapan manajemen risiko di lingkungan Bank serta Perusahaan Anak sejalan dengan perkembangan regulasi dan praktik bisnis terbaik. Penerapan manajemen risiko ini ditujukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau serta mengendalikan beragam potensi risiko pada seluruh lini bisnis.”

VISI DAN MISI

VISI

Bank mengedepankan Manajemen Risiko sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi bisnis, dengan demikian, mendukung budaya risiko yang kuat yang melekat dengan baik dalam pengambilan keputusan sehari-hari, aktivitas operasional dan perilaku karyawan.

MISI

- Menjadi mitra/rekan kerja terpercaya bagi lini bisnis melalui *Risk Appetite* yang transparan dan tepat sehingga memberikan hasil yang positif bagi nasabah, pemegang saham, regulator dan karyawan.
- Menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsip perusahaan yang didukung oleh kerangka kerja risiko yang kuat yang didefinisikan dan dikomunikasikan dengan baik serta bersifat pencegahan.
- Menyiapkan kebijakan, model, alat dan kerangka kerja terbaik yang dapat membantu dalam pengukuran dan pengambilan risiko yang sehat
- Mendukung budaya risiko dan kontrol yang kuat serta proaktif di seluruh Bank dan Perusahaan Anak.

PILAR DAN PRINSIP PENGELOLAAN RISIKO

TUJUH PILAR MANAJEMEN RISIKO

Prinsip pengelolaan risiko Danamon berdasarkan Tujuh Pilar Manajemen Risiko yang difokuskan pada tujuh area sebagai berikut:

- a. **Pilar Pertama: *Good Corporate Governance***
Melibatkan pengawasan dan supervisi aktif dari Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (untuk Unit Usaha Syariah) serta membentuk sejumlah komite yang dapat mendukung pelaksanaan tata kelola manajemen risiko.
- b. **Pilar Kedua: Kerangka Kerja Risiko**
Setiap karyawan wajib memahami dan berperan aktif dalam pengelolaan risiko sesuai fungsi dan tanggung jawabnya masing masing. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi bertanggung jawab untuk mendefinisikan Arsitektur Risiko dan mempersiapkan panduan dasar bagi pengelolaan serta pengawasan risiko. Seluruh lini bisnis dan fungsi pendukungnya akan bekerja berlandaskan pedoman tersebut.
- c. **Pilar Ketiga: Standar Pengelolaan Risiko**
Pengelolaan risiko dilakukan melalui penerapan dan pendekatan yang konsisten serta disiplin terhadap identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian atas setiap risiko secara komprehensif dan efektif.

- d. Pilar Keempat: Standar Akuntansi
Seluruh akuntansi keuangan, laporan dan catatan yang diberikan kepada regulator dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) eksternal harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- e. Pilar Kelima: Teknologi & MIS
Penerapan teknologi dan sistem manajemen informasi yang aman serta dapat dipercaya disesuaikan dengan skala aktivitas bisnis serta kerangka kerja manajemen risiko Danamon.
- f. Pilar Keenam: Sumber Daya Manusia
Memastikan bahwa pejabat yang mengelola risiko pada semua *level* merupakan Sumber

- g. Pilar Ketujuh: Kesadaran dan Budaya Risiko
Penerapan pendekatan yang *prudent* dalam mengembangkan strategi bisnis disesuaikan dengan *risk appetite*.



PENDEKATAN PERTAHANAN TIGA LAPIS (THREE LINES OF DEFENSE)

Selanjutnya, untuk memantau, mengontrol dan mengelola risiko, Danamon menerapkan pendekatan *Three Lines of Defense* sebagai berikut:

Pengawasan Dewan Komisaris		
Pengawasan Direksi		
Pertahanan Lapis Pertama	Pertahanan Lapis Kedua	Pertahanan Lapis Ketiga
<ul style="list-style-type: none"> • Lini Bisnis • Fungsi Pendukung 	<ul style="list-style-type: none"> • Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi • Kepatuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Audit Internal
Lini bisnis dan fungsi pendukung sebagai <i>risk owner</i> merupakan pertahanan lapis pertama yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko sehari-hari di masing-masing unit kerja.	Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan Divisi Kepatuhan berperan sebagai pertahanan lapis kedua untuk melakukan fungsi pemantauan pengelolaan risiko secara independen.	Audit Internal berperan sebagai pertahanan lapis ketiga yang melakukan kontrol melalui pengujian dan audit secara independen atas ketepatan proses lini bisnis dan unit pendukungnya serta memastikan bahwa mereka telah melakukan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai kebijakan dan prosedur yang berlaku.

MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang konglomerasi keuangan, Danamon sebagai entitas utama telah merumuskan manajemen risiko terintegrasi dengan melakukan konsolidasi seluruh risiko di Bank dan

Perusahaan Anak untuk mengantisipasi kemungkinan interaksi antara satu eksposur risiko dengan eksposur risiko lainnya sehingga dapat memastikan bahwa seluruh jenis risiko yang berbeda dikelola secara efektif. Danamon sebagai entitas utama mengelola dan memantau sepuluh risiko yaitu risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik, kepatuhan, investasi dan imbal hasil serta penambahan dua risiko yang dikelola dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi yaitu risiko transaksi intra-grup dan risiko asuransi.

Elemen-elemen utama yang menjadi pendukung struktur tata kelola manajemen risiko Danamon adalah:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
- Proses Manajemen Risiko dan Sistem Manajemen Risiko
- Sistem Pengendalian Internal Manajemen Risiko

PENGAWASAN AKTIF DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI

Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (untuk Syariah Unit) dan Direksi menjadi penentu keberhasilan pengelolaan risiko melalui pengawasan aktif yang dilakukannya. Menyadari peran strategis ketiganya, Danamon telah menetapkan pembagian tugas pengawasan pada masing-masing pihak sebagai berikut:

Fungsi Pengawasan Aktif		
Dewan Komisaris	Dewan Pengawas Syariah	Direksi
Dewan Komisaris dapat mendelegasikan fungsi pemantauan risiko kepada Komite Pemantau Risiko. Namun demikian, Dewan Komisaris tetap sebagai penanggung jawab akhir.	Danamon menempatkan Dewan Pengawas Syariah pada Unit Syariah sesuai rekomendasi Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan operasional, termasuk memantau pelaksanaan manajemen risiko. Direksi berperan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi manajemen risiko secara komprehensif beserta implementasinya. • Direksi menetapkan Komite Manajemen Risiko untuk membantu dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya.
<ul style="list-style-type: none"> a) Melakukan pemantauan atas risiko dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, serta eksposur risiko melalui kajian berkala dengan Direksi. b) Menyetujui aktivitas bisnis yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. c) Menyetujui kebijakan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris yang dipersyaratkan ketentuan OJK/BI. d) Melaksanakan fungsi manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan. e) Mendelegasikan kewenangan kepada Direksi untuk memungkinkan mereka menyetujui aktivitas bisnis dan tugas-tugas lainnya. f) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi rencana strategik teknologi informasi dan kebijakan terkait penggunaan teknologi informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi tidak bertentangan dengan prinsip syariah. b) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip Syariah atas produk, kebijakan, prosedur dan aktivitas usaha Syariah pada Bank dan/ atau Perusahaan Anak baik secara individu maupun secara terintegrasi dan melakukan pengawasan agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. c) Bertindak sebagai penasihat dan memberikan rekomendasi kepada Direksi dan manajemen bisnis Syariah mengenai hal-hal terkait dengan prinsip Syariah. d) Berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional untuk mendiskusikan usulan dan rekomendasi Bank atas produk dan perkembangan jasa yang membutuhkan tinjauan kembali dan keputusan dari Dewan Syariah Nasional. e) Melakukan evaluasi atas kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. f) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko. b) Menyetujui aktivitas bisnis yang membutuhkan persetujuan Direksi. c) Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. d) Memantau kualitas risiko dibandingkan tingkat kewajaran yang berlaku. e) Memastikan bahwa manajemen menerapkan pendekatan yang hati-hati dan konservatif dalam mengembangkan bisnis mereka. f) Menetapkan <i>risk appetite</i>. g) Meninjau kembali secara berkala kerangka kerja manajemen risiko, proses, dan kebijakan. h) Memastikan langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha yang ditemukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). i) Memastikan efektivitas pengelolaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. j) Menempatkan pejabat yang kompeten pada unit kerja sesuai sifat, jumlah dan kompleksitasnya. k) Menyusun dan menempatkan mekanisme persetujuan transaksi termasuk yang melampaui limit kewenangan untuk setiap jenjang jabatan.

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO SERTA PENETAPAN LIMIT RISIKO

Danamon telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi yang mencakup kebijakan mengenai manajemen risiko secara umum dan untuk tiap jenis risiko. Kebijakan ini menjabarkan tentang penerapan manajemen risiko, kebijakan dan prosedur; identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian internal untuk masing-masing jenis risiko yang dikelola oleh Danamon dan Perusahaan Anak.

Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi merupakan kerangka kerja utama dan pedoman dalam pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi di Konglomerasi Keuangan Danamon serta menjadi acuan bagi seluruh entitas di konglomerasi keuangan dalam membuat kebijakan, prosedur dan panduan manajemen risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Namun demikian, dikarenakan Perusahaan Anak merupakan entitas yang terpisah dengan Bank, penerapan atas Manajemen Risiko Terintegrasi tetap harus mempertimbangkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasar Modal serta ketentuan eksternal lainnya yang terkait. Bank sebagai Entitas Utama dan Perusahaan Anak sebagai anggota Konglomerasi Keuangan telah menyusun pedoman dan prosedurnya masing-masing secara lebih detail. Panduan dan prosedur tersebut sejalan dengan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan peraturan eksternal lainnya yang terkait.

Danamon telah memiliki Kebijakan Risiko Kredit, Kebijakan Manajemen Risiko Operasional, Kebijakan Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas, Kebijakan Keamanan Informasi dan Kebijakan Manajemen Kelangsungan Usaha yang dibuat secara terpisah dan mengacu ke Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Kebijakan manajemen risiko Danamon diterapkan melalui pengelolaan risiko terintegrasi yang memungkinkan manajemen mengelola risiko pada seluruh lini bisnis secara terpadu termasuk Perusahaan Anak. Pengelolaan risiko terintegrasi tersebut merupakan serangkaian kombinasi strategi, proses, sumber daya, kompetensi dan teknologi yang bertujuan untuk mengevaluasi dan mengelola risiko, dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah bagi

pemegang saham sejalan dengan strategi bisnis dan meningkatkan kualitas proses manajemen risiko, sehingga pengelolaan modal dapat lebih efektif dan efisien.

Manajemen risiko terintegrasi berujung pada penetapan besaran *risk appetite* dan batas toleransi risiko yang dapat diambil/diterima oleh Danamon dalam menetapkan portofolio sesuai dengan *price risk* yang telah dipertimbangkan dengan matang dan dicerminkan pada besaran modal yang dikelola untuk mengantisipasi risiko kerugian, sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis/usaha Danamon.

Bank dan Perusahaan Anak baik secara individu maupun secara terintegrasi telah menetapkan limit risiko sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil, toleransi risiko dan strategi Konglomerasi Keuangan. Penetapan limit risiko dilakukan di level Grup lalu diterapkan ke lini bisnis dan Perusahaan Anak.

Kebijakan, prosedur, limit risiko dan sistem pengelolaan risiko ditelaah secara berkala agar dapat beradaptasi dengan perubahan pada kondisi pasar, produk dan jasa yang ditawarkan.

STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

Struktur organisasi manajemen risiko terdiri dari beberapa komite risiko dan satuan kerja manajemen risiko di Bank dan Perusahaan Anak dengan berbagai tingkat tanggung jawab.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*) merupakan otoritas pengelola risiko tertinggi yang berada pada tingkat Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai dewan pengawas untuk memantau pelaksanaan strategi dan kebijakan manajemen risiko serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dalam mengelola eksposur risiko.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Di tingkat Direksi telah dibentuk Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko secara keseluruhan baik di Danamon maupun Perusahaan Anak dengan melakukan pengawasan pelaksanaan strategi risiko manajemen, kebijakan dan mengevaluasi permasalahan risiko yang signifikan.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Sejalan dengan kebijakan dari OJK terkait Manajemen Risiko untuk Konglomerasi Keuangan, maka Danamon telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang diketuai oleh Direktur *Integrated Risk* dan anggota komite terdiri dari Direktur yang ditunjuk dari setiap Perusahaan Anak dan Kepala-Kepala Divisi di Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.

SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

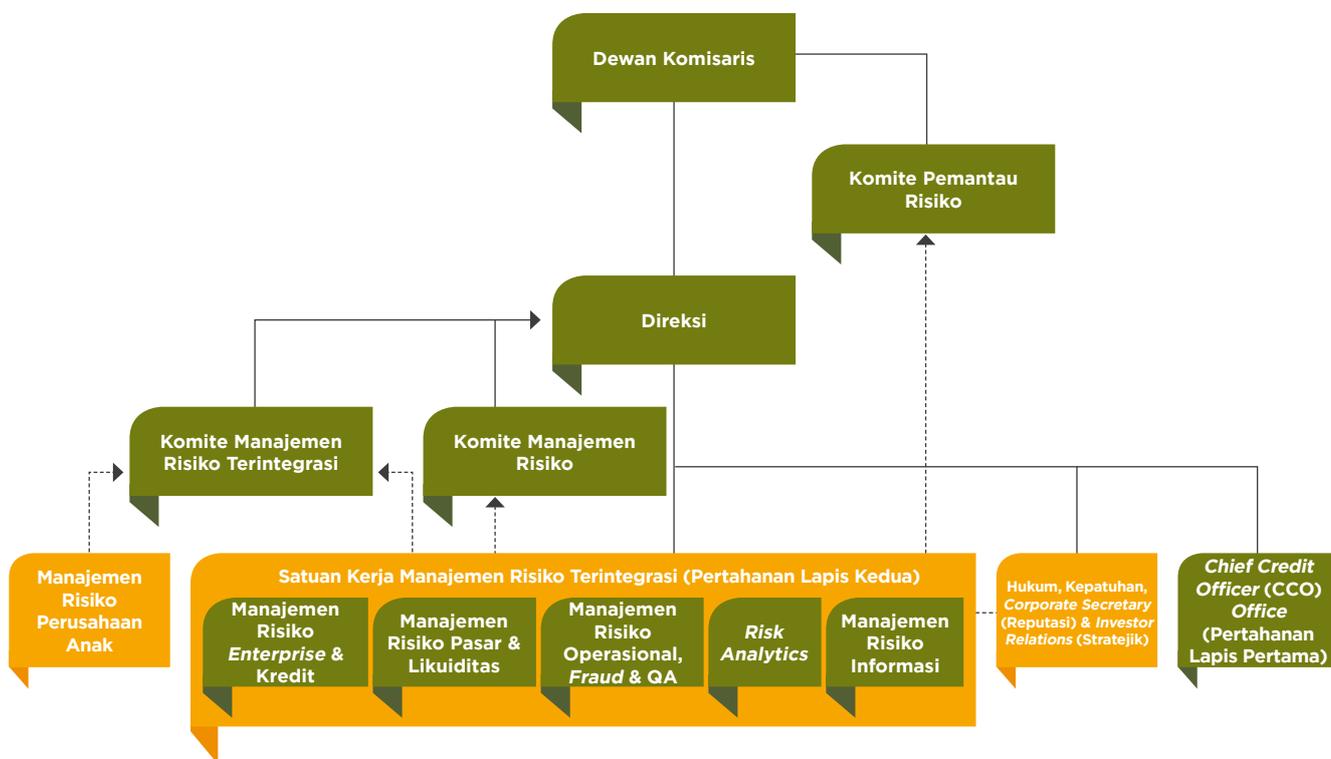
Satuan Kerja Manajemen Risiko mencakup satuan kerja yang menggabungkan risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional dan risiko informasi dalam satu kesatuan organisasi. Dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi, telah dilakukan penyesuaian Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan menambahkan fungsi

manajemen risiko terintegrasi untuk memastikan bahwa proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko secara terintegrasi dapat dilakukan dan dilaporkan sesuai dengan kerangka kerja manajemen risiko dan peraturan regulator.

Satuan kerja ini beranggotakan para profesional dan senior dalam bidang manajemen risiko. Fungsi ini adalah fungsi yang independen sebagai *second line of defense*.

Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi mengembangkan secara keseluruhan strategi manajemen risiko yang mencakup kebijakan, metodologi, kerangka kerja, limit dan prosedur serta kontrol untuk seluruh lini bisnis termasuk Perusahaan Anak.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko



Untuk memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen, sejak April 2017 Bank telah membentuk unit kerja *Chief Credit Officer (CCO Office)* yang bertanggung jawab secara independen untuk mengelola risiko kredit secara efektif dalam kapasitas sebagai *first line of defense*. Unit ini terpisah dari Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.

Pada bulan Februari 2017, di dalam Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, Bank telah membentuk divisi khusus, yaitu Divisi Manajemen Risiko Informasi. Divisi ini dibentuk untuk mengembangkan kebijakan, prosedur, perangkat dan kerangka kerja dalam mendukung pengelolaan risiko operasional terkait dengan Teknologi

Informasi, Keamanan Informasi & Data, serta Kelangsungan Bisnis. Divisi ini terdiri atas tiga unit yaitu:

- Unit *IT Risk Management*, bertanggung jawab untuk mengelola potensi risiko sehubungan dengan penggunaan teknologi informasi yang intensif dalam Bank, termasuk melakukan penilaian, memberikan opini dan rekomendasi dari perspektif manajemen risiko terhadap produk atau layanan baru yang didukung oleh teknologi informasi.
- Unit Kerja *Information Security Management*, bertanggung jawab untuk mengelola risiko potensial sehubungan dengan keamanan informasi dan data dalam Bank. Tujuan unit ini adalah menyediakan kebijakan, kerangka kerja dan panduan dari perspektif manajemen risiko, sebagai acuan atau dasar dalam penerapan keamanan informasi dalam Bank.
- Unit *Business Continuity Management*, bertanggung jawab untuk mengelola risiko sehubungan dengan potensi dampak dalam aktivitas operasional bisnis, sebagai akibat dari insiden darurat dan/atau keamanan. Tujuan unit ini adalah menyediakan kebijakan, kerangka kerja dan

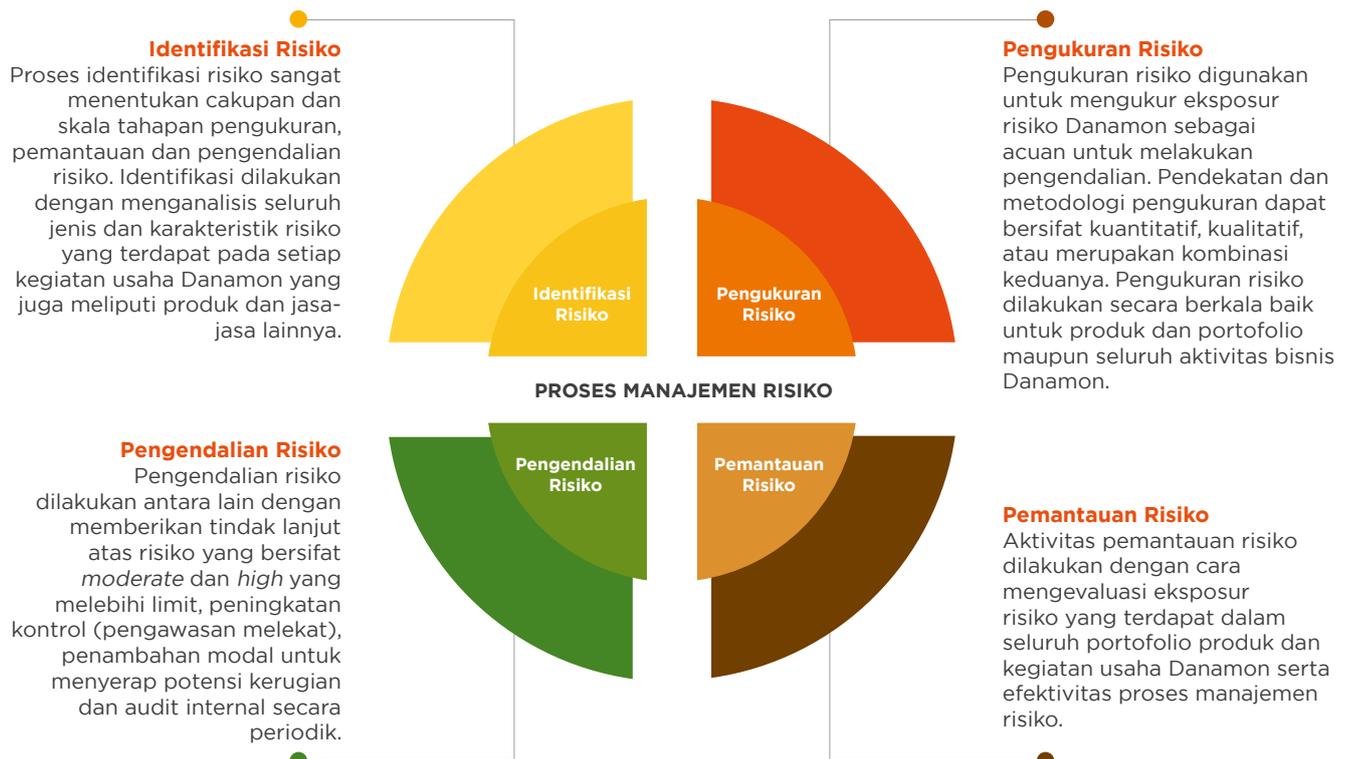
panduan yang diperlukan untuk mendukung lini bisnis dalam efektivitas aktivitas operasionalnya dalam menyediakan kelangsungan layanan bagi nasabah, dengan tetap melindungi keamanan staf dan aset fisik pada saat keadaan darurat.

Ketiga unit diatas, melakukan seluruh aktivitas terkait dengan identifikasi kerentanan dan ancaman yang berpotensi dapat membahayakan Bank dalam melangsungkan aktivitas bisnis secara normal, termasuk memberikan panduan dalam pengamanan informasi yang rahasia dan infrastruktur teknologi. Unit-unit tersebut bertanggung jawab untuk menyediakan kebijakan, prosedur dan perangkat yang akan membantu untuk mengurangi potensi risiko operasional yang telah teridentifikasi.

PROSES MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Danamon telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian seluruh risiko yang dihadapi baik di tingkat entitas utama maupun Perusahaan Anak. Proses ini tercantum dalam kebijakan dan panduan kerja di setiap lini bisnis dan Perusahaan Anak.

Gambaran proses manajemen risiko sebagai berikut:



Dalam struktur Manajemen Risiko yang diterapkan Danamon, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi mengkonsolidasikan seluruh eksposur risiko Danamon yang dikelola oleh masing-masing penanggung jawab risiko, yakni unit-unit fungsional.

Lini bisnis, unit pendukung dan Perusahaan Anak merupakan satuan kerja operasional yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko dari awal hingga akhir dalam lingkup tanggung jawabnya. Mereka harus dengan jelas mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko. Sebelum memasuki kegiatan yang mengandung risiko, mitigasi dalam pengelolaan risiko perlu dipertimbangkan.

Dalam menjalankan perannya sebagai pemantau dan pengontrol risiko pada satuan kerja operasional, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi akan mengevaluasi strategi bisnis, kebijakan dan *product program*.

Dalam melakukan kontrol dan sistem pemantauan yang baik, Danamon telah memiliki sistem informasi manajemen risiko pada tingkat yang cukup rinci, antara lain *Internal Credit Rating System*, *ALM System*, *Central Negative List* dan *Operational Risk Management System*. Sistem-sistem tersebut digunakan untuk mendeteksi setiap perkembangan yang kurang menguntungkan pada tahap dini, sehingga memungkinkan melakukan tindakan korektif untuk meminimalisir kerugian kepada Danamon.

PENGENDALIAN INTERNAL

Penerapan pengendalian internal dalam pengelolaan risiko mencakup:

- Penetapan struktur organisasi dengan melakukan pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja operasional dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian risiko (*risk management unit*). Hal ini sesuai dengan pendekatan *Three Line of Defense*.
- Penetapan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, yaitu unit kerja independen yang membuat kebijakan manajemen risiko dan metodologi pengukuran risiko, menetapkan limit risiko dan melakukan validasi data/model.
- Pengkajian dan pemantauan setiap transaksi dan aktivitas fungsional yang mempunyai eksposur risiko, sesuai kebutuhan oleh masing-masing lini bisnis.

Selain itu, Danamon senantiasa memastikan dipenuhinya berbagai hal pokok dalam proses pengendalian, mencakup adanya kesesuaian sistem pengendalian internal dan risiko Danamon, penetapan wewenang, pemantauan kebijakan, prosedur dan limit, struktur organisasi yang jelas dan prinsip empat mata atau *four eyes principle* yang memadai dan kecukupan prosedur untuk pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan.

Danamon juga mengkaji efektivitas penerapan manajemen risiko termasuk kecukupan kebijakan, prosedur dan sistem informasi manajemen secara berkala. Termasuk melakukan audit internal atas proses manajemen risiko dan pemantauan perbaikan atas hasil temuan audit.

SUMBER DAYA MANUSIA

Penerapan Manajemen Risiko di Danamon didukung oleh sumber daya manusia yang memadai dan kompeten di semua tingkat. Kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia terkait dengan manajemen risiko terus ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan secara internal maupun eksternal serta keharusan mengikuti sertifikasi manajemen risiko sesuai dengan regulasi yang berlaku.

BUDAYA RISIKO

Budaya manajemen risiko yang kuat dapat diciptakan jika seluruh karyawan dapat mengetahui dan mengerti risiko-risiko yang dihadapi dalam menjalankan berbagai aktivitas. Dalam hal ini Danamon berketetapan untuk membangun suatu kombinasi nilai-nilai yang unik, kepercayaan, pelaksanaan dan pengawasan manajemen yang akan memastikan bahwa seluruh jajaran Danamon menjalankan operasional Bank secara hati-hati (*prudent*) dan berdasarkan *best practices*.

Budaya risiko dimaksud ditetapkan melalui:

- Pengarahannya dan pengawasan dari Dewan Komisaris dan Direksi.
- Pengenalan manajemen risiko sebagai bagian yang utuh dari pelaksanaan bisnis.
- Kepatuhan terhadap semua kebijakan, prosedur, hukum dan peraturan yang berlaku.

Kesadaran dan budaya risiko pada semua tingkatan organisasi terus dibangun melalui:

- Komunikasi akan pentingnya mengelola risiko.
- Komunikasi atas tingkat toleransi risiko dan profil risiko yang diharapkan melalui berbagai batasan dan manajemen portofolio.

- Memberi kewenangan kepada karyawan untuk menangani risiko secara hati-hati (*prudent*) dalam kegiatan mereka, termasuk menyiapkan mitigasi risiko yang memadai.
- Memantau efektivitas manajemen risiko di seluruh area.

PENGELOLAAN RISIKO KHUSUS

a. Manajemen Risiko Produk dan Aktivitas Baru

Sesuai rencana bisnis Bank, Danamon telah merumuskan kebijakan yang mengatur tata cara penerbitan dan pemantauan produk. Termasuk di dalamnya, penerapan pengelolaan risiko produk/aktivitas baru sesuai ketentuan yang berlaku.

Produk baru disusun dan direkomendasikan oleh Lini Bisnis dan/atau Unit Produk dan/atau Perusahaan Anak pemilik produk. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi serta unit kerja terkait lainnya seperti Hukum dan Kepatuhan akan melakukan tinjauan atas produk baru tersebut. *Product Program* juga harus melalui uji kepatuhan sebelum diterbitkan.

Produk baru harus disetujui oleh Dewan Komisaris. Kewenangan persetujuan untuk perpanjangan produk dibedakan atas tingkat risikonya. Tingkat risiko produk dievaluasi berdasarkan kinerja produk, sasaran nasabah, kompleksitas proses operasional dan kondisi pasar. Bagi produk Syariah, juga harus berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah.

b. Manajemen Risiko Unit Syariah

Penerapan manajemen risiko Unit Syariah dilaksanakan berdasarkan ketentuan POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan manajemen risiko bagi Bank umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dari sisi kebijakan, Danamon memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi yang digunakan sebagai kerangka utama dan prinsip dasar dalam mengelola risiko yang wajib diikuti oleh semua lini bisnis dan Perusahaan Anak, termasuk Unit Syariah. Selain itu, Unit Syariah juga berpedoman pada prinsip syariah, yang merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

Produk/aktivitas yang dilakukan oleh Unit Syariah juga ditinjau kembali oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan unit kerja terkait lainnya serta mendapatkan Uji Kepatuhan. Pengukuran Risiko dilakukan dengan menggunakan metodologi yang sesuai dengan karakteristik Usaha Syariah, melalui pengukuran tingkat profil risiko yang dievaluasi secara triwulanan untuk selanjutnya disampaikan kepada regulator.

Dalam hal manajemen risiko terkait pemenuhan prinsip syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memberikan persetujuan untuk kebijakan, prosedur, sistem dan produk yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah dan akad yang akan digunakan. Pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko unit Syariah mengikuti kebijakan Danamon dan patuh terhadap aturan perbankan Syariah. Direktur yang membawahi unit Syariah juga menjadi salah satu anggota Komite Manajemen Risiko.

c. Manajemen Risiko Perusahaan Anak

Danamon menerapkan proses konsolidasi manajemen risiko dengan Perusahaan Anak, dengan tetap memperhatikan perbedaan karakteristik usaha Perusahaan Anak dengan Danamon. Hal itu dilakukan, antara lain melalui proses pendampingan dan penyesuaian praktik manajemen risiko dalam hal tata kelola risiko, kebijakan dan prosedur manajemen risiko, metodologi pengukuran risiko, pelaporan manajemen risiko dan peningkatan budaya sadar risiko.

Dalam hal pemantauan, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkelanjutan memantau kinerja portofolio Perusahaan Anak dan mengidentifikasi setiap peringatan dini dari penurunan kualitas portofolio Perusahaan Anak. Danamon juga memberikan bantuan tehnik dalam proses pengelolaan risiko terkait dengan risiko kredit, risiko pasar dan likuiditas, risiko operasional, SDM, sistem informasi, kebijakan dan prosedur serta metodologi dalam manajemen risiko.

Hasil pemantauan dan evaluasi atas eksposur risiko Perusahaan Anak dilaporkan secara berkala. Pemantauan tersebut mencakup analisa kinerja portofolio Perusahaan Anak secara lebih detail dan mendalam, termasuk tetapi tidak terbatas pada batasan-batasan portofolio yang telah

disetujui dalam *Product Program*. Pengelolaan risiko Perusahaan Anak ini menjadi salah satu fokus utama dari manajemen perusahaan karena berperan penting dalam menunjang rencana strategi Danamon.

Proses konsolidasi ini sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 mengenai Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Dengan adanya pengaturan tersebut, Danamon sebagai entitas utama akan terus melakukan upaya penyempurnaan terhadap proses pengelolaan risiko secara terintegrasi dengan Perusahaan Anak.

EVALUASI DAN EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka melaksanakan evaluasi atas efektivitas manajemen risiko, Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan risiko melalui komite-komite di bawahnya.

Agar mendapatkan data dan gambaran yang memadai mengenai langkah-langkah yang telah dijalankan dalam pengelolaan risiko, komite-komite tersebut mengadakan pertemuan secara berkala untuk membahas masalah yang terkait risiko dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Selain itu, evaluasi secara berkala dilakukan atas metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem, sistem informasi manajemen, serta ketepatan kebijakan, prosedur dan limit agar sesuai dengan perubahan peraturan, bisnis dan kondisi operasional. Sebagai hasil proses peninjauan kembali tersebut, selanjutnya Danamon menyelenggarakan *Portfolio Meeting* untuk mengevaluasi kondisi risiko *portfolio* terhadap Danamon dan Perusahaan Anak secara periodik.

PROFIL RISIKO

Penilaian profil risiko mencakup penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan sistem pengendalian risiko (*risk control system*) baik secara individual, konsolidasi maupun terintegrasi. Penilaian profil risiko individual dan konsolidasi dilakukan terhadap 10 risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategi, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi. Sedangkan dalam Manajemen Risiko Terintegrasi, risiko yang dikelola juga mencakup Risiko Transaksi Intra-Grup dan Risiko Asuransi namun mengecualikan Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi.

Sesuai dengan hasil pemantauan atas masing-masing kelompok risiko utama yang dihitung oleh Danamon selama tahun 2017, peringkat komposit untuk profil risiko Danamon secara individual maupun konsolidasi dan terintegrasi per 31 Desember 2017 berada pada peringkat 2 (*Low to Moderate*).

Berikut adalah konsolidasi Profil Risiko Bank per 31 Desember 2017:

Profil Risiko	Konsolidasi Penilaian Profil Risiko per 31 Desember 2017		
	Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	<i>Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Pasar	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Likuiditas	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Operasional	<i>Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Hukum	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Stratejik	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Kepatuhan	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Reputasi	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Imbal Hasil	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Investasi	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Peringkat Komposit	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Sesuai dengan peraturan OJK tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Danamon telah membentuk Konglomerasi Keuangan dengan Bank sebagai entitas utama dan Anak Perusahaan sebagai anggota konglomerasi keuangan.

Dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi, Konglomerasi Keuangan Danamon telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang diketuai oleh Direktur *Integrated Risk* dengan anggota Direktur yang ditunjuk dari setiap Perusahaan Anak dan kepala-kepala Divisi di Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Menyesuaikan struktur organisasi dengan membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi yang berperan memantau risiko pada Konglomerasi Keuangan.
- Menyusun Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi.
- Menerapkan *Group Risk Appetite Statement* kepada lini bisnis dan Perusahaan Anak.
- Koordinasi, komunikasi dan sosialisasi dengan Perusahaan Anak dilakukan secara terus menerus.

Tugas dan tanggung jawab dari Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi Danamon terkait dengan penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan perbaikan atau penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

Selama tahun 2017, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah mengadakan pertemuan secara berkala yang membahas mengenai:

- Laporan Profil Risiko Terintegrasi
- Laporan Profil Risiko dan *Update* dari Perusahaan Anak
- *Group Risk Appetite Statement*
- *Recovery Plan*
- Isu-isu lainnya yang memerlukan rekomendasi dari Komite.

FOKUS DAN KEGIATAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2017

Sesuai rencana bisnis bank, pada tahun 2017 Danamon melanjutkan berbagai program yang diimplementasikan tahun sebelumnya dan melaksanakan sejumlah program baru dengan penjelasan berikut:

Risiko	Kegiatan
Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Bank dan Perusahaan Anak dalam kelompok Konglomerasi Keuangan. • Pengelolaan risiko terintegrasi yang mencakup Risiko transaksi Intra-Grup, dan Risiko Asuransi. • Penyempurnaan laporan profil risiko sesuai ketentuan regulator. • Memperbarui <i>Risk Appetite Statement</i> (RAS), serta menerapkan kepada Lini Bisnis dan Perusahaan Anak. • Pembuatan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.03/2017 bagi Bank Sistemik. • Melaksanakan <i>Risk Management School</i> secara berkesinambungan sebagai sarana pembelajaran manajemen risiko bagi seluruh karyawan Bank melalui pelatihan tatap muka di dalam kelas. • Melaksanakan <i>stress test</i> secara <i>bankwide</i> sesuai Basel II minimal sekali dalam 1 tahun. • Menjalankan kerangka ICAAP yang telah dimiliki bank secara berkelanjutan. • Membentuk divisi khusus yaitu Divisi <i>Information Risk Management</i>, yang bertanggung jawab menangani risiko terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Kelangsungan Bisnis.

Risiko	Kegiatan
Kredit	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi <i>database</i> daftar negatif secara <i>bankwide</i> untuk meningkatkan proses <i>underwriting</i>. • Memperbaharui <i>Internal Rating Model</i> untuk lini bisnis Korporasi, Komersial, Institusi Keuangan dan Perusahaan Pembiayaan yang mencakup <i>review</i> segmentasi dan <i>logic Internal Model</i>, Model <i>Refinement</i> dan Validasi berikut kalibrasi PD, LGD dan EAD. • Pengembangan Model Deteksi Dini (<i>Early Warning Indicator</i>) untuk lini bisnis Korporasi dan Komersial. • Pengembangan Model <i>Risk Based Pricing</i> untuk lini bisnis Korporasi dan Komersial. • Pengembangan <i>Scorecard</i> dan <i>Internal Rating Model</i> pada lini bisnis <i>Small Medium Enterprise</i> (SME). • Pengembangan model <i>Scorecard</i> untuk lini bisnis Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Multiguna (KMG). • Pengembangan Model <i>Cross Selling Scorecard</i> untuk pembiayaan kartu kredit & Kredit Tanpa Agunan (KTA) berdasarkan data arus kas tabungan nasabah. • Pengembangan Model PSAK 71 atau IFRS9 untuk lini bisnis Korporasi, Komersial, Institusi Keuangan, Perusahaan Pembiayaan, SME, KPR, KMG, Kartu Kredit, KTA, Kredit Mikro (SEMM), Kredit Kepemilikan Kendaraan, Investasi, dan Asuransi. • Membentuk CCO (<i>Chief Credit Officer</i>) Office yang memiliki fungsi independen dan fokus sebagai pemutus kredit dan remedial. • Bank telah memiliki Kebijakan Risiko Kredit (<i>Credit Risk Policy</i>) yang telah diterapkan di semua Lini Bisnis Bank dan Perusahaan Anak. Bank juga telah membuat <i>Enterprise Banking Credit Guideline</i>. • Menetapkan dan mengklasifikasikan berbagai jenis industri menjadi kelompok industri dengan tingkat risiko tinggi, sedang, dan rendah. Bank akan memfokuskan pertumbuhannya pada industri dengan tingkat risiko sedang dan rendah. • Melanjutkan fokus pada akuisisi kredit baru pada lini bisnis yang berisiko rendah seperti <i>Mortgage</i> dan melakukan <i>Cross Sell</i>. • Mengurangi penyaluran kredit pada segmen risiko tinggi seperti ABF, SEMM dan UPL. • Penerapan infrastruktur sistem kredit seperti <i>Credit Processing System</i> (CPS) pada lini bisnis SME dan <i>Rules Based Engine</i> pada lini bisnis SME dan SEMM. • Secara rutin meninjau semua proses, kebijakan dan limit yang relevan dan akan menyesuainya jika diperlukan, termasuk penyesuaian yang diperlukan oleh peraturan OJK/BI dan pihak berwenang lainnya. • Secara rutin meninjau <i>product program</i> yang dimiliki Bank, baik dari sisi portofolio, kriteria, batasan dan ketentuan lainnya, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan. • Secara berkala melakukan <i>backtesting</i> untuk menilai kecukupan pencadangan kredit. Apabila diperlukan, maka akan dilakukan penambahan pencadangan kredit berdasarkan hasil dari <i>backtesting</i> tersebut. • Pada bisnis SEMM (Kredit Mikro) telah dilakukan sejumlah inisiatif, antara lain pemisahan unit kerja DSP SEMM menjadi 2 kelompok, yaitu <i>Micro Banking</i> dan <i>Special Asset</i>. <ul style="list-style-type: none"> - <i>Micro Banking</i> adalah unit-unit yang teridentifikasi memiliki potensi yang baik dan akan menjadi unit kerja yang menopang pertumbuhan kredit SEMM. Proses Penagihan Kembali dan Inisiasi akan menjadi bagian dari '<i>Single Captain</i>' yang akan diharapkan memberikan dorongan terhadap pertumbuhan kredit yang lebih sehat. - <i>Special Asset</i> (SA) mencakup seluruh unit-unit yang difokuskan menangani proses penagihan kembali meliputi pembayaran, pelunasan dan penutupan fasilitas kredit. Fokus utama dari penagihan kembali dalam unit SA akan menjadi langkah yang baik dalam memperbaiki kualitas kredit.
Operasional, Fraud & QA	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan independensi fungsi dan peran <i>operational risk officer</i> di lini bisnis, fungsi pendukung dan Perusahaan Anak. • Menyempurnakan aplikasi <i>Operational Risk Management System</i> (ORMS) untuk meningkatkan efektivitas dalam mengelola risiko operasional secara komprehensif di Bank dan Perusahaan Anak. • Membangun kesadaran terhadap Manajemen Risiko Operasional melalui <i>E-Learning</i>, modul <i>risk management school</i>, <i>email blast</i>, video kesadaran <i>anti fraud</i> untuk meningkatkan kesadaran seluruh jajaran manajemen dan karyawan akan pentingnya mengelola risiko operasional. • Implementasi ORPA (<i>Operational Risk Pre Assessment</i>) untuk meninjau kembali risiko atas usulan inisiatif strategik baru, beserta rekomendasi mitigasi risikonya. • Kampanye <i>Self Raise</i> untuk memberikan sarana bagi pegawai dalam mengemukakan suatu isu yang berpotensi menimbulkan risiko operasional. • Menerapkan mekanisme eskalasi atas potensi/kejadian risiko operasional • Implementasi <i>Risk Acceptance</i> untuk memastikan bahwa <i>action plan</i> atas isu risiko operasional yang masih belum selesai melebihi 12 bulan telah mendapatkan persetujuan manajemen.

Risiko	Kegiatan
Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Kelangsungan Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan Kebijakan Keamanan Informasi Bank yang merupakan persyaratan dasar dan sebagai acuan terhadap penerapan manajemen risiko dari aspek Keamanan Informasi dalam Bank Danamon Indonesia. Mengadakan pelatihan keamanan siber kepada jajaran komisaris, direksi dan manajemen senior, termasuk anggota dari <i>Incident Management Team</i> (IMT). Aspek ini sejalan dengan strategi bisnis Bank dalam era digitalisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran sehubungan manajemen resiko insiden keamanan siber. Mengembangkan <i>template</i> yang berisikan persyaratan kontrol untuk digunakan saat melakukan penilaian risiko Teknologi Informasi terhadap proyek, produk dan layanan baru yang memanfaatkan dukungan dari Teknologi Informasi. Dengan adanya pengembangan <i>template</i> standar tersebut, proses penilaian risiko menjadi lebih terukur dan seragam. Mengembangkan dan melanjutkan penerapan program <i>Business Continuity Management</i> (BCM) secara komprehensif untuk menjaga kelangsungan aktivitas bisnis dan operasional saat menghadapi kondisi darurat. Penerapan ini mencakup unit kritikal maupun non-kritikal, dengan melakukan koordinasi penyusunan dokumen <i>Business Continuity Plan</i> (BCP), melakukan pengawasan terhadap pengujian BCP, dan pengelolaan dalam penanganan insiden yang terjadi. Menerapkan program <i>BCP Automation</i> yang bertujuan untuk melakukan penyimpanan dokumen BCP secara elektronik dalam sistem ORMS yang telah disiapkan. Membangun kesadaran sehubungan Manajemen Risiko Informasi bagi seluruh jajaran manajemen dan karyawan melalui berbagai media, misalnya: <i>Line of Business Sharing session</i> yang mencakup area BCM dan Keamanan Informasi, <i>Risk Academy</i>, pengiriman material edukasi dan peningkatan kesadaran secara periodik melalui <i>eMail</i>. Termasuk didalamnya, mengembangkan materi pelatihan online (<i>e-Learning</i>), dalam aspek Keamanan Informasi dan Kelangsungan Bisnis (BCM).
Pasar dan Likuiditas	<ul style="list-style-type: none"> Pengkinian struktur limit dan kebijakan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas Bank. Penyempurnaan perhitungan LCR dan penyesuaian pelaporan berdasarkan Peraturan OJK. Penyesuaian perhitungan NSFR sesuai Peraturan OJK untuk diterapkan pada tahun 2018. Penerapan validasi terhadap metodologi pengukuran risiko pasar dan likuiditas. Implementasi <i>ALM SunGard System</i> pada Perusahaan Anak yang sejalan dengan Bank sebagai entitas utama.

UPAYA PENGELOLAAN RISIKO DENGAN PENGUNGKAPAN EKSPOSUR DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

A. RISIKO KREDIT

Risiko kredit adalah potensi kerugian finansial yang diakibatkan oleh kegagalan dari peminjam atau *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Eksposur risiko kredit pada Danamon terutama muncul dari kegiatan perkreditan maupun aktivitas fungsional lainnya seperti pembiayaan perdagangan (*trade finance*), *treasury* dan investasi. Eksposur risiko kredit juga dapat meningkat karena adanya konsentrasi kredit pada wilayah geografis maupun karakteristik debitur tertentu.

1) Manajemen Risiko Kredit

Danamon menerapkan Manajemen Risiko Kredit secara individual dan terintegrasi dengan Perusahaan Anak pada Konglomerasi Keuangan yang melibatkan peran aktif dari

Dewan Komisaris dan Direksi. Danamon juga senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko secara menyeluruh pada setiap aspek aktivitas perkreditan.

Danamon memiliki Kebijakan Risiko Kredit yang merupakan kebijakan inti dan kerangka acuan utama dalam penerapan manajemen risiko kredit pada Danamon serta Perusahaan Anak. Kebijakan ini, bersama dengan panduan risiko kredit di tingkat Lini Bisnis dan Perusahaan Anak, mengatur proses manajemen risiko secara komprehensif mulai dari identifikasi, pengukuran, pemantauan, hingga pengendalian risiko. Seluruh kebijakan dan panduan risiko kredit pada Danamon ditinjau secara berkala untuk memenuhi peraturan yang berlaku serta menyesuaikan dengan *risk appetite* Danamon.

Proses	Langkah Penerapan
Identifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meninjau secara berkala Program Produk Lini Bisnis dan Perusahaan Anak yang memuat analisa industri dan strategi pemasaran, kriteria pemberian kredit, performa produk, serta penerapan manajemen risiko. • Menetapkan kriteria pemberian kredit yang didasarkan atas pendekatan 5C: <i>Character, Capacity to Repay, Capital, Collateral</i> dan <i>Condition of Economy</i> serta menyesuaikan dengan <i>risk appetite</i>, profil risiko dan rencana bisnis Bank.
Pengukuran	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun dan menggunakan metodologi pengukuran risiko kredit seperti <i>internal credit rating</i> dan <i>credit scorecards</i> yang senantiasa dikembangkan dan divalidasi untuk mengevaluasi pemberian pinjaman maupun fasilitas lain terkait perkreditan. • Menentukan parameter pengukuran risiko kredit serta menetapkan nilai pemicu dan batasan terhadap tingkat kredit bermasalah, konsentrasi portofolio, maupun parameter kredit lainnya. • Melakukan <i>stress test</i> terhadap perubahan kondisi yang signifikan sebagai estimasi dampak potensial kondisi tersebut terhadap portofolio, pendapatan, maupun kondisi permodalan Danamon.
Pemantauan	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau secara berkala risiko yang diambil sesuai dengan <i>risk appetite</i> dan kinerja bisnis tetap berada dalam batas yang diinginkan. • Memantau performa produk dan portofolio Danamon secara keseluruhan maupun di tingkat bisnis melalui Sistem Informasi Manajemen yang andal. • Mengevaluasi kecukupan penerapan manajemen risiko yang dapat memberikan langkah perbaikan dan penyesuaian terhadap strategi manajemen risiko.
Pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan dan meninjau secara berkala Kebijakan dan Panduan atas penerapan manajemen risiko kredit baik yang berlaku secara umum maupun secara khusus pada unit bisnis. • Menerapkan <i>four eyes principle</i> yang memadai pada setiap proses pemberian fasilitas kredit. • Mendelegasikan kewenangan pemberian kredit kepada anggota Komite Kredit yang dipilih berdasarkan kualifikasi dan kompetensi. • Menetapkan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada debitur individual maupun grup debitur, baik kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait. • Menetapkan tingkat risiko dan limit konsentrasi terhadap sektor industri tertentu. • Mengenali kredit yang bermasalah secara dini agar proses remedial dapat dilaksanakan secara tepat dan efisien. • Membentuk pencadangan sesuai dengan regulasi yang berlaku. • Membangun mekanisme sistem pengendalian internal yang independen dan berkelanjutan;

Proses Manajemen Risiko Kredit dilakukan secara menyeluruh di setiap lapis pertahanan di lingkungan Danamon. Unit bisnis pada Lini Bisnis Danamon dan Perusahaan Anak sebagai risk taking unit berperan sebagai lapis pertama yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan manajemen risiko secara memadai.

Satuan Kerja Manajemen Risiko Divisi Risiko Kredit berperan sebagai lapis pertahanan kedua yang independen. Satuan ini bertanggung jawab untuk memantau dan mengkaji parameter risiko kredit, meninjau dan menyesuaikan Kebijakan Risiko Kredit, serta mengembangkan metodologi pengukuran risiko dan prosedur pengendalian risiko. Divisi Kepatuhan sebagai lapis kedua juga senantiasa aktif dalam memberikan rekomendasi atas pelaksanaan manajemen risiko kredit sejalan dengan arahan regulasi dan pemberian fasilitas kredit kepada pihak terkait Danamon.

Kesesuaian atas pelaksanaan manajemen risiko kredit secara berkelanjutan dievaluasi oleh Satuan Kerja Audit Internal yang independen berperan sebagai lapis pertahanan ketiga.

Satuan ini secara aktif memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan pelaksanaan manajemen risiko di seluruh unit pada Danamon.

Model Peringkat Internal dan Scorecard pada Risiko Kredit

Danamon telah membentuk tim *Risk Modeling & Quantitative Technique* untuk mengembangkan, mengimplementasikan, memantau dan mengkaji permodelan, metodologi dan teknik kuantitatif manajemen risiko. Serta memastikan bahwa bank memiliki permodelan risiko yang kuat untuk pengelolaan portofolio yang *prudent*, pada bisnis kredit di bawah ini:

- Korporasi
- Komersial
- Perusahaan Pembiayaan
- Institusi Keuangan
- Kartu Kredit
- Kredit *Micro*
- Kredit Tanpa Agunan
- Kredit Usaha Kecil dan Menengah

- Kredit Pemilikan Rumah
- Pembiayaan pembelian kendaraan bermotor

Selain model-model di atas, juga mengembangkan model *Probability of Default* (PD), implementasi “Danamon *Rating Scale*” (DRS) yang dipetakan kepada Model PD dan *scores/ratings* berlaku untuk semua lini bisnis.

Model Peringkat Internal dan *Scorecard* Kredit digunakan sebagai salah satu dari beberapa parameter sebagai referensi untuk pengambilan keputusan kredit, akuisisi dan pemantauan portofolio. Dengan penerapan Model Peringkat Internal dan *Scorecard* Kredit, diharapkan dapat meningkatkan keseluruhan kualitas portofolio kredit Danamon.

2) Risiko Konsentrasi Kredit

Risiko konsentrasi kredit timbul ketika sejumlah peminjam bergerak dalam aktivitas usaha yang sejenis atau memiliki kegiatan usaha dalam wilayah geografis yang sama, atau memiliki karakteristik yang sejenis yang dapat menyebabkan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya sama-sama dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi ataupun kondisi lainnya.

Danamon mendorong adanya diversifikasi dari portofolio kreditnya pada berbagai wilayah geografis, industri, produk kredit, individual obligor, mencerminkan profil risiko yang seimbang dan sehat dan untuk fokus pada upaya pemasaran terhadap industri dan nasabah yang potensial untuk meminimalisir risiko kredit. Diversifikasi ini dilakukan berdasarkan rencana strategi Danamon, sektor target, kondisi ekonomi saat ini, kebijakan pemerintah, sumber pendanaan dan proyeksi pertumbuhan.

3) Mekanisme Pengukuran Dan Pengendalian Risiko Kredit

Danamon melakukan pemantauan secara intensif dan ketat atas setiap perkembangan yang dapat mempengaruhi portofolio Danamon secara individu maupun secara terintegrasi dengan Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan. Peninjauan atas *portfolio* kredit dilakukan dari tingkat bisnis sebagai *risk taking unit* hingga tingkat Satuan Kerja Manajemen Risiko yang juga dipantau secara berkala oleh Komite Manajemen Risiko di tingkat Direksi serta Komite Pemantauan Risiko di tingkat Dewan Komisaris.

Danamon juga melakukan pengukuran atas tagihan yang telah jatuh tempo dan tagihan yang mengalami penurunan nilai. Hal ini mencakup tagihan yang telah jatuh tempo berupa aset keuangan baik sebagian maupun seluruhnya, termasuk pembayaran bunga, yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dan tagihan yang mengalami penurunan nilai yakni aset keuangan yang memiliki bukti objektif mengalami penurunan nilai yang didasarkan atas estimasi arus kas di masa mendatang.

Evaluasi atas tagihan yang mengalami penurunan nilai dikategorikan dalam dua segmen utama, yaitu *Enterprise Banking* dan *Retail & Mass Market*. Pada segmen *Enterprise Banking*, penilaian mencakup empat kategori utama yaitu status pembayaran, kinerja keuangan debitur, penilaian atas status kemampuan bayar debitur dan tagihan yang mengalami restrukturisasi. Sedangkan untuk segmen *Retail & Mass Market*, penilaian dilakukan menggunakan pendekatan kolektif melalui portofolio dan dinilai berdasarkan kualitas aset serta kondisi restrukturisasi.

4) Pencadangan

Pembentukan pencadangan atas portofolio kredit Danamon dilakukan baik melalui metode Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) maupun Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) yang berlaku untuk seluruh lini bisnis Danamon serta Perusahaan Anak, baik untuk kredit konvensional maupun pinjaman syariah yang mengikuti ketentuan dan peraturan mengenai pencadangan yang berlaku.

Perhitungan CKPN mengacu pada Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) yang disebut sebagai *loan impairment*. Perhitungan pencadangan kredit didasarkan atas penurunan nilai tagihan dengan metodologi yang dikembangkan oleh Danamon dan disetujui oleh Direksi.

Perhitungan CKPN dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

- CKPN Individual merupakan pencadangan atas penurunan nilai aset keuangan yang dievaluasi secara individual menggunakan metode *discounted cash flow*, dimana dihitung selisih antara nilai wajar aset saat ini dengan nilai wajar aset sebelum *impairment*.
- CKPN Kolektif merupakan pencadangan atas penurunan nilai aset keuangan yang dievaluasi secara kolektif, yaitu apabila tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai aset yang dievaluasi secara individual.

Untuk segmen kredit *Enterprise Banking* (Korporasi dan Komersial), dan UKM, Danamon menerapkan metode *migration loss* (perhitungan berdasarkan perpindahan kolektibilitas dari eksposur debitur setelah suatu waktu tertentu. Dalam hal ini, Danamon menerapkan jangka waktu 1 tahun). Sedangkan untuk segmen *Retail & Mass Market*, perhitungan CKPN kolektif menggunakan metode *net flow rate* (perhitungan berdasarkan perpindahan eksposur debitur pada *days-past-due* (DPD) *bucket*) atau analisis *vintage*.

Danamon juga wajib melakukan perhitungan atas PPA baik terhadap Aset Produktif maupun Aset Non Produktif yang mengikuti peraturan OJK yang berlaku.

5) Pengungkapan Kuantitatif Risiko Kredit Danamon

Perhitungan kuantitatif risiko kredit Danamon untuk tahun 2017 diungkapkan melalui beberapa tabel berikut.

1.1. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah-Bank secara Individual

Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset di neraca, eksposur kewajiban komitmen/kontinjensi dalam transaksi rekening administratif (TRA), dan eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2017									
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah									
		Jakarta, Bogor, Tangerang, Karawang, Bekasi dan Lampung	Jawa Barat	Jawa Timur	Sulawesi, Maluku dan Papua	Kalimantan	Sumatra Utara	Jawa Tengah dan Yogyakarta	Bali, NTT dan NTB	Sumatra Selatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
1	Tagihan Kepada Pemerintah	24.906.212	17	-	245	-	-	42	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	1.372.103	-	51	121	293	104	46	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	5.582.431	67.896	35.169	60.633	3	3.083	38.811	159.113	40	
5	Kredit Beragunan Rumah Tinggal	2.644.851	180.466	233.383	29.676	22.002	67.540	85.869	85.799	4.396	
6	Kredit Beragunan Properti Komersial	961.258	-	115.722	12.279	22.074	75.450	21.285	28.069	9.549	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	9.917.251	2.530.312	3.297.956	4.125.227	2.430.753	5.271.468	2.441.895	527.167	1.276.042	
9	Tagihan Kepada Korporasi	43.874.182	2.985.027	5.579.035	2.708.738	2.815.693	4.778.381	3.199.387	1.382.948	1.662.376	
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	808.162	94.241	198.123	198.290	177.875	181.161	175.621	75.557	126.239	
11	Aset Lainnya	4.248.066	213.138	262.479	489.063	332.075	374.354	357.095	208.755	270.909	
	Total	94.314.516	6.071.097	9.721.918	7.624.272	5.800.768	10.751.541	6.320.051	2.467.408	3.349.551	

(dalam jutaan rupiah)

31 Desember 2016											
Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah											
Total	Jakarta, Bogor, Tangerang, Karawang, Bekasi dan Lampung	Jawa Barat	Jawa Timur	Sulawesi, Maluku dan Papua	Kalimantan	Sumatra Utara	Jawa Tengah dan Yogyakarta	Bali, NTT dan NTB	Sumatra Selatan	Total	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			(18)	
24.906.516	24.977.493	117	-	170	-	-	61	-	-	24.977.841	
1.372.718	1.131.733	11	-	201	113	185	21	-	-	1.132.264	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.947.179	5.941.165	91.707	94.280	41.443	10	4.943	48.740	197.737	129	6.420.154	
3.353.982	2.009.860	114.564	86.612	25.093	52.314	55.112	56.340	52.392	10.249	2.462.536	
1.245.686	795.229	1.191	108.438	13.668	19.604	61.355	34.647	23.904	2.733	1.060.769	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.818.071	9.707.124	2.983.062	3.986.941	4.350.231	2.543.964	5.036.624	3.093.832	544.958	1.952.980	34.199.716	
68.985.767	42.218.115	2.788.352	5.101.930	2.707.031	2.609.339	4.249.986	3.071.870	1.095.922	1.633.164	65.475.709	
2.035.269	663.555	127.846	262.727	202.965	234.990	192.217	180.175	41.770	182.329	2.088.574	
6.755.934	3.427.345	189.771	260.192	438.624	268.363	352.673	313.392	185.145	227.969	5.663.474	
146.421.122	90.871.619	6.296.621	9.901.120	7.779.426	5.728.697	9.953.095	6.799.078	2.141.828	4.009.553	143.481.037	

1.2. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah -Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
**Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset di neraca, eksposur kewajiban komitmen/
kontinjensi dalam transaksi rekening administratif (TRA), dan eksposur yang menimbulkan risiko kredit
akibat kegagalan pihak lawan (counterparty credit risk)**

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2017									
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah									
		Jakarta, Bogor, Tangerang, Karawang, Bekasi dan Lampung	Jawa Barat	Jawa Timur	Sulawesi, Maluku dan Papua	Kalimantan	Sumatra Utara	Jawa Tengah dan Yogyakarta	Bali, NTT dan NTB	Sumatra Selatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
1	Tagihan Kepada Pemerintah	24.906.212	440	-	483	-	-	44	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	1.372.251	134	73	379	328	117	52	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	5.990.532	67.896	47.269	87.600	21.593	15.326	46.246	159.113	40	
5	Kredit Beragunan Rumah Tinggal	2.646.535	180.779	233.383	29.676	22.002	67.540	85.869	85.799	4.396	
6	Kredit Beragunan Properti Komersial	961.258	-	115.722	12.279	22.074	75.450	21.285	28.069	9.549	
7	Kredit Pegawai/ Pensiunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	16.500.337	5.362.644	7.393.759	7.816.482	4.297.892	9.951.457	5.179.312	527.167	1.276.042	
9	Tagihan Kepada Korporasi	43.231.256	2.985.027	5.581.198	2.708.738	2.815.693	4.778.381	3.200.573	1.382.948	1.662.376	
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	918.256	153.506	262.164	252.265	205.830	243.900	210.424	75.557	126.239	
11	Aset Lainnya	4.684.885	271.399	341.678	560.840	379.412	474.584	402.437	208.755	270.909	
	Total	101.211.522	9.021.825	13.975.246	11.468.742	7.764.824	15.606.755	9.146.242	2.467.408	3.349.551	

(dalam jutaan rupiah)

31 Desember 2016											
Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah											
Total	Jakarta, Bogor, Tangerang, Karawang, Bekasi dan Lampung	Jawa Barat	Jawa Timur	Sulawesi, Maluku dan Papua	Kalimantan	Sumatra Utara	Jawa Tengah dan Yogyakarta	Bali, NTT dan NTB	Sumatra Selatan	Total	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			(18)	
24.907.179	24.977.494	147	-	461	7	-	61	-	-	24.978.170	
1.373.334	1.131.942	315	48	247	125	566	21	-	-	1.133.264	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.435.615	6.398.595	106.998	109.083	66.223	20.164	22.447	62.956	197.737	129	6.984.332	
3.355.979	2.009.860	114.564	86.612	25.093	52.314	55.112	56.340	52.392	10.249	2.462.536	
1.245.686	795.229	1.191	108.438	13.668	19.604	61.355	34.647	23.904	2.733	1.060.769	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58.305.092	15.794.458	5.700.535	8.189.585	8.037.475	4.460.790	9.553.441	6.015.197	544.958	1.952.980	60.249.419	
68.346.190	41.618.181	2.788.352	5.101.930	2.707.031	2.609.339	4.249.986	3.071.878	1.095.922	1.633.164	64.875.783	
2.448.141	748.588	160.963	310.503	244.214	260.872	250.522	206.007	41.770	182.329	2.405.768	
7.594.899	3.838.623	247.042	342.284	499.231	320.051	453.524	354.391	185.145	227.969	6.468.260	
174.012.115	97.312.970	9.120.107	14.248.483	11.593.643	7.743.266	14.646.953	9.801.498	2.141.828	4.009.553	170.618.301	

2.1. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak-Bank secara Individual

Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset di neraca, eksposur kewajiban komitmen/kontinjensi dalam transaksi rekening administratif (TRA), dan eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2017					
		Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak					
		≤1 tahun	>1thn s.d. 3thn	>3thn s.d. 5thn	> 5thn	Non-Kontraktual	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	12.409.899	4.787.829	361.602	546	7.346.640	24.906.516
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	1.093.120	272.207	7.276	115	-	1.372.718
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	4.310.154	1.213.732	234.625	181.003	7.665	5.947.179
5	Kredit Beragunan Rumah Tinggal	15.441	149.399	473.517	2.715.623	2	3.353.982
6	Kredit Beragunan Properti Komersial	781.044	47.005	206.086	211.551	-	1.245.686
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	6.537.976	15.254.604	8.641.549	1.349.434	34.508	31.818.071
9	Tagihan Kepada Korporasi	50.048.346	6.948.716	6.436.481	5.486.512	65.712	68.985.767
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	248.188	561.965	238.498	136.662	849.956	2.035.269
11	Aset Lainnya	397.839	15.510	-	4.628	6.337.957	6.755.934
TOTAL		75.842.007	29.250.967	16.599.634	10.086.074	14.642.440	146.421.122

2.2. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak-Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset di neraca, eksposur kewajiban komitmen/kontinjensi dalam transaksi rekening administratif (TRA), dan eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2017					
		Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak					
		≤1 tahun	>1thn s.d. 3thn	>3thn s.d. 5thn	> 5thn	Non-Kontraktual	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	12.409.914	4.787.859	362.220	546	7.346.640	24.907.179
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	1.093.189	272.714	7.316	115	-	1.373.334
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	4.776.638	1.235.684	234.625	181.003	7.665	6.435.615
5	Kredit Beragunan Rumah Tinggal	15.441	149.587	475.326	2.715.623	2	3.355.979
6	Kredit Beragunan Properti Komersial	781.044	47.005	206.086	211.551	-	1.245.686
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	11.111.229	32.625.366	13.164.999	1.368.990	34.508	58.305.092
9	Tagihan Kepada Korporasi	49.259.392	7.060.336	6.474.238	5.486.512	65.712	68.346.190
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	344.571	832.862	284.090	136.662	849.956	2.448.141
11	Aset Lainnya	708.747	28.218	31.633	4.628	6.821.673	7.594.899
TOTAL		80.500.165	47.039.631	21.240.533	10.105.630	15.126.156	174.012.115

(dalam jutaan rupiah)

31 Desember 2016						
Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak						
	≤1 tahun	>1thn s.d. 3thn	>3thn s.d. 5thn	> 5thn	Non-Kontraktual	Total
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	13.886.409	2.821.522	793.760	307.123	7.169.027	24.977.841
	1.045.432	59.938	26.488	406	-	1.132.264
	-	-	-	-	-	-
	3.930.691	1.796.740	471.582	202.546	18.595	6.420.154
	25.252	172.283	325.020	1.939.952	29	2.462.536
	692.788	36.557	296.017	35.407	-	1.060.769
	-	-	-	-	-	-
	7.618.720	18.117.581	7.330.842	1.099.816	32.757	34.199.716
	47.304.135	6.868.547	6.020.994	5.236.274	45.759	65.475.709
	478.428	563.833	282.373	101.848	662.092	2.088.574
	-	-	-	-	5.663.474	5.663.474
	74.981.855	30.437.001	15.547.076	8.923.372	13.591.733	143.481.037

(dalam jutaan rupiah)

31 Desember 2016						
Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak						
	≤1 tahun	>1thn s.d. 3thn	>3thn s.d. 5thn	> 5thn	Non-Kontraktual	Total
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	13.886.435	2.821.572	794.013	307.123	7.169.027	24.978.170
	1.045.590	60.599	26.669	406	-	1.133.264
	-	-	-	-	-	-
	4.399.879	1.891.730	471.582	202.546	18.595	6.984.332
	25.252	172.283	325.020	1.939.952	29	2.462.536
	692.788	36.557	296.017	35.407	-	1.060.769
	-	-	-	-	-	-
	12.286.572	34.739.651	12.051.417	1.139.022	32.757	60.249.419
	46.554.493	6.988.460	6.050.797	5.236.274	45.759	64.875.783
	561.140	761.724	318.964	101.848	662.092	2.405.768
	262.336	22.514	2.366	54	6.180.990	6.468.260
	79.714.485	47.495.090	20.336.845	8.962.632	14.109.249	170.618.301

3.1. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi-Bank secara Individual

Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset di neraca, eksposur kewajiban komitmen/kontinjensi dalam transaksi rekening administratif (TRA), dan eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*)

No.	Sektor Ekonomi*)	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Sektor publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan kepada Bank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Posisi 31 Desember 2017					
1	Pertanian, perburuan dan kehutanan	-	-	-	-
2	Perikanan	-	-	-	-
3	Pertambangan dan penggalian	-	-	-	-
4	Industri pengolahan	-	-	-	-
5	Listrik, gas dan air	-	-	-	-
6	Konstruksi	-	33.525	-	-
7	Perdagangan besar dan eceran	-	-	-	-
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	-	-	-
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	-	-	-	-
10	Perantara keuangan	-	14.264	-	762.625
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	-	-	-	-
12	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	162	569	-	-
13	Jasa pendidikan	-	-	-	-
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	-	-	-
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	-	-	-	-
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-	-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-
19	Bukan lapangan usaha	142	217	-	-
20	Lainnya	24.906.212	1.324.143	-	5.184.554
	Total	24.906.516	1.372.718	-	5.947.179
Posisi 31 Desember 2016					
1	Pertanian, perburuan dan kehutanan	-	-	-	-
2	Perikanan	-	-	-	-
3	Pertambangan dan penggalian	-	-	-	-
4	Industri pengolahan	-	-	-	-
5	Listrik, gas dan air	-	-	-	-
6	Konstruksi	-	17.038	-	-
7	Perdagangan besar dan eceran	-	-	-	-
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	-	-	-
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	-	-	-	-
10	Perantara keuangan	-	20.086	-	843.228
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	-	-	-	-
12	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	348	320	-	-
13	Jasa pendidikan	-	-	-	-
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	-	-	-
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	-	-	-	-
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-	-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-
19	Bukan lapangan usaha	-	210	-	-
20	Lainnya	24.977.493	1.094.610	-	5.576.926
	Total	24.977.841	1.132.264	-	6.420.154

Catatan:

Sektor ekonomi mengacu pada sektor ekonomi yang tercantum dalam Laporan Bulanan Bank Umum (LBU). Tagihan bersih yang tidak memiliki informasi sektor ekonomi di Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) saat ini disajikan sebagai "Perantara Keuangan" untuk tagihan kepada bank, sedangkan untuk selain tagihan kepada bank disajikan sebagai "Lainnya"

(dalam jutaan rupiah)

	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai/Pensiunan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Retail	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang telah jatuh tempo	Aset Lainnya
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
-	-	-	-	969.368	2.194.836	24.060	-
-	-	-	-	88.381	21.203	2.510	-
-	-	-	-	81.957	566.303	811	-
-	-	-	-	1.340.941	16.396.137	400.231	-
-	-	-	-	46.834	33.508	415	-
-	705.954	-	-	185.695	1.095.124	14.455	-
-	-	-	-	8.984.539	25.849.142	994.607	-
-	-	-	-	593.780	1.123.559	30.412	-
-	-	-	-	878.708	3.356.765	186.866	-
-	-	-	-	67.374	5.096.457	404	-
-	539.732	-	-	659.798	1.293.912	42.210	-
-	-	-	-	171	-	-	-
6	-	-	-	13.301	16.439	334	-
-	-	-	-	91.114	34.655	3.014	-
-	-	-	-	545.412	268.306	28.629	-
-	-	-	-	2.048	-	103	-
-	-	-	-	413	-	-	-
-	-	-	-	49	-	-	-
3.353.976	-	-	-	16.176.998	1.565.449	294.778	-
-	-	-	-	1.091.190	10.073.972	11.430	6.755.934
3.353.982	1.245.686	-	-	31.818.071	68.985.767	2.035.269	6.755.934
-	-	-	-	1.105.676	1.747.653	48.266	-
-	-	-	-	82.830	15.694	2.766	-
-	-	-	-	62.492	490.802	126.062	-
-	-	-	-	1.499.941	15.156.148	263.359	-
-	-	-	-	24.039	131.568	-	-
-	503.121	-	-	146.779	889.876	27.987	-
-	-	-	-	11.129.354	24.366.479	993.845	-
-	-	-	-	780.675	1.069.219	40.275	-
-	-	-	-	941.884	3.267.609	179.913	-
-	-	-	-	77.942	5.035.502	8.342	-
-	557.648	-	-	725.166	1.372.949	90.607	-
-	-	-	-	562	-	52	-
-	-	-	-	17.382	10.130	303	-
-	-	-	-	131.870	30.753	3.957	-
-	-	-	-	797.243	390.957	38.431	-
-	-	-	-	2.546	-	113	-
-	-	-	-	561	-	140	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2.462.536	-	-	-	15.669.781	1.235.150	264.156	-
-	-	-	-	1.002.993	10.265.220	-	5.663.474
2.462.536	1.060.769	-	-	34.199.716	65.475.709	2.088.574	5.663.474

3.2 Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi-Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
**Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset di neraca, eksposur kewajiban komitmen/
kontinjensi dalam transaksi rekening administratif (TRA), dan eksposur yang menimbulkan risiko kredit
akibat kegagalan pihak lawan (counterparty credit risk)**

No.	Sektor Ekonomi*	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Sektor publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan kepada Bank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Posisi 31 Desember 2017					
1	Pertanian, perburuan dan kehutanan	-	-	-	-
2	Perikanan	-	-	-	-
3	Pertambangan dan penggalian	-	-	-	-
4	Industri pengolahan	-	-	-	-
5	Listrik, gas dan air	-	-	-	-
6	Konstruksi	-	33.525	-	-
7	Perdagangan besar dan eceran	-	-	-	-
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	-	-	-
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	-	-	-	-
10	Perantara keuangan	-	14.264	-	1.251.061
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	-	-	-	-
12	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	162	569	-	-
13	Jasa pendidikan	-	-	-	-
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	-	-	-
15	Jasa masyarakat, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	-	-	-	-
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-	-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-
19	Bukan lapangan usaha	805	833	-	-
20	Lainnya	24.906.212	1.324.143	-	5.184.554
	Total	24.907.179	1.373.334	-	6.435.615

Posisi 31 Desember 2016					
1	Pertanian, perburuan dan kehutanan	-	-	-	-
2	Perikanan	-	-	-	-
3	Pertambangan dan penggalian	-	-	-	-
4	Industri pengolahan	-	-	-	-
5	Listrik, gas dan air	-	-	-	-
6	Konstruksi	-	17.038	-	-
7	Perdagangan besar dan eceran	-	-	-	-
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	-	-	-
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	-	-	-	-
10	Perantara keuangan	-	20.086	-	1.407.407
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	-	-	-	-
12	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	662	1.097	-	-
13	Jasa pendidikan	-	-	-	-
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	-	-	-
15	Jasa masyarakat, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	-	-	-	-
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-	-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-
19	Bukan lapangan usaha	14	433	-	-
20	Lainnya	24.977.494	1.094.610	-	5.576.925
	Total	24.978.170	1.133.264	-	6.984.332

Catatan:

Sektor ekonomi mengacu pada sektor ekonomi yang tercantum dalam Laporan Bulanan Bank Umum (LBU). Tagihan bersih yang tidak memiliki informasi sektor ekonomi di Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) saat ini disajikan sebagai "Perantara Keuangan" untuk tagihan kepada bank, sedangkan untuk selain tagihan kepada bank disajikan sebagai "Lainnya"

(dalam jutaan rupiah)

	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai/Pensiunan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Retail	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang telah jatuh tempo	Aset Lainnya
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
-	-	-	-	969.368	2.194.836	24.060	-
-	-	-	-	88.381	21.203	2.510	-
-	-	-	-	81.957	566.303	811	-
-	-	-	-	1.340.941	16.396.137	400.231	-
-	-	-	-	46.834	33.508	415	-
-	705.954	-	-	185.695	1.095.124	14.455	-
-	-	-	-	8.984.538	25.849.142	994.607	-
-	-	-	-	593.780	1.123.559	30.412	-
-	-	-	-	878.708	3.356.765	186.866	-
-	-	-	-	67.374	4.295.616	404	-
-	539.732	-	-	659.798	1.293.912	42.210	-
-	-	-	-	171	-	-	-
6	-	-	-	13.301	16.439	334	-
-	-	-	-	91.114	34.655	3.014	-
-	-	-	-	545.412	268.306	28.629	-
-	-	-	-	2.048	-	103	-
-	-	-	-	413	-	-	-
-	-	-	-	49	-	-	-
3.355.973	-	-	-	42.664.019	1.726.713	707.650	-
-	-	-	-	1.091.191	10.073.972	11.430	7.594.899
3.355.979	1.245.686	-	-	58.305.092	68.346.190	2.448.141	7.594.899
-	-	-	-	1.362.016	1.747.653	50.210	-
-	-	-	-	107.431	15.694	2.894	-
-	-	-	-	102.762	490.802	126.488	-
-	-	-	-	1.731.482	15.156.148	265.491	-
-	-	-	-	36.304	131.568	94	-
-	503.121	-	-	234.173	891.695	28.910	-
-	-	-	-	13.158.045	24.366.479	1.016.877	-
-	-	-	-	827.136	1.069.219	40.669	-
-	-	-	-	1.414.548	3.268.058	186.370	-
-	-	-	-	86.655	4.333.164	8.364	-
-	557.648	-	-	908.886	1.372.949	94.091	-
-	-	-	-	975	-	53	-
-	-	-	-	21.269	10.130	326	-
-	-	-	-	134.205	30.753	3.958	-
-	-	-	-	855.914	390.957	39.228	-
-	-	-	-	3.355	-	215	-
-	-	-	-	561	-	140	-
-	-	-	-	209.721	166.215	21.737	-
2.462.536	-	-	-	38.050.987	1.169.078	519.653	-
-	-	-	-	1.002.994	10.265.221	-	6.468.260
2.462.536	1.060.769	-	-	60.249.419	64.875.783	2.405.768	6.468.260

4.1. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah-Bank secara Individual

No	Keterangan	31 Desember 2017								
		Jakarta, Bogor, Tangerang, Kerawang, Bekasi, dan Lampung	Jawa Barat	Jawa Timur	Sulawesi, Maluku dan Papua	Kalimantan	Sumatra Utara	Jawa Tengah dan Yogyakarta	Bali, NTT, dan NTB	Sumatra Selatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Tagihan	103.862.196	6.108.684	9.770.097	7.723.114	5.860.066	10.827.748	6.370.604	2.477.759	3.410.294
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (<i>impaired</i>)									
	a. Belum jatuh tempo	1.755.533	88.945	230.986	115.421	157.855	129.172	96.436	43.690	124.168
	b. Telah jatuh tempo	893.046	92.007	126.820	215.440	103.514	167.804	104.435	21.514	121.790
3	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)-Individual	868.524	1.982	14.397	623	18.645	20.365	976	92	-
4	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)-Kolektif	741.923	139.940	224.770	226.382	143.566	243.460	173.407	47.862	101.565
5	Tagihan yang dihapus buku	1.229.251	237.173	352.145	354.111	212.525	270.973	239.147	35.715	257.605

4.2. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah-Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No	Keterangan	31 Desember 2017								
		Jakarta, Bogor, Tangerang, Kerawang, Bekasi, dan Lampung	Jawa Barat	Jawa Timur	Sulawesi, Maluku dan Papua	Kalimantan	Sumatra Utara	Jawa Tengah dan Yogyakarta	Bali, NTT, dan NTB	Sumatra Selatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Tagihan	105.570.880	9.092.757	14.051.054	11.593.308	7.838.242	15.708.077	9.212.262	2.477.759	3.410.294
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (<i>impaired</i>)									
	a. Belum jatuh tempo	1.768.383	98.077	232.029	119.015	179.504	147.631	104.551	43.690	124.169
	b. Telah jatuh tempo	1.013.684	192.392	214.236	292.910	177.388	283.737	157.842	21.514	121.791
3	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)-Individual	868.524	1.982	14.397	623	18.644	20.365	977	92	-
4	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)-Kolektif	1.081.054	294.734	445.009	383.386	241.270	469.285	326.565	47.862	101.565
5	Tagihan yang dihapus buku	1.229.251	237.173	352.145	354.111	212.525	270.973	239.147	35.714	257.606

(dalam jutaan rupiah)

31 Desember 2016											
Total	Jakarta, Bogor, Tangerang, Karawang, Bekasi dan Lampung	Jawa Barat	Jawa Timur	Sulawesi, Maluku dan Papua	Kalimantan	Sumatra Utara	Jawa Tengah dan Yogyakarta	Bali, NTT, dan NTB	Sumatra Selatan	Total	
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
156.410.562	99.447.384	6.350.480	9.893.364	7.941.619	5.806.442	10.040.868	6.901.422	2.271.327	4.150.136	152.803.042	
2.742.206	2.795.280	93.813	225.564	156.881	221.170	120.743	118.665	10.212	191.196	3.933.524	
1.846.370	785.209	125.986	239.726	290.155	160.043	168.451	205.999	34.795	221.870	2.232.234	
925.604	855.917	2.030	20.693	102	14.446	404	11.724	-	2.630	907.946	
2.042.875	814.426	172.051	287.832	292.095	174.379	265.089	215.834	40.308	198.114	2.460.128	
3.188.645	1.144.779	273.655	402.540	406.734	229.324	328.243	307.459	10.799	409.239	3.512.772	

(dalam jutaan rupiah)

31 Desember 2016											
Total	Jakarta, Bogor, Tangerang, Karawang, Bekasi dan Lampung	Jawa Barat	Jawa Timur, Bali, NTT dan NTB	Sulawesi, Maluku dan Papua	Kalimantan	Sumatra Utara	Jawa Tengah dan Yogyakarta	Bali, NTT, dan NTB	Sumatra Selatan	Total	
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
178.954.633	101.257.842	9.202.920	14.259.722	11.773.745	7.835.622	14.759.085	9.914.950	2.271.327	4.150.137	175.425.350	
2.817.049	2.817.354	131.430	227.132	169.811	282.382	142.401	134.409	10.212	191.196	4.106.327	
2.475.494	911.826	175.494	307.781	352.922	244.138	289.719	253.694	34.795	221.870	2.792.239	
925.604	855.917	2.030	20.693	102	14.446	404	11.724	-	2.630	907.946	
3.390.730	1.114.570	307.412	502.164	435.737	265.171	473.329	364.478	40.308	198.113	3.701.282	
3.188.645	1.144.779	273.655	402.540	406.734	229.324	328.243	307.459	10.799	409.239	3.512.772	

5.1. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi-Bank secara Individual**31 Desember 2017**

(dalam jutaan rupiah)

No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)- Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)- Kolektif	Tagihan yang Dihapus Buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	3.208.149	62.167	34.829	1.620	55.905	88.343
2	Perikanan	114.073	2.233	4.280	-	4.428	4.494
3	Pertambangan dan Penggalian	1.008.195	506.444	4.016	358.541	3.999	422.593
4	Industri pengolahan	18.275.035	82.520	392.422	110.276	216.745	244.896
5	Listrik, Gas dan Air	80.902	748	557	-	1.525	-
6	Konstruksi	2.036.425	13.789	4.578	771	24.363	11.511
7	Perdagangan besar dan eceran	36.272.846	778.573	612.575	200.539	787.756	1.136.051
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	1.773.214	86.352	41.804	1.317	43.207	68.352
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	4.667.287	919.916	181.177	232.374	58.559	89.837
10	Perantara keuangan	10.965.488	70.730	6.018	-	55.366	17.653
11	Real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan	2.558.428	127.844	36.820	19.969	49.231	44.519
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	902	-	-	-	22	-
13	Jasa pendidikan	30.245	938	489	-	528	695
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	132.055	3.805	6.007	-	4.643	8.028
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	868.723	28.025	50.710	-	38.439	64.828
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	2.286	52	237	-	182	51
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	582	412	165	-	169	212
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	37.343	-	-	-	941	26
19	Bukan Lapangan Usaha	21.495.416	57.658	391.942	-	651.953	981.362
20	Lainnya	52.882.968	-	77.744	197	44.914	5.194
	Total	156.410.562	2.742.206	1.846.370	925.604	2.042.875	3.188.645

31 Desember 2016

(dalam jutaan rupiah)

No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)- Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)- Kolektif	Tagihan yang Dihapus Buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	2.967.008	73.901	106.700	10.347	90.593	112.565
2	Perikanan	104.584	3.910	5.768	-	5.373	7.697
3	Pertambangan dan Penggalian	1.292.040	551.580	416.824	611.676	4.681	14.236
4	Industri pengolahan	16.980.664	633.482	118.049	37.051	215.928	359.779
5	Listrik, Gas dan Air	155.613	1.159	-	-	1.554	12
6	Konstruksi	1.586.968	33.547	5.214	122	20.742	10.480
7	Perdagangan besar dan eceran	37.009.200	879.676	838.335	69.852	983.946	1.381.875
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	1.929.338	115.462	64.255	2.532	61.339	98.421
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	4.521.912	1.036.918	127.625	112.052	71.743	84.384
10	Perantara keuangan	11.493.459	73.242	26.975	-	69.816	4.129
11	Real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan	2.824.804	409.573	55.374	64.317	68.329	99.524
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1.284	-	53	-	31	-
13	Jasa pendidikan	28.353	1.831	806	-	927	1.786
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	171.241	7.851	7.730	-	6.893	7.268
15	Jasa masyarakat, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	1.266.299	43.809	67.485	-	59.485	91.438
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	2.839	569	249	-	223	243
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	1.076	567	502	-	375	442
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	57.335	-	-	-	1.628	43
19	Bukan Lapangan Usaha	19.748.676	66.421	389.789	-	755.084	1.231.195
20	Lainnya	50.660.349	26	501	-	41.433	7.255
	Total	152.803.042	3.933.524	2.232.234	907.946	2.460.128	3.512.772

5.2. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi- Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

31 Desember 2017

(dalam jutaan rupiah)

No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)- Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)- Kolektif	Tagihan yang Dihapus Buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	3.480.397	65.790	42.288	1.620	63.949	88.343
2	Perikanan	141.066	2.486	4.711	-	5.250	4.494
3	Pertambangan dan Penggalian	1.062.076	507.774	5.611	358.541	5.583	422.593
4	Industri pengolahan	18.485.885	85.200	400.171	110.276	223.660	244.896
5	Listrik, Gas dan Air	101.513	748	844	-	2.126	-
6	Konstruksi	2.139.989	14.442	7.186	771	27.307	11.511
7	Perdagangan besar dan eceran	37.872.832	797.770	680.626	200.539	840.643	1.136.051
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	1.822.537	87.430	43.615	1.317	44.830	68.352
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	5.123.389	928.467	200.920	232.374	71.636	89.837
10	Perantara keuangan	11.328.919	70.730	6.298	-	55.599	17.653
11	Real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan	2.747.802	129.377	42.455	19.969	55.560	44.519
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	2.176	-	-	-	60	-
13	Jasa pendidikan	34.183	938	489	-	638	695
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	134.680	3.805	6.019	-	4.728	8.028
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	907.113	28.576	52.776	-	39.705	64.828
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	3.410	52	255	-	230	51
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	582	412	165	-	169	212
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	247.821	7.478	6.533	-	7.563	26
19	Bukan Lapangan Usaha	45.483.226	85.574	896.788	-	1.896.580	981.362
20	Lainnya	47.835.037	-	77.744	197	44.914	5.194
	Total	178.954.633	2.817.049	2.475.494	925.604	3.390.730	3.188.645

31 Desember 2016

(dalam jutaan rupiah)

No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)- Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)- Kolektif	Tagihan yang Dihapus Buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	3.226.282	81.731	115.699	10.347	98.096	112.565
2	Perikanan	129.439	4.060	6.231	-	6.157	7.697
3	Pertambangan dan Penggalian	1.332.810	553.454	417.616	611.676	5.798	14.236
4	Industri pengolahan	17.215.663	638.272	125.374	37.051	223.512	359.779
5	Listrik, Gas dan Air	167.975	1.159	97	-	1.905	12
6	Konstruksi	1.677.453	34.991	8.645	122	23.529	10.480
7	Perdagangan besar dan eceran	39.071.161	920.089	908.913	69.852	1.049.439	1.381.875
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	1.976.377	116.039	65.906	2.532	62.791	98.421
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	5.004.673	1.053.936	155.750	112.052	86.974	84.384
10	Perantara keuangan	11.890.726	73.242	26.998	-	70.100	4.129
11	Real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan	3.012.609	413.616	61.083	64.314	73.981	99.524
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	2.789	-	54	-	79	-
13	Jasa pendidikan	32.265	1.831	819	-	1.043	1.786
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	173.577	7.851	7.731	-	6.962	7.268
15	Jasa masyarakat, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	1.325.957	45.500	69.952	-	61.192	91.438
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	3.756	662	354	-	247	243
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	1.076	567	502	-	375	442
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	458.081	2.993	27.189	-	14.853	43
19	Bukan Lapangan Usaha	42.500.750	156.308	792.825	-	1.872.817	1.231.195
20	Lainnya	46.221.931	26	501	-	41.432	7.255
	Total	175.425.350	4.106.327	2.792.239	907.946	3.701.282	3.512.772

6.1 Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai-Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2017		31 Desember 2016	
		CKPN Individual	CKPN Kolektif	CKPN Individual	CKPN Kolektif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Saldo awal CKPN	907.946	2.460.128	785.704	2.583.308
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (net)	938.528	1.009.100	759.224	2.203.700
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan	(1.066.616)	(2.122.029)	(633.830)	(2.878.942)
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan	145.746	695.676	(3.152)	552.062
Saldo akhir CKPN		925.604	2.042.875	907.946	2.460.128

6.2. Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai-Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2017		31 Desember 2016	
		CKPN Individual	CKPN Kolektif	CKPN Individual	CKPN Kolektif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Saldo awal CKPN	907.946	3.701.282	785.704	3.699.100
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (net)	938.528	2.665.027	759.224	3.852.590
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan	(1.066.616)	(3.671.255)	(633.830)	(4.402.470)
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan	145.746	695.676	(3.152)	552.062
Saldo akhir CKPN		925.604	3.390.730	907.946	3.701.282

PENGUKURAN RISIKO KREDIT MENGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR

Dalam menghitung Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit, Danamon menggunakan pendekatan standar yang memenuhi ketentuan OJK yang berlaku, yaitu Surat Edaran OJK No. 42/SEOJK.03/2016 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

7.1 Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat-Bank Secara Individual

Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset di neraca, eksposur kewajiban komitmen/kontinjensi dalam transaksi rekening administratif (TRA), dan eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*)

31 Desember 2017

	Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka panjang			
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan Kepada Pemerintah		-	-	-	12.261.072
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		184.463	20.309	-	174.430
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank		1.197.123	61.683	-	330.842
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal					
6	Kredit Beragun Properti Komersial					
7	Kredit Pegawai/Pensiunan					
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel					
9	Tagihan kepada Korporasi		1.192.740	653.750	238.861	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo					
11	Aset Lainnya					
TOTAL			2.574.326	735.742	238.861	12.766.344

31 Desember 2016

	Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka panjang			
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan Kepada Pemerintah		-	-	-	14.662.634
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		40.815	119.146	-	75.843
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank		1.354.903	151.146	-	486.272
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal					
6	Kredit Beragun Properti Komersial					
7	Kredit Pegawai/Pensiunan					
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel					
9	Tagihan kepada Korporasi		775.716	428.290	447.766	60.845
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo					
11	Aset Lainnya					
TOTAL			2.171.434	698.582	447.766	15.285.594

(dalam jutaan rupiah)

Tagihan Bersih								Tanpa Peringkat	Total
			Peringkat Jangka Pendek						
BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3			
BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3			
Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari p-3			
BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)			
id BB+ s.d id BB-	id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
-	-	-	-	-	-	-	-	12.645.444	24.906.516
-	-	-	-	-	-	-	-	993.516	1.372.718
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	4.357.531	5.947.179
-	-	-	-	-	-	-	-	3.353.982	3.353.982
-	-	-	-	-	-	-	-	1.245.686	1.245.686
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	31.818.071	31.818.071
-	-	-	-	-	-	-	-	66.900.416	68.985.767
-	-	-	-	-	-	-	-	2.035.269	2.035.269
-	-	-	-	-	-	-	-	6.755.934	6.755.934
-	-	-	-	-	-	-	-	130.105.849	146.421.122

(dalam jutaan rupiah)

Tagihan Bersih								Tanpa Peringkat	Total
			Peringkat Jangka Pendek						
BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3			
BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3			
Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari p-3			
BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)			
id BB+ s.d id BB-	id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
-	-	-	-	-	-	-	-	10.315.207	24.977.841
-	-	-	-	-	-	-	-	896.460	1.132.264
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	4.427.833	6.420.154
-	-	-	-	-	-	-	-	2.462.536	2.462.536
-	-	-	-	-	-	-	-	1.060.769	1.060.769
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	34.199.716	34.199.716
-	-	-	-	-	-	-	-	63.763.092	65.475.709
-	-	-	-	-	-	-	-	2.088.574	2.088.574
-	-	-	-	-	-	-	-	5.663.474	5.663.474
-	-	-	-	-	-	-	-	124.877.661	143.481.037

7.2 Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat-Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset di neraca, eksposur kewajiban komitmen/kontinjensi dalam transaksi rekening administratif (TRA), dan eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*)
31 Desember 2017

	Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka panjang			
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA- (idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan Kepada Pemerintah		-	-	-	12.261.073
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		184.463	20.309	-	174.430
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank		1.197.123	61.683	-	330.842
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal					
6	Kredit Beragun Properti Komersial					
7	Kredit Pegawai/Pensiunan					
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel					
9	Tagihan kepada Korporasi		1.192.740	653.750	238.861	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo					
11	Aset Lainnya					
TOTAL			2.574.326	735.742	238.861	12.766.345

31 Desember 2016

	Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka panjang			
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA- (idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan Kepada Pemerintah		-	-	-	14.662.635
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		40.815	119.146	-	75.843
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank		1.354.903	151.146	-	486.272
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal					
6	Kredit Beragun Properti Komersial					
7	Kredit Pegawai/Pensiunan					
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel					
9	Tagihan kepada Korporasi		775.716	428.290	447.766	60.845
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo					
11	Aset Lainnya					
TOTAL			2.171.434	698.582	447.766	15.285.595

(dalam jutaan rupiah)

Tagihan Bersih										
			Peringkat Jangka Pendek						Tanpa Peringkat	Total
BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3				
BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3				
Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3				
BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)				
id BB+ s.d id BB-	id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4	(15)	(16)		
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
-	-	-	-	-	-	-	-	12.646.106	24.907.179	
-	-	-	-	-	-	-	-	994.132	1.373.334	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	4.845.967	6.435.615	
-	-	-	-	-	-	-	-	3.355.979	3.355.979	
-	-	-	-	-	-	-	-	1.245.686	1.245.686	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	58.305.092	58.305.092	
-	-	-	-	-	-	-	-	66.260.839	68.346.190	
-	-	-	-	-	-	-	-	2.448.141	2.448.141	
-	-	-	-	-	-	-	-	7.594.899	7.594.899	
-	-	-	-	-	-	-	-	157.696.841	174.012.115	

(dalam jutaan rupiah)

Tagihan Bersih										
			Peringkat Jangka Pendek						Tanpa Peringkat	Total
BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3				
BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3				
Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3				
BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)				
id BB+ s.d id BB-	id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4	(15)	(16)		
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
-	-	-	-	-	-	-	-	10.315.535	24.978.170	
-	-	-	-	-	-	-	-	897.460	1.133.264	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	4.992.011	6.984.332	
-	-	-	-	-	-	-	-	2.462.536	2.462.536	
-	-	-	-	-	-	-	-	1.060.769	1.060.769	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	60.249.419	60.249.419	
-	-	-	-	-	-	-	-	63.163.166	64.875.783	
-	-	-	-	-	-	-	-	2.405.768	2.405.768	
-	-	-	-	-	-	-	-	6.468.260	6.468.260	
-	-	-	-	-	-	-	-	152.014.924	170.618.301	

RISIKO KREDIT AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAWAN

Risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*Counterparty Credit Risk*) timbul dari jenis transaksi yang secara umum dipengaruhi oleh karakteristik sebagai berikut:

- Transaksi dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar.
- Nilai wajar dari transaksi dipengaruhi oleh pergerakan variabel pasar tertentu.
- Transaksi menghasilkan pertukaran arus kas atau instrumen keuangan.
- Bersifat bilateral.

Salah satu transaksi yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan adalah transaksi *derivative over the counter* (OTC) dan transaksi *repo/reverse repo*, baik posisi *Trading Book* maupun *Banking Book*.

Baik Transaksi *Repo* maupun *Reverse Repo*, Danamon mengacu kepada Surat Edaran OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang menurut risiko untuk risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar. Untuk transaksi *repo*, Danamon mencatat selisih positif antara nilai tercatat bersih surat berharga yang menjadi *underlying repo* dengan nilai tercatat kewajiban *repo*. Nilai tercatat bersih surat berharga adalah nilai tercatat surat berharga setelah dikurangi dengan CKPN atas surat berharga tersebut. Sedangkan untuk Transaksi *Reverse Repo*, Danamon mencatat nilai tagihan *reverse repo* setelah dikurangi dengan CKPN atas tagihan tersebut.

Tabel-tabel berikut menunjukkan pengungkapan risiko kredit pihak lawan.

8.1.a and 8.2.a Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Derivatif Over the Counter

(dalam jutaan rupiah)

No	Variabel yang Mendasari	31 Desember 2017							
		Nilai Notional			Tagihan Derivatif	Kewajiban Derivatif	Tagihan Bersih Sebelum MRK	MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK
		≤ 1 Tahun	> 1Tahun ≤ 5 Tahun	> 5 Tahun					
BANK SECARA INDIVIDUAL									
1	Suku Bunga	277.817	463.821	-	15	-	2.334	-	2.334
2	Nilai Tukar	12.738.027	463.821	-	18.210	15.732	168.781	-	168.781
3	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		13.015.844	927.642	-	18.225	15.732	171.115	-	171.115
BANK SECARA KONSOLIDASI									
1	Suku Bunga	3.477.486	2.295.434	-	15	-	11.492	-	11.492
2	Nilai Tukar	15.937.696	2.295.434	-	103.891	22.939	378.039	-	378.039
3	Saham	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Emas	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Logam selain Emas	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		19.415.182	4.590.868	-	103.906	22.939	389.531	-	389.531

(dalam jutaan rupiah)

No	Variabel yang Mendasari	31 Desember 2016							
		Nilai Notional			Tagihan Derivatif	Kewajiban Derivatif	Tagihan Bersih Sebelum MRK	MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK
		≤ 1 Tahun	> 1Tahun ≤ 5 Tahun	> 5 Tahun					
BANK SECARA INDIVIDUAL									
1	Suku Bunga	202.088	487.211	-	155	-	2.591	-	2.591
2	Nilai Tukar	6.508.748	459.816	-	39.369	49.468	127.448	-	127.448
3	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	6.710.836	947.027	-	39.524	49.468	130.039	-	130.039
BANK SECARA KONSOLIDASI									
1	Suku Bunga	1.279.888	3.484.842	-	155	-	17.579	-	17.579
2	Nilai Tukar	7.586.548	3.457.447	-	258.968	49.468	507.707	-	507.707
3	Saham	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Emas	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Logam selain Emas	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	8.866.436	6.942.289	-	259.123	49.468	525.286	-	525.286

8.1.b Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Repo-Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2017				31 Desember 2016			
		Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR	Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	10.434	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	10.434	-	-	-	-	-	-

8.2.b Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Repo-Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2017				31 Desember 2016			
		Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR	Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	10.434	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	10.434	-	-	-	-	-	-

8.1.c Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Reverse Repo-Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2017				31 Desember 2016			
		Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR setelah MRK	Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	298.699	-	298.699	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		298.699	-	298.699	-	-	-	-	-

8.2.c Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Reverse Repo-Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2017				31 Desember 2016			
		Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR setelah MRK	Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	298.699	-	298.699	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		298.699	-	298.699	-	-	-	-	-

PENGUNGKAPAN MITIGASI RISIKO KREDIT

Danamon telah menetapkan agunan sebagai salah satu teknik mitigasi risiko kredit. Akan tetapi Danamon tidak menjadikan agunan sebagai dasar tunggal baik dalam pengambilan keputusan kredit maupun sebagai sumber utama pengembalian pinjaman. Tujuan dari mitigasi risiko kredit adalah sebagai berikut:

- Membatasi risiko kerugian pada saat debitur tidak mampu memenuhi kewajiban kepada Bank.
- Melindungi risiko yang tidak terduga dan melekat pada suatu eksposur kredit di masa mendatang.

Agunan yang dapat diterima sesuai kebijakan agunan yang telah ditetapkan oleh Danamon adalah sebagai berikut:

- Agunan tunai dan setara *cash*
- Surat Berharga pemerintah dan Bank Indonesia
- Standby L/C* dari *prime bank*.
- Tanah dan bangunan
- Mesin-mesin
- Garansi Personal;
- Garansi Perusahaan.

Penilaian agunan harus dilakukan pada saat di awal kredit. Penilaian ulang dilakukan pada periode tertentu sesuai dengan ketentuan agunan sebagai pengurang PPA. Untuk agunan yang digunakan sebagai faktor pengurang pembentukan pencadangan, maka penilaian agunan untuk fasilitas kredit lebih dari Rp5 miliar harus dilakukan oleh penilai eksternal yang independen, memiliki kualifikasi yang baik, bersertifikat dan tidak memiliki hubungan dengan peminjam. Penilai eksternal harus ditunjuk oleh Danamon.

Penilaian agunan dapat juga dilakukan oleh penilai internal. Danamon memastikan penilai memiliki pengetahuan, pendidikan dan pengalaman pada bidang penilaian agunan serta tidak memiliki hubungan dengan peminjam. Hasil dari penilaian agunan harus didokumentasikan dalam arsip Kredit.

METODE MITIGASI RISIKO KREDIT UNTUK PENDEKATAN STANDAR

Untuk menghitung mitigasi risiko kredit sebagai pengurang ATMR (risiko Kredit), Danamon menggunakan Teknik MRK (Mitigasi Risiko Kredit)-

agunan. Jenis agunan yang diakui adalah jenis agunan keuangan yang sesuai dengan ketentuan Regulator; yaitu uang tunai, tabungan, giro, simpanan berjangka, setoran jaminan, emas dan surat berharga yang memiliki kriteria tertentu sebagaimana yang telah ditentukan oleh OJK/Bank Indonesia.

9.1 Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Resiko Setelah Memperhitungkan Dampak MRK-Bank secara Individual

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2017										ATMR
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit										
(1)	(2)	0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	(13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A Eksposur Neraca												
1	Tagihan Kepada Pemerintah	24.607.817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	204.772	-	-	-	1.166.509	-	-	-	-	624.209
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	11.450	3.330.175	-	-	-	2.457.142	-	-	-	-	1.894.606
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	3.353.680	-	-	-	-	-	-	-	1.173.788
6	Kredit Beragun Properti Komersial	122.063	-	-	-	-	-	-	1.123.623	-	-	1.123.623
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	80.336	-	-	-	-	-	30.804.277	-	-	-	23.103.208
9	Tagihan kepada Korporasi	1.592.893	1.846.491	-	-	-	238.861	-	62.490.064	-	-	62.978.792
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	13.000	-	-	-	-	-	-	77.941	1.944.328	-	2.994.434
11	Aset Lainnya	2.325.799	-	-	-	-	-	-	3.915.896	514.239	-	4.687.252
Total Eksposur Neraca		28.753.358	5.381.438	3.353.680	-	-	3.862.512	30.804.277	67.607.524	2.458.567	-	98.579.912
B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif												
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	1.437	-	-	-	-	719
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	6.784	-	-	-	2.500	-	-	-	-	2.607
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	302	-	-	-	-	-	-	-	106
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	21.961	-	-	-	-	-	884.787	-	-	-	663.590
9	Tagihan kepada Korporasi	106.929	-	-	-	-	-	-	2.705.252	-	-	2.705.252
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Eksposur TRA		128.890	6.784	302	-	-	3.937	884.787	2.705.252	-	-	3.372.274
C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)												
1	Tagihan Kepada Pemerintah	298.699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	104.770	-	-	-	34.359	-	-	-	-	38.133
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	26.709	-	-	-	20.032
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	5.277	-	-	5.277
Total Eksposur Counterparty Credit Risk		298.699	104.770	-	-	-	34.359	26.709	5.277	-	-	63.442

Untuk transaksi *reverse repo*, agunan berupa surat berharga yang menjadi *underlying* dari transaksi *reverse repo* dan/atau uang tunai diperhitungkan sebagai bentuk mitigasi risiko kredit atas transaksi *reverse repo*.

Berikut data-data pengungkapan risiko kredit setelah memperhitungkan dampak mitigasi risiko kredit.

(dalam jutaan rupiah)

	Beban Modal (9% x ATMR)	31 Desember 2016										ATMR	Beban Modal (9% x ATMR)
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit											
		0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	
-	24.957.966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.179	43	159.960	-	-	-	941.949	-	-	-	-	502.967	45.267	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
170.515	1.922	3.347.214	-	-	-	2.996.486	-	-	-	-	2.167.686	195.092	
105.641	-	-	2.461.677	-	-	-	-	-	-	-	861.587	77.543	
101.126	89.691	-	-	-	-	-	-	971.078	-	-	971.078	87.397	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.079.289	90.208	-	-	-	-	-	33.230.101	-	-	-	24.922.575	2.243.032	
5.668.091	1.758.967	1.204.007	-	-	-	447.766	-	59.231.421	-	-	59.696.105	5.372.649	
269.499	-	-	-	-	-	-	-	58.825	2.029.749	-	3.103.448	279.310	
421.853	2.072.614	-	-	-	-	-	-	3.452.871	137.989	-	3.659.855	329.387	
8.872.193	28.971.411	4.711.181	2.461.677	-	-	4.386.201	33.230.101	63.714.195	2.167.738	-	95.885.301	8.629.677	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65	-	-	-	-	-	30.312	-	-	-	-	15.156	1.364	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
235	-	2.627	-	-	-	2.500	-	-	-	-	1.775	160	
10	-	-	859	-	-	-	-	-	-	-	301	27	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
59.723	26.803	-	-	-	-	-	843.426	-	-	-	632.569	56.931	
243.473	134.822	-	-	-	-	-	-	2.667.145	-	-	2.667.146	240.043	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
303.506	161.625	2.627	859	-	-	32.812	843.426	2.667.145	-	-	3.316.947	298.525	
-	19.875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.432	-	37.455	-	-	-	31.950	-	-	-	-	23.466	2.112	
1.803	-	-	-	-	-	-	9.178	-	-	-	6.883	619	
475	-	-	-	-	-	-	-	31.581	-	-	31.581	2.842	
5.710	19.875	37.455	-	-	-	31.950	9.178	31.581	-	-	61.930	5.573	

9.2 Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Resiko Setelah Memperhitungkan Dampak MRK-Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2017										ATMR
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit										
		0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A Eksposur Neraca												
1	Tagihan Kepada Pemerintah	24.608.480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	204.771	-	-	-	1.167.126	-	-	-	-	624.517
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	11.450	3.600.194	-	-	-	2.457.142	-	-	-	-	1.948.610
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	3.355.677	-	-	-	-	-	-	-	1.174.487
6	Kredit Beragun Properti Komersial	122.063	-	-	-	-	-	-	1.123.623	-	-	1.123.623
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	80.336	-	-	-	-	-	57.291.298	-	-	-	42.968.473
9	Tagihan kepada Korporasi	1.592.894	1.838.161	-	-	-	238.861	-	61.858.816	-	-	62.345.878
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	13.000	-	-	-	-	-	-	77.941	2.357.200	-	3.613.742
11	Aset Lainnya	2.546.272	-	-	-	-	-	-	4.534.388	514.239	-	5.305.747
Total Eksposur Neraca		28.974.495	5.643.126	3.355.677	-	-	3.863.129	57.291.298	67.594.768	2.871.439	-	119.105.077
B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif												
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	1.437	-	-	-	-	719
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	6.784	-	-	-	2.500	-	-	-	-	2.607
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	302	-	-	-	-	-	-	-	106
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	21.961	-	-	-	-	-	884.787	-	-	-	663.590
9	Tagihan kepada Korporasi	106.929	-	-	-	-	-	-	2.705.252	-	-	2.705.252
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Eksposur TRA		128.890	6.784	302	-	-	3.937	884.787	2.705.252	-	-	3.372.274
C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)												
1	Tagihan Kepada Pemerintah	298.699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	104.770	-	-	-	252.775	-	-	-	-	147.341
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	26.709	-	-	-	20.032
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	5.277	-	-	5.277
Total Eksposur Counterparty Credit Risk		298.699	104.770	-	-	-	252.775	26.709	5.277	-	-	172.650

(dalam jutaan rupiah)

	Beban Modal (9% x ATMR)	31 Desember 2016*)										ATMR	Beban Modal (9% x ATMR)
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit											
		0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	
	-	24.958.295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	56.207	43	159.960	-	-	-	942.949	-	-	-	-	503.467	45.312
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	175.375	1.922	3.516.145	-	-	-	2.996.486	-	-	-	-	2.201.472	198.133
	105.704	-	-	2.461.677	-	-	-	-	-	-	-	861.587	77.543
	101.126	89.691	-	-	-	-	-	-	971.078	-	-	971.078	87.397
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.867.163	90.208	-	-	-	-	-	59.279.804	-	-	-	44.459.853	4.001.387
	5.611.129	1.758.967	1.133.323	-	-	-	447.766	-	58.702.180	-	-	59.152.727	5.323.745
	325.237	-	-	-	-	-	-	-	58.825	2.346.943	-	3.579.240	322.132
	477.517	2.264.928	-	-	-	-	-	-	4.065.343	137.989	-	4.272.326	384.509
	10.719.458	29.164.054	4.809.427	2.461.677	-	-	4.387.201	59.279.804	63.797.426	2.484.932	-	116.001.750	10.440.158
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	65	-	-	-	-	-	30.312	-	-	-	-	15.156	1.364
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	235	-	2.627	-	-	-	2.500	-	-	-	-	1.775	160
	10	-	-	859	-	-	-	-	-	-	-	301	27
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	59.723	26.803	-	-	-	-	-	843.426	-	-	-	632.569	56.931
	243.473	134.822	-	-	-	-	-	-	2.667.145	-	-	2.667.146	240.043
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	303.506	161.625	2.627	859	-	-	32.812	843.426	2.667.145	-	-	3.316.947	298.525
	-	19.875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13.261	-	37.455	-	-	-	427.197	-	-	-	-	221.090	19.898
	1.803	-	-	-	-	-	-	9.178	-	-	-	6.883	619
	475	-	-	-	-	-	-	-	31.581	-	-	31.581	2.842
	15.539	19.875	37.455	-	-	-	427.197	9.178	31.581	-	-	259.554	23.359

Tabel 10.1 Pengungkapan Tagihan Bersih dan teknik Mitigasi Risiko Kredit-Bank secara Individual

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2017					
		Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				Bagian Yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3) - [(4)+(5)+(6)+(7)]
A Eksposur Neraca							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	24.607.817	-	-	-	-	24.607.817
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	1.371.281	-	-	-	-	1.371.281
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	5.798.767	11.450	-	-	-	5.787.317
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	3.353.680	-	-	-	-	3.353.680
6	Kredit Beragun Properti Komersial	1.245.686	122.063	-	-	-	1.123.623
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	30.884.613	80.336	-	-	-	30.804.277
9	Tagihan kepada Korporasi	66.168.309	1.592.893	-	-	-	64.575.416
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	2.035.269	13.000	-	-	-	2.022.269
11	Aset Lainnya	6.755.934	-	-	-	-	6.755.934
Total Eksposur Neraca		142.221.356	1.819.742	-	-	-	140.401.614
B Eksposur Rekening Adminstratif							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	1.437	-	-	-	-	1.437
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	9.284	-	-	-	-	9.284
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	302	-	-	-	-	302
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	906.748	21.961	-	-	-	884.787
9	Tagihan kepada Korporasi	2.812.181	106.929	-	-	-	2.705.252
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
Total Eksposur Rekening Administratif		3.729.952	128.890	-	-	-	3.601.062
C Eksposur Counterparty Credit Risk							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	298.699	-	-	-	-	298.699
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	139.129	-	-	-	-	139.129
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	26.709	-	-	-	-	26.709
6	Tagihan kepada Korporasi	5.277	-	-	-	-	5.277
Total Eksposur Counterparty Credit Risk		469.814	-	-	-	-	469.814
Total (A+B+C)		146.421.122	1.948.632	-	-	-	144.472.490

(dalam jutaan rupiah)

	31 Desember 2016					
	Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan			Lainnya	Bagian Yang Tidak Dijamin
		Agunan	Garansi	Asuransi Kredit		
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (9) - [(10)+(11)+(12)+(13)]	
	24.957.966	-	-	-	-	24.957.966
	1.101.952	43	-	-	-	1.101.909
	-	-	-	-	-	-
	6.345.622	1.922	-	-	-	6.343.700
	2.461.677	-	-	-	-	2.461.677
	1.060.769	89.691	-	-	-	971.078
	-	-	-	-	-	-
	33.320.309	90.208	-	-	-	33.230.101
	62.642.161	1.758.967	-	-	-	60.883.194
	2.088.574	-	-	-	-	2.088.574
	5.663.474	-	-	-	-	5.663.474
	139.642.504	1.940.831	-	-	-	137.701.673
	-	-	-	-	-	-
	30.312	-	-	-	-	30.312
	-	-	-	-	-	-
	5.127	-	-	-	-	5.127
	859	-	-	-	-	859
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	870.229	26.803	-	-	-	843.426
	2.801.967	134.822	-	-	-	2.667.145
	-	-	-	-	-	-
	3.708.494	161.625	-	-	-	3.546.869
	19.875	-	-	-	-	19.875
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	69.405	-	-	-	-	69.405
	9.178	-	-	-	-	9.178
	31.581	-	-	-	-	31.581
	130.039	-	-	-	-	130.039
	143.481.037	2.102.456	-	-	-	141.378.581

10.2 Pengungkapan Tagihan Bersih dan teknik Mitigasi Risiko Kredit-Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2017					
		Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				Bagian Yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3) - [(4)+(5)+(6)+(7)]
A Eksposur Neraca							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	24.608.480	-	-	-	-	24.608.480
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	1.371.897	-	-	-	-	1.371.897
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	6.068.786	11.450	-	-	-	6.057.336
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	3.355.677	-	-	-	-	3.355.677
6	Kredit Beragun Properti Komersial	1.245.686	122.063	-	-	-	1.123.623
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	57.371.635	80.336	-	-	-	57.291.299
9	Tagihan kepada Korporasi	65.528.732	1.592.893	-	-	-	63.935.839
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	2.448.141	13.000	-	-	-	2.435.141
11	Aset Lainnya	7.594.899	-	-	-	-	7.594.899
Total Eksposur Neraca		169.593.933	1.819.742	-	-	-	167.774.191
B Eksposur Rekening Adminsitratif							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	1.437	-	-	-	-	1.437
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	9.284	-	-	-	-	9.284
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	302	-	-	-	-	302
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	906.748	21.961	-	-	-	884.787
9	Tagihan kepada Korporasi	2.812.181	106.929	-	-	-	2.705.252
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
Total Eksposur Rekening Administratif		3.729.952	128.890	-	-	-	3.601.062
C Eksposur Counterparty Credit Risk							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	298.699	-	-	-	-	298.699
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	357.545	-	-	-	-	357.545
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	26.709	-	-	-	-	26.709
6	Tagihan kepada Korporasi	5.277	-	-	-	-	5.277
Total Eksposur Counterparty Credit Risk		688.230	-	-	-	-	688.230
Total (A+B+C)		174.012.115	1.948.632	-	-	-	172.063.483

(dalam jutaan rupiah)

	31 Desember 2016					
	Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan			Lainnya	Bagian Yang Tidak Dijamin
		Agunan	Garansi	Asuransi Kredit		
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (9) - [(10)+(11)+(12)+(13)]	
	24.958.295	-	-	-	-	24.958.295
	1.102.952	43	-	-	-	1.102.909
	-	-	-	-	-	-
	6.514.553	1.922	-	-	-	6.512.631
	2.461.677	-	-	-	-	2.461.677
	1.060.769	89.691	-	-	-	971.078
	-	-	-	-	-	-
	59.370.012	90.208	-	-	-	59.279.804
	62.042.235	1.758.967	-	-	-	60.283.268
	2.405.768	-	-	-	-	2.405.768
	6.468.260	-	-	-	-	6.468.260
	166.384.521	1.940.831	-	-	-	164.443.690
	-	-	-	-	-	-
	30.312	-	-	-	-	30.312
	-	-	-	-	-	-
	5.127	-	-	-	-	5.127
	859	-	-	-	-	859
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	870.229	26.803	-	-	-	843.426
	2.801.967	134.822	-	-	-	2.667.145
	-	-	-	-	-	-
	3.708.494	161.625	-	-	-	3.546.869
	-	-	-	-	-	-
	19.875	-	-	-	-	19.875
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	464.652	-	-	-	-	464.652
	9.178	-	-	-	-	9.178
	31.581	-	-	-	-	31.581
	525.286	-	-	-	-	525.286
	170.618.301	2.102.456	-	-	-	168.515.845

PENGUNGKAPAN SEKURITISASI ASET

Sekuritisasi adalah proses pengambilan aset tidak likuid atau kelompok aset dan melalui *financial engineering*, mentransformasikannya menjadi efek. Efek yang diterbitkan atas dasar pengalihan

aset keuangan dari kreditur asal yang diikuti oleh pembayaran dari hasil penjualan efek beragun aset kepada investor. Pada 31 Desember 2017, Danamon tidak memiliki posisi aset KIK EBA.

11.1. Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar-Bank secara Individual

a. Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2017			31 Desember 2016		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	24.607.817	-	-	24.957.966	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	1.371.281	624.209	624.209	1.101.952	502.988	502.967
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	5.798.767	1.900.331	1.894.606	6.345.622	2.168.647	2.167.686
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	3.353.680	1.173.788	1.173.788	2.461.677	861.587	861.587
6	Kredit Beragun Properti Komersial	1.245.686	1.245.686	1.123.623	1.060.769	1.060.769	971.078
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	30.884.613	23.163.460	23.103.208	33.320.309	24.990.231	24.922.575
9	Tagihan kepada Korporasi	66.168.309	64.571.686	62.978.792	62.642.161	61.455.073	59.696.105
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	2.035.269	3.013.933	2.994.434	2.088.574	3.103.448	3.103.448
11	Aset Lainnya	6.755.934	-	4.687.252	5.663.474	-	3.659.855
TOTAL		142.221.356	95.693.093	98.579.912	139.642.504	94.142.743	95.885.301

b. Pengungkapan Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2017			31 Desember 2016		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	1.437	719	719	30.312	15.156	15.156
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	9.284	2.607	2.607	5.127	1.775	1.775
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	302	106	106	859	301	301
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	906.748	680.061	663.590	870.229	652.671	632.569
9	Tagihan kepada Korporasi	2.812.181	2.812.181	2.705.252	2.801.967	2.801.967	2.667.146
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
TOTAL		3.729.952	3.495.674	3.372.274	3.708.494	3.471.870	3.316.947

c. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2017			31 Desember 2016		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	298.699	-	-	19.875	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	139.129	38.133	38.133	69.405	23.466	23.466
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	26.709	20.032	20.032	9.178	6.883	6.883
6	Tagihan kepada Korporasi	5.277	5.277	5.277	31.581	31.581	31.581
7	Eksposur tertimbang dari <i>Credit Valuation Adjustment (CVA)</i>			5.663			-
TOTAL		469.814	63.442	69.105	130.039	61.930	61.930

d. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (Settlement Risk)

Tidak ada eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan setelmen pada tahun 2017 dan 2016.

e. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi

Tidak ada Eksposur Sekuritisasi pada tahun 2017 dan 2016.

f. Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit

(dalam jutaan rupiah)

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	102.021.291	99.264.178
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	-	-

11.2. Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar-Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak**a. Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca**

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2017			31 Desember 2016		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	24.608.480	-	-	24.958.295	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	1.371.897	624.517	624.517	1.102.952	503.488	503.467
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	6.068.786	1.954.335	1.948.610	6.514.553	2.202.433	2.201.472
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	3.355.677	1.174.487	1.174.487	2.461.677	861.587	861.587
6	Kredit Beragun Properti Komersial	1.245.686	1.245.686	1.123.623	1.060.769	1.060.769	971.078
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	57.371.634	43.028.726	42.968.473	59.370.012	44.527.509	44.459.853
9	Tagihan kepada Korporasi	65.528.732	63.938.773	62.345.878	62.042.235	60.911.694	59.152.727
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	2.448.141	3.633.241	3.613.742	2.405.768	3.579.240	3.579.240
11	Aset Lainnya	7.594.899	-	5.305.747	6.468.260	-	4.272.326
TOTAL		169.593.932	115.599.765	119.105.077	166.384.521	113.646.720	116.001.750

b. Pengungkapan Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2017			31 Desember 2016		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	1.437	719	719	30.312	15.156	15.156
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	9.284	2.607	2.607	5.127	1.775	1.775
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	302	106	106	859	301	301
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	906.748	680.061	663.590	870.229	652.671	632.569
9	Tagihan kepada Korporasi	2.812.181	2.812.181	2.705.252	2.801.967	2.801.967	2.667.146
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
TOTAL		3.729.952	3.495.674	3.372.274	3.708.494	3.471.870	3.316.947

c. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2017			31 Desember 2016		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	298.699	-	-	19.875	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	357.545	147.341	147.341	464.652	221.090	221.090
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	26.709	20.032	20.032	9.178	6.883	6.883
6	Tagihan kepada Korporasi	5.277	5.277	5.277	31.581	31.581	31.581
7	Eksposur tertimbang dari <i>Credit Valuation Adjustment (CVA)</i>			5.663			-
TOTAL		688.230	172.650	178.313	525.286	259.554	259.554

d. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (Settlement Risk)

Tidak ada eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan setelmen pada tahun 2017 dan 2016.

e. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi

Tidak ada Eksposur Sekuritisasi pada tahun 2017 dan 2016.

f. Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit

(dalam jutaan rupiah)

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	122.655.664	119.578.251
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	-	-

B. RISIKO PASAR

Manajemen Risiko Pasar tidak hanya terbatas pada pengelolaan risiko, namun juga pengawasan atas semua risiko yang dihadapi Bank akibat dari pergerakan faktor pasar (suku bunga dan nilai tukar). Risiko pasar timbul dari dua area yang berbeda dan dikelola secara terpisah. Area pertama, aktivitas *trading* di *treasury* (risiko *Trading Book*) dan area kedua adalah aktivitas pada *balance sheet* Bank (khususnya risiko suku bunga pada *Banking Book*). Penerapan Manajemen Risiko Pasar mencakup pengelolaan kedua risiko tersebut.

- 1) Organisasi Manajemen Risiko Pasar
Pengelolaan risiko pasar merupakan proses *top-down* dalam struktur organisasi Danamon dimulai dari Komite Pemantau Risiko, Direksi melalui *Assets & Liabilities Committee* (ALCO) dan *Senior Management* yang secara aktif terlibat dalam perencanaan, persetujuan, peninjauan kembali dan pengkajian seluruh risiko yang terkait.
- 2) Penerapan Manajemen Risiko Pasar
Penerapan Manajemen Risiko Pasar dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pasar, dengan didukung penerapan sistem informasi manajemen. Risiko pasar dimonitor oleh divisi *Market and Liquidity Risk* (sebagai *second line*

of defense) yang merupakan fungsi independen dalam Danamon yang mengembangkan, menerapkan dan memelihara kerangka manajemen risiko pasar secara menyeluruh dan terintegrasi. Hal ini mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pelaporan risiko pasar.

- a) Risiko Perdagangan (*Trading Risk*)
Trading Risk terutama dikelola melalui struktur limit dan dipantau setiap hari oleh divisi *Market and Liquidity Risk* (MLR).
- b) Risiko Suku Bunga pada *Banking Book*.
Risiko suku bunga adalah eksposur yang timbul atas pergerakan suku bunga pasar yang merugikan (*adverse movement*) terhadap neraca Bank. Risiko tersebut merupakan bagian yang melekat dari bisnis perbankan. Pengelolaan risiko dengan baik, dapat menjadikan eksposur tersebut sumber tambahan pendapatan yang akan meningkatkan nilai pemegang saham. Namun, eksposur risiko suku bunga berlebihan dapat menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap pendapatan dan modal bank. Pemantauan dari risiko suku bunga pada *banking book* dilakukan secara harian oleh divisi MLR.

3) Faktor-faktor Risiko

Faktor risiko didefinisikan sebagai variabel yang menyebabkan perubahan nilai dari instrumen keuangan atau sebuah portofolio dari instrumen keuangan baik di *on* atau *off-balance sheet*. Faktor risiko pasar utama yang termasuk di dalam sistem pengukuran risiko adalah nilai tukar, suku bunga, ekuitas dan komoditas.

Faktor-faktor risiko tersebut dapat timbul secara terpisah ataupun merupakan kombinasi dari beberapa faktor risiko apabila suatu produk ataupun aktivitas Bank memungkinkan memiliki beberapa faktor risiko untuk dikelola. Pengelolaan risiko pasar pada perbankan di Indonesia hanya terbatas pada faktor risiko suku bunga dan nilai tukar.

4) Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko

Secara umum, pengukuran risiko pasar telah mencakup risiko nilai tukar dan suku bunga, yang tercatat dalam *trading book* dan *banking book* Danamon. Pengukuran risiko pasar meliputi proses valuasi instrumen keuangan, perhitungan *market risk capital charge*, *stress testing* dan *sensitivity analysis*. Metode pengukuran yang dipakai mengacu kepada *regulatory requirement* dan standar umum manajemen risiko pasar dalam perbankan.

Danamon mengelola risiko suku bunga dengan menggunakan analisa sensitivitas berdasarkan format *repricing gap* dan metode *Earning-at-Risk* (EAR). EAR mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap pendapatan bunga bersih Bank pada kurun waktu 1 tahun kedepan.

Untuk melengkapi pengelolaan risiko tingkat suku bunga, Danamon juga menggunakan metode *Economic Value of Equity* (EVE). EVE mengukur risiko suku bunga pada periode yang lebih panjang serta memberikan estimasi dampak perubahan suku bunga terhadap modal Bank.

Pengukuran EAR dan EVE dilakukan secara periodik (harian) terhadap setiap instrumen *banking book* dan *trading book* sesuai asumsi *repricing* baik untuk produk dengan *contractual maturity* maupun non maturing. Pengukuran EAR dan EVE dilakukan terhadap kenaikan atau penurunan yang simetris pada kurva imbal hasil baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi stres. Asumsi yang digunakan dikaji ulang secara periodik berdasarkan kesesuaiannya terhadap metodologi yang secara umum dipakai.

Proses pemantauan (*monitoring*) dan pengendalian (*controlling*) dilakukan melalui penerapan Limit Risiko Pasar, baik limit atas parameter *trading book* maupun *banking book*, termasuk di dalamnya pemantauan terhadap utilisasi limit *Treasury*. MLR secara independen melakukan pemantauan atas limit terkait Risiko Pasar secara harian dengan mempertimbangkan *risk appetite* manajemen dan arah strategi bisnis Danamon.

Per 31 Desember 2017, utilisasi limit EAR (*Earning at Risk*) secara individu maupun konsolidasi masih berada dalam batasan *internal threshold*. EAR Rupiah (IDR) maupun Valuta Asing (FCY) secara individu dan konsolidasi menunjukkan utilisasi limit sekitar 42-52%.

Dari sisi utilisasi limit EVE (*Economic Value of Equity*) pada Danamon secara individu dan konsolidasi juga berada dalam batasan *internal threshold*. EVE IDR dan FCY, baik individu maupun konsolidasi menunjukkan utilisasi limit sekitar 30-36%.

Secara umum, berdasarkan komposisi aset dan kewajiban (kombinasi tenor serta *fixed/floating rate*) yang dimiliki saat ini, risiko suku bunga yang mempengaruhi *Capital* baik Danamon secara individu maupun konsolidasi masih dalam batasan internal sesuai dengan *Risk Appetite*.

5) Kecukupan Modal Minimum

Danamon berkomitmen untuk memenuhi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPPM) yang ditentukan oleh regulator. Oleh karena itu, setiap bulan Danamon menghitung ATMR risiko pasar dengan menggunakan pendekatan standar. Di dalam perhitungan, Danamon memperhitungkan dua eksposur, yakni eksposur risiko suku bunga dan eksposur risiko nilai tukar (*foreign exchange - FX*). Eksposur risiko suku bunga, terdiri dari risiko spesifik dan risiko umum, mencakup *debt*, *debt related instruments*, dan *interest rate derivatives* pada *trading book*. Sedangkan eksposur risiko nilai tukar mencakup eksposur risiko yang ada pada *trading book* dan *banking book*.

1. Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar

(dalam jutaan rupiah)

No.	Jenis Risiko	31 Desember 2017				31 Desember 2016			
		Bank		Konsolidasi		Bank		Konsolidasi	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Risiko Suku Bunga		302.863		302.863		146.963		146.963
	a. Risiko Spesifik	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Risiko Umum	24.229	302.863	24.229	302.863	11.757	146.963	11.757	146.963
2	Risiko Nilai Tukar	18.949	236.868	18.994	237.425	13.707	171.334	13.751	171.888
3	Risiko Ekuitas			-	-			-	-
4	Risiko Komoditas			-	-			-	-
5	Risiko <i>Option</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	43.178	539.731	43.223	540.288	25.464	318.297	25.508	318.850

C. RISIKO LIKUIDITAS

Bank menghadapi risiko likuiditas dari berbagai aspek bisnis. Risiko likuiditas dapat timbul dari ketidaksesuaian arus kas antara Aset dan Kewajiban Bank. Pengelolaan risiko likuiditas yang baik adalah salah satu faktor utama keberhasilan Danamon dalam menjalankan bisnisnya.

Secara garis besar, pengelolaan Risiko Likuiditas Danamon memperhatikan hal-hal berikut:

- Karakteristik dan sumber risiko likuiditas yang beragam.
- Strategi pendanaan yang sesuai (termasuk variasi sumber pendanaan).
- Penyempurnaan infrastruktur agar sejalan dengan Basel III dan Peraturan OJK terkait *Liquidity Risk*.

Risiko Likuiditas merupakan salah satu hal yang utama dalam manajemen risiko Bank sehingga penerapan Manajemen Risiko Likuiditas harus dilakukan secara berkelanjutan.

1) Organisasi Manajemen Risiko Likuiditas

Pengelolaan risiko likuiditas merupakan proses *top-down* dimulai dari Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko dan Direksi/Manajemen Senior melalui ALCO yang secara aktif terlibat di dalam perencanaan, persetujuan, peninjauan dan pengkajian dari seluruh risiko yang ada.

Dalam rangka mengevaluasi pemenuhan likuiditas, ALCO memiliki jangkauan otoritas yang luas yang didelegasikan oleh Direksi untuk mengelola struktur aset dan kewajiban serta strategi pendanaan Danamon. ALCO fokus pada pengelolaan likuiditas dengan tujuan untuk:

- Memahami sumber risiko likuiditas dan mengikutsertakan karakteristik dan risiko dari berbagai macam sumber likuiditas terutama pada saat kondisi stres.
- Mengembangkan pendekatan risiko yang komprehensif untuk memastikan kesesuaian terhadap *risk appetite* secara keseluruhan.
- Menentukan strategi pendanaan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas (termasuk di dalamnya penggabungan beberapa sumber pendanaan).
- Mengembangkan rencana kontinjensi yang efektif.
- Meningkatkan ketahanan terhadap penurunan yang tajam pada risiko likuiditas dan menunjukkan kemampuan Danamon dalam mengatasi kondisi dimana tidak tersedianya satu atau lebih pasar pendanaan dengan memastikan pendanaan dapat digalang melalui berbagai macam sumber pendanaan.

ALCO sebagai komite manajemen senior Danamon berperan sebagai badan tertinggi yang ditugaskan untuk mengawasi dan mengevaluasi struktur dan tren dari neraca dari sisi likuiditas, risiko suku bunga dan manajemen permodalan. Termasuk di dalamnya adalah penetapan kebijakan dan prosedur, penentuan kerangka limit dan evaluasi strategi pada neraca yang bertujuan untuk menyediakan likuiditas dan modal yang cukup bagi Danamon serta struktur pendanaan yang terdiversifikasi.

2) Indikator Risiko Likuiditas

Berbagai macam indikator internal maupun indikator pasar yang dapat memberikan peringatan kepada Danamon atas ancaman krisis likuiditas adalah:

Indikator Internal	Indikator Pasar
<ol style="list-style-type: none"> Konsentrasi berlebihan pada aset tertentu dan sumber pendanaan. Kenaikan pada biaya pendanaan secara keseluruhan. Peningkatan aset secara cepat melalui pendanaan yang tidak stabil. Penurunan posisi arus kas yang ditunjukkan oleh melebarinya posisi negatif pada ketidaksesuaian jatuh tempo terutama pada jangka pendek. 	<ol style="list-style-type: none"> Penurunan <i>rating</i> Krisis keuangan eksternal. Kondisi likuiditas yang ketat berkepanjangan.

3) Pengukuran Risiko Likuiditas

Secara umum, pengukuran risiko likuiditas dapat dikelompokkan menjadi pengukuran yang bersifat regulasi (*regulatory*) dan yang bersifat internal (*non-regulatory*).

Saat ini Danamon telah melakukan pengukuran risiko likuiditas yang bersifat regulasi, antara lain:

a) Loan to Funding Ratio (LFR)

Loan to Funding Ratio atau LFR adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap:

- Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank; dan
- Surat berharga dalam Rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterbitkan oleh Bank untuk memperoleh sumber pendanaan.

b) GWM Primer

GWM Primer adalah simpanan minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK secara periodik.

c) GWM Sekunder

GWM Sekunder adalah cadangan minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank berupa antara lain: Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) dan Surat Berharga Negara (SBN), yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.

d) Liquidity Coverage Ratio (LCR)

Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank mempertahankan tingkat kecukupan aset yang *unencumbered* dan berkualitas tinggi yang dapat dikonversi menjadi uang tunai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dalam rentang waktu 30 hari kalender di bawah skenario stres likuiditas dengan parameter yang telah ditentukan oleh pengawas. Secara minimum, stok aset likuid bank dapat memungkinkan bank untuk tetap mempertahankan kegiatan operasionalnya sampai 30 hari selama skenario stress, yang selama dalam waktu tersebut diasumsikan tindakan pemulihan yang tepat dapat diambil oleh manajemen dan/atau regulator.

Untuk pengukuran risiko likuiditas yang bersifat regulasi, Bank secara internal menerapkan ambang batas (*threshold*) tambahan dari tingkat yang telah ditetapkan oleh regulasi, dengan ambang batas yang bersifat lebih konservatif dari yang diterapkan oleh regulasi.

Pengungkapan Nilai LCR

Nilai LCR (%)	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
	(1)	(2)	(3)	(4)
Danamon secara individu	97,31%	97,57%	113,20%	118,38%
Danamon secara konsolidasi	94,67%	93,50%	110,14%	117,90%

Secara umum, kondisi likuiditas Danamon masih terbilang cukup baik. Pengelolaan risiko likuiditas didukung oleh pengukuran parameter-parameter risiko likuiditas yang menunjukkan tingkat risiko rendah. Sebagai tambahan, Danamon juga didukung oleh permodalan yang kuat.

Sesuai dengan aturan POJK No. 42/POJK.03/2015, Bank berkewajiban melakukan pelaporan triwulanan Individual maupun Konsolidasi bagi Bank BUKU 3 yang efektif berlaku sejak posisi laporan Triwulan-3 2016 berdasarkan rata-rata posisi akhir bulan pada triwulan tersebut.

Posisi laporan Triwulan-4 2017 yang dilaporkan merupakan rata-rata harian sepanjang bulan Oktober-November-Desember 2017. Rasio LCR Danamon secara Individu dan Konsolidasi untuk Triwulan-4 2017 masih berada diatas ketentuan nilai rasio yang telah di tetapkan sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 42/POJK.03/2015 yaitu sebesar 90%.

Perhitungan konsolidasi LCR merupakan penggabungan perhitungan LCR Danamon dengan LCR Perusahaan Anak (dalam hal ini Perusahaan Anak lembaga jasa keuangan yang bergerak di bidang multi *finance*). Secara konsolidasi, penggabungan LCR Perusahaan Anak berdampak marjinal terhadap *High Quality Liquid Asset* (HQLA) melalui penambahan kas atau setara kas, serta menambah arus kas keluar melalui *bond issuance* dan *interbank borrowing* dan menambah arus kas masuk melalui tagihan *retail* dan *interbank asset*.

Komposisi HQLA (Rupiah dan Valas) Danamon didominasi oleh Penempatan pada Bank Indonesia dan Surat Berharga yang diterbitkan Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia dengan mengacu kepada ketentuan POJK No. 32/POJK.03/2016 pasal 36A (efektif berlaku posisi 30 September 2016). POJK tersebut memuat pengaturan terhadap surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia dalam valuta asing yang hanya dapat diperhitungkan sebagai HQLA *Level 1* paling tinggi sebesar kebutuhan arus kas keluar dalam valuta asing yang dimaksud.

Analisa Komposisi DPK sebagai komponen *outflow*, mayoritas berada pada Danamon yang tetap terdiversifikasi pada pendanaan segmen *wholesale* dan *retail*. Pengawasan terhadap konsentrasi pendanaan dipantau secara limit harian.

Di Danamon, transaksi *derivative* dibukukan secara terpusat. Rasio transaksi *derivative* baik dari sisi tagihan maupun kewajiban terhadap total Aset dan Kewajiban (termasuk modal) minimum dampaknya terhadap perhitungan LCR. Latar belakang aktifitas portofolio *derivative* hanya terbatas pada produk *plain vanilla* untuk kebutuhan *hedging*, mendukung transaksi nasabah, atau kebutuhan likuiditas melalui *Balance Sheet Management*.

Selain dari pengukuran risiko likuiditas yang bersifat regulasi, Bank dapat menerapkan pengukuran lain yang bersifat internal yang umumnya digunakan dalam manajemen risiko likuiditas, diantaranya *Maximum Cumulative Outflow* (MCO) dan *Large Fund Provider* (LFP).

Danamon juga telah melakukan pengukuran terhadap *Net Stable Funding Ratio* (NSFR), berdasarkan *Consultative Paper* OJK selama periode uji coba dan dilanjutkan dengan Peraturan OJK yang akan berlaku efektif pada bulan Januari 2018. Rasio ini bertujuan untuk mengukur ketahanan Bank melalui profil pendanaan yang stabil sesuai dengan komposisi neraca dan aktivitas *off-balance sheet*.

4) Pemantauan dan Pengendalian Risiko Likuiditas

Danamon mengelola risiko likuiditas melalui analisa *gap* likuiditas dan rasio likuiditas. Risiko likuiditas diukur dan dimonitor secara periodik berdasarkan kerangka limit risiko likuiditas.

Proses pemantauan (*monitoring*) dan pengendalian (*controlling*) dilakukan melalui mekanisme Limit Risiko Likuiditas. MLR secara independen merupakan salah satu divisi (sebagai *second line of defense*) yang melakukan pemantauan atas limit terkait Risiko Likuiditas secara harian dengan mempertimbangkan *risk appetite* dan arah strategi bisnis Danamon.

1.1.a Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah-Bank secara Individual

No.	Pos-pos	31 Desember 2017					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			≤ 1 bulan	> 1 bln s.d 3 bln	> 3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	>12 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I NERACA							
A. Aset							
1. Kas		2.130.007	2.130.007	-	-	-	-
2. Penempatan pada Bank Indonesia		11.435.012	9.219.592	1.042.065	344.612	828.743	-
3. Penempatan pada Bank Lain		1.599.807	121.356	588.867	536.074	353.510	-
4. Surat Berharga		13.160.675	1.257.400	3.612.730	1.661.402	1.056.311	5.572.832
5. Kredit yang diberikan		91.121.513	12.941.439	12.597.014	14.227.920	19.782.557	31.572.583
6. Tagihan Lainnya		636.419	280.816	301.523	41.201	21	12.858
7. Lain-lain		2.078.308	811.992	31.117	26.679	-	1.208.520
Total Aset		122.161.741	26.762.602	18.173.316	16.837.888	22.021.142	38.366.793
B. Kewajiban							
1. Dana Pihak Ketiga		84.166.646	28.225.830	12.778.413	5.595.515	6.893.792	30.673.096
2. Kewajiban kepada Bank Indonesia		-	-	-	-	-	-
3. Kewajiban kepada bank lain		4.641.807	2.771.583	385.574	359.795	815.536	309.319
4. Surat Berharga Yang Diterbitkan		-	-	-	-	-	-
5. Pinjaman Yang Diterima		60.176	50.000	-	-	-	10.176
6. Kewajiban Lainnya		562.768	166.824	164.059	42.491	-	189.394
7. Lain-lain		3.195.062	417.633	-	673	-	2.776.756
Total Kewajiban		92.626.459	31.631.870	13.328.046	5.998.474	7.709.328	33.958.741
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca		29.535.282	(4.869.268)	4.845.270	10.839.414	14.311.814	4.408.052
II REKENING ADMINISTRATIF							
A. Tagihan Rekening Administratif							
1. Komitmen		-	-	-	-	-	-
2. Kontinjensi		-	-	-	-	-	-
Total Tagihan Rekening Administratif		-	-	-	-	-	-
B. Kewajiban Rekening Administratif							
1. Komitmen		31.146.280	2.187.871	3.325.525	5.656.867	11.558.595	8.417.422
2. Kontinjensi		3.433.456	529.610	667.896	818.441	1.127.525	289.984
Total Kewajiban Rekening Administratif		34.579.736	2.717.481	3.993.421	6.475.308	12.686.120	8.707.406
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif		(34.579.736)	(2.717.481)	(3.993.421)	(6.475.308)	(12.686.120)	(8.707.406)
Selisih [(IA-IB)+(IIA-II B)]		(5.044.454)	(7.586.749)	851.849	4.364.106	1.625.694	(4.299.354)
Selisih kumulatif		(5.044.454)	(7.586.749)	(6.734.900)	(2.370.794)	(745.100)	(5.044.454)

(dalam jutaan rupiah)

	31 Desember 2016					
	Saldo	Jatuh Tempo				
		≤ 1 bulan	> 1 bln s.d 3 bln	> 3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	>12 bulan
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	1.895.129	1.895.129	-	-	-	-
	8.887.310	6.555.376	496.999	1.024.271	810.664	-
	3.999.261	450.150	271.469	120.210	1.166.836	1.990.596
	11.042.543	1.317.505	2.106.893	2.155.587	1.479.358	3.983.200
	87.826.305	11.652.442	13.450.192	14.810.895	19.081.783	28.830.993
	298.771	72.569	160.950	56.670	-	8.582
	825.381	114.954	16.994	8.474	-	684.959
	114.774.700	22.058.125	16.503.497	18.176.107	22.538.641	35.498.330
	82.209.773	33.281.113	8.161.745	4.581.918	4.472.845	31.712.152
	-	-	-	-	-	-
	3.185.353	2.049.903	302.176	292.844	448.751	91.679
	-	-	-	-	-	-
	14.629	-	-	-	-	14.629
	226.872	20.532	22.048	10.729	-	173.563
	2.769.880	16.993	2.936	63	-	2.749.888
	88.406.507	35.368.541	8.488.905	4.885.554	4.921.596	34.741.911
	26.368.193	(13.310.416)	8.014.592	13.290.553	17.617.045	756.419
	-	-	-	-	-	-
	39.670	25.140	14.530	-	-	-
	39.670	25.140	14.530	-	-	-
	32.975.120	2.504.404	3.642.113	5.690.204	12.867.133	8.271.266
	3.418.549	482.268	580.832	773.773	1.382.883	198.793
	36.393.669	2.986.672	4.222.945	6.463.977	14.250.016	8.470.059
	(36.353.999)	(2.961.532)	(4.208.415)	(6.463.977)	(14.250.016)	(8.470.059)
	(9.985.806)	(16.271.948)	3.806.177	6.826.576	3.367.029	(7.713.640)
	(9.985.806)	(16.271.948)	(12.465.771)	(5.639.195)	(2.272.166)	(9.985.806)

1.1.b Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah-Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Pos-pos	31 Desember 2017					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			≤ 1 bulan	> 1 bln s.d 3 bln	> 3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	>12 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I NERACA							
A. Aset							
1. Kas		2.350.479	2.350.479	-	-	-	-
2. Penempatan pada Bank Indonesia		11.435.012	9.219.592	1.042.065	344.612	828.743	-
3. Penempatan pada Bank Lain		1.869.318	390.867	588.867	536.074	353.510	-
4. Surat Berharga		13.152.471	1.257.400	3.612.730	1.661.402	1.056.311	5.564.628
5. Kredit yang diberikan		117.173.512	12.257.540	12.899.803	15.173.002	23.054.308	53.788.859
6. Tagihan Lainnya		1.020.720	284.586	307.607	69.386	73.348	285.793
7. Lain-lain		2.388.418	1.045.711	47.517	30.534	851	1.263.805
Total Aset		149.389.930	26.806.175	18.498.589	17.815.010	25.367.071	60.903.085
B. Kewajiban							
1. Dana Pihak Ketiga		82.152.020	26.211.204	12.778.413	5.595.515	6.893.792	30.673.096
2. Kewajiban kepada Bank Indonesia		-	-	-	-	-	-
3. Kewajiban kepada bank lain		4.641.807	2.771.583	385.574	359.795	815.536	309.319
4. Surat Berharga yang Diterbitkan		10.454.165	-	850.865	1.985.629	1.812.472	5.805.199
5. Pinjaman yang Diterima		4.794.086	399.979	849.978	2.032.803	1.511.284	42
6. Kewajiban Lainnya		569.975	166.824	164.059	42.491	5.285	191.316
7. Lain-lain		6.002.611	2.552.599	267.921	74.412	322.943	2.784.736
Total Kewajiban		108.614.664	32.102.189	15.296.810	10.090.645	11.361.312	39.763.708
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca		40.775.266	(5.296.014)	3.201.779	7.724.365	14.005.759	21.139.377
II REKENING ADMINISTRATIF							
A. Tagihan Rekening Administratif							
1. Komitmen		-	-	-	-	-	-
2. Kontinjensi		-	-	-	-	-	-
Total Tagihan Rekening Administratif		-	-	-	-	-	-
B. Kewajiban Rekening Administratif							
1. Komitmen		36.144.499	2.219.529	4.392.586	7.168.279	12.112.803	10.251.302
2. Kontinjensi		3.433.456	529.610	667.896	818.441	1.127.525	289.984
Total Kewajiban Rekening Administratif		39.577.955	2.749.139	5.060.482	7.986.720	13.240.328	10.541.286
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif		(39.577.955)	(2.749.139)	(5.060.482)	(7.986.720)	(13.240.328)	(10.541.286)
Selisih [(IA-IB)+(IIA-II B)]		1.197.311	(8.045.153)	(1.858.703)	(262.355)	765.431	10.598.091
Selisih kumulatif		1.197.311	(8.045.153)	(9.903.856)	(10.166.211)	(9.400.780)	1.197.311

(dalam jutaan rupiah)

	31 Desember 2016					
	Saldo	Jatuh Tempo				
		≤ 1 bulan	> 1 bln s.d 3 bln	> 3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	>12 bulan
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	2.087.443	2.087.443	-	-	-	-
	8.887.310	6.555.376	496.999	1.024.271	810.664	-
	4.167.692	618.581	271.469	120.210	1.166.836	1.990.596
	10.973.028	1.317.505	2.106.893	2.155.587	1.479.358	3.913.685
	113.600.949	11.760.888	13.738.700	15.739.995	22.417.014	49.944.352
	1.196.463	74.293	168.569	89.881	116.344	747.376
	1.310.714	539.805	31.278	16.493	3.173	719.965
	142.223.599	22.953.891	16.813.908	19.146.437	25.993.389	57.315.974
	81.485.748	32.557.088	8.161.745	4.581.918	4.472.845	31.712.152
	-	-	-	-	-	-
	3.185.353	2.049.903	302.176	292.844	448.751	91.679
	8.554.979	-	72.953	362.842	2.388.412	5.730.772
	7.568.673	200.000	2.650.000	3.046.017	1.672.434	222
	226.912	20.572	22.048	10.729	-	173.563
	5.274.369	1.230.180	432.176	63.219	338.701	3.210.093
	106.296.034	36.057.743	11.641.098	8.357.569	9.321.143	40.918.481
	35.927.565	(13.103.852)	5.172.810	10.788.868	16.672.246	16.397.493
	-	-	-	-	-	-
	39.670	25.140	14.530	-	-	-
	39.670	25.140	14.530	-	-	-
	32.975.120	2.504.404	3.642.113	5.690.204	12.867.133	8.271.266
	3.418.549	482.268	580.832	773.773	1.382.883	198.793
	36.393.669	2.986.672	4.222.945	6.463.977	14.250.016	8.470.059
	(36.353.999)	(2.961.532)	(4.208.415)	(6.463.977)	(14.250.016)	(8.470.059)
	(426.434)	(16.065.384)	964.395	4.324.891	2.422.230	7.927.434
	(426.434)	(16.065.384)	(15.100.989)	(10.776.098)	(8.353.868)	(426.434)

1.2.a Pengungkapan Profil Maturitas Valas-Bank secara Individual

No.	Pos-pos	31 Desember 2017					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			≤ 1 bulan	> 1 bln s.d 3 bln	> 3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I NERACA							
A. Aset							
1. Kas		195.793	195.793	-	-	-	-
2. Penempatan pada Bank Indonesia		4.432.557	3.132.383	982.450	317.724	-	-
3. Penempatan pada Bank Lain		1.861.271	1.861.271	-	-	-	-
4. Surat Berharga		5.979.794	1.868.598	681.672	234.704	321.875	2.872.945
5. Kredit yang diberikan		6.647.234	2.117.303	1.316.549	960.620	372.306	1.880.456
6. Tagihan Lainnya		1.174.498	261.093	562.115	223.606	96.316	31.368
7. Lain-lain		196.866	114.362	51.937	3.134	149	27.284
Total Aset		20.488.013	9.550.803	3.594.723	1.739.788	790.646	4.812.053
B. Kewajiban							
1. Dana Pihak Ketiga		19.968.646	6.625.824	4.075.908	2.669.039	2.145.442	4.452.433
2. Kewajiban kepada Bank Indonesia		-	-	-	-	-	-
3. Kewajiban kepada bank lain		21.993	1.506	3.419	2.442	4.871	9.755
4. Surat Berharga Yang Diterbitkan		41	41	-	-	-	-
5. Pinjaman Yang Diterima		-	-	-	-	-	-
6. Kewajiban Lainnya		1.219.150	271.053	562.102	223.606	96.302	66.087
7. Lain-lain		208.397	139.989	1.669	163	-	66.576
Total Kewajiban		21.418.227	7.038.413	4.643.098	2.895.250	2.246.615	4.594.851
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca		(930.214)	2.512.390	(1.048.375)	(1.155.462)	(1.455.969)	217.202
II REKENING ADMINISTRATIF							
A. Tagihan Rekening Administratif							
1. Komitmen		8.450.884	7.765.915	361.913	69.805	27.135	226.116
2. Kontinjensi		28.817	9.497	19.076	-	244	-
Total Tagihan Rekening Administratif		8.479.701	7.775.412	380.989	69.805	27.379	226.116
B. Kewajiban Rekening Administratif							
1. Komitmen		12.805.075	5.427.611	3.295.858	1.101.491	2.618.962	361.153
2. Kontinjensi		200.175	54.379	19.089	59.602	57.608	9.497
Total Kewajiban Rekening Administratif		13.005.250	5.481.990	3.314.947	1.161.093	2.676.570	370.650
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif		(4.525.549)	2.293.422	(2.933.958)	(1.091.288)	(2.649.191)	(144.534)
Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)]		(5.455.763)	4.805.812	(3.982.333)	(2.246.750)	(4.105.160)	72.668
Selisih kumulatif		(5.455.763)	4.805.812	823.479	(1.423.271)	(5.528.431)	(5.455.763)

(dalam jutaan rupiah)

	31 Desember 2016					
	Saldo	Jatuh Tempo				
		≤ 1 bulan	> 1 bln s.d 3 bln	> 3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	>12 bulan
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	177.487	177.487	-	-	-	-
	8.825.108	5.146.980	-	2.008.319	1.669.809	-
	2.012.104	1.523.861	1.832	419.116	-	67.295
	4.894.170	740.288	1.329.655	1.371.959	-	1.452.268
	7.328.177	2.201.824	1.466.603	1.430.308	488.957	1.740.485
	1.625.270	583.966	827.387	195.324	18.431	162
	101.162	39.742	28.158	6.304	-	26.958
	24.963.478	10.414.148	3.653.635	5.431.330	2.177.197	3.287.168
	22.346.539	6.728.907	5.553.270	2.782.570	1.911.249	5.370.543
	-	-	-	-	-	-
	1.662.008	602.558	829.771	197.493	23.025	9.161
	-	-	-	-	-	-
	445.212	-	-	-	-	445.212
	16.073	5.713	27	27	-	10.306
	115.526	22.674	256	1.832	-	90.764
	24.585.358	7.359.852	6.383.324	2.981.922	1.934.274	5.925.986
	378.120	3.054.296	(2.729.689)	2.449.408	242.923	(2.638.818)
	4.215.545	3.102.555	608.957	474.906	1.724	27.403
	30.192	-	-	20.761	9.431	-
	4.245.737	3.102.555	608.957	495.667	11.155	27.403
	10.348.645	3.309.964	3.466.030	1.298.965	1.426.549	847.137
	403.677	29.922	19.091	243.219	106.177	5.268
	10.752.322	3.339.886	3.485.121	1.542.184	1.532.726	852.405
	(6.506.585)	(237.331)	(2.876.164)	(1.046.517)	(1.521.571)	(825.002)
	(6.128.465)	2.816.965	(5.605.853)	1.402.891	(1.278.648)	(3.463.820)
	(6.128.465)	2.816.965	(2.788.888)	(1.385.997)	(2.664.645)	(6.128.465)

1.2.b Pengungkapan Profil Maturitas Valas-Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Pos-pos	31 Desember 2017					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			≤ 1 bulan	> 1 bln s.d 3 bln	> 3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	>12 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I NERACA							
A. Aset							
1. Kas		195.793	195.793	-	-	-	-
2. Penempatan pada Bank Indonesia		4.432.557	3.132.383	982.450	317.724	-	-
3. Penempatan pada Bank Lain		1.861.780	1.861.780	-	-	-	-
4. Surat Berharga		5.979.794	1.868.598	681.672	234.704	321.875	2.872.945
5. Kredit yang diberikan		6.647.234	2.117.303	1.316.549	960.620	372.306	1.880.456
6. Tagihan Lainnya		1.260.178	263.603	584.509	262.429	96.316	53.321
7. Lain-lain		196.866	114.362	51.937	3.134	149	27.284
Total Aset		20.574.202	9.553.822	3.617.117	1.778.611	790.646	4.834.006
B. Kewajiban							
1. Dana Pihak Ketiga		19.968.602	6.625.780	4.075.908	2.669.039	2.145.442	4.452.433
2. Kewajiban kepada Bank Indonesia		-	-	-	-	-	-
3. Kewajiban kepada bank lain		21.993	1.506	3.419	2.442	4.871	9.755
4. Surat Berharga yang Diterbitkan		41	41	-	-	-	-
5. Pinjaman yang Diterima		5.000.242	33.913	1.084.268	1.534.800	541.026	1.806.235
6. Kewajiban Lainnya		1.219.150	271.053	562.102	223.606	96.302	66.087
7. Lain-lain		262.309	177.705	17.865	163	-	66.576
Total Kewajiban		26.472.337	7.109.998	5.743.562	4.430.050	2.787.641	6.401.086
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca		(5.898.135)	2.443.824	(2.126.445)	(2.651.439)	(1.996.995)	(1.567.080)
II REKENING ADMINISTRATIF							
A. Tagihan Rekening Administratif							
1. Komitmen		8.450.884	7.765.915	361.913	69.805	27.135	226.116
2. Kontinjensi		28.817	9.497	19.076	-	244	-
Total Tagihan Rekening Administratif		8.479.701	7.775.412	380.989	69.805	27.379	226.116
B. Kewajiban Rekening Administratif							
1. Komitmen		12.805.075	5.427.611	3.295.858	1.101.491	2.618.962	361.153
2. Kontinjensi		200.175	54.379	19.089	59.602	57.608	9.497
Total Kewajiban Rekening Administratif		13.005.250	5.481.990	3.314.947	1.161.093	2.676.570	370.650
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif		(4.525.549)	2.293.422	(2.933.958)	(1.091.288)	(2.649.191)	(144.534)
Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIIB)]		(10.423.684)	4.737.246	(5.060.403)	(3.742.727)	(4.646.186)	(1.711.614)
Selisih kumulatif		(10.423.684)	4.737.246	(323.157)	(4.065.884)	(8.712.070)	(10.423.684)

(dalam jutaan rupiah)

	31 Desember 2016					
	Saldo	Jatuh Tempo				
		≤ 1 bulan	> 1 bln s.d 3 bln	> 3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	>12 bulan
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	177.487	177.487	-	-	-	-
	8.825.108	5.146.980	-	2.008.319	1.669.809	-
	2.012.604	1.524.361	1.832	419.116	-	67.295
	4.894.170	740.288	1.329.655	1.371.959	-	1.452.268
	7.328.177	2.201.824	1.466.603	1.430.308	488.957	1.740.485
	1.844.869	591.482	831.251	238.045	88.939	95.152
	101.162	39.742	28.158	6.304	-	26.958
	25.183.577	10.422.164	3.657.499	5.474.051	2.247.705	3.382.158
	22.346.487	6.728.855	5.553.270	2.782.570	1.911.249	5.370.543
	-	-	-	-	-	-
	1.662.008	602.558	829.771	197.493	23.025	9.161
	-	-	-	-	-	-
	4.496.287	89.790	44.873	313.639	627.051	3.420.934
	16.073	5.713	27	27	-	10.306
	164.932	52.783	19.553	1.832	-	90.764
	28.685.787	7.479.699	6.447.494	3.295.561	2.561.325	8.901.708
	(3.502.210)	2.942.465	(2.789.995)	2.178.490	(313.620)	(5.519.550)
	4.215.545	3.102.555	608.957	474.906	1.724	27.403
	30.192	-	-	20.761	9.431	-
	4.245.737	3.102.555	608.957	495.667	11.155	27.403
	10.348.645	3.309.964	3.466.030	1.298.965	1.426.549	847.137
	403.677	29.922	19.091	243.219	106.177	5.268
	10.752.322	3.339.886	3.485.121	1.542.184	1.532.726	852.405
	(6.506.585)	(237.331)	(2.876.164)	(1.046.517)	(1.521.571)	(825.002)
	(10.008.795)	2.705.134	(5.666.159)	1.131.973	(1.835.191)	(6.344.552)
	(10.008.795)	2.705.134	(2.961.025)	(1.829.052)	(3.664.243)	(10.008.795)

CONTINGENCY FUNDING PLAN

Suatu peristiwa stress/krisis likuiditas merupakan situasi darurat yang memiliki potensi untuk mempengaruhi posisi likuiditas bank secara material. Untuk menghadapi krisis likuiditas, Danamon telah memiliki *Contingency Funding Plan* (CFP) yang secara formal menetapkan strategi untuk menghadapi krisis likuiditas dan prosedur untuk menutup defisit arus kas dalam situasi darurat. CFP harus secara

komprehensif menjelaskan strategi manajemen kontingensi, prosedur eskalasi dan tanggung jawab dalam menangani peristiwa stres likuiditas.

Terkait dengan CFP terdapat indikator-indikator yang mewakili faktor eksternal (*Market Indicator*) dan faktor internal yaitu CFP *Monitoring* dengan rincian indikator antara lain sebagai berikut:

Indikator Internal	Indikator Pasar
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Loan to Funding Rasio</i> • <i>Liquidity Coverage Rasio</i> • <i>Stress Test Maximum Cummulative Outflow</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar • Tingkat Inflasi • <i>Trade Balance</i> • <i>Credit Rating</i> • Tingkat Imbal Hasil Obligasi Pemerintah

D. RISIKO OPERASIONAL

Definisi risiko operasional telah diatur pada Peraturan OJK no 18/POJK 03/2016, yaitu risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya kejadian eksternal yang berdampak pada kegiatan operasional Bank.

Pendekatan Danamon terhadap manajemen risiko operasional adalah dengan menentukan strategi mitigasi guna memperoleh keseimbangan yang optimal antara paparan risiko operasional, efektivitas mekanisme kontrol dan pembuatan *risk appetite* sebagai salah satu strategi Danamon dengan melakukan implementasi yang konsisten atas kerangka kerja Manajemen Risiko Operasional (*Operational Risk Management - ORM*).

Komponen utama dari Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko Operasional yang dijalankan secara berkesinambungan antara lain:

1) Tiga Lini Pertahanan

Dalam pelaksanaan kerangka kerja ORM, diterapkan konsep “Tiga Lini Pertahanan” dengan penjelasan sebagai berikut:

- Lini bisnis dan fungsi pendukung sebagai pemilik dari proses pengelolaan risiko, ORM di Lini Bisnis/ Fungsi Pendukung, dan Fungsi Pengendalian Internal yang ada pada setiap *Risk Taking Unit* (RTU) berperan sebagai lini pertahanan lapis pertama dalam penegakan pengelolaan risiko operasional sehari-hari. Mereka bertanggung jawab dalam mengidentifikasi, mengelola, memitigasi dan melaporkan Risiko Operasional.
- Divisi ORM bersama-sama dengan Divisi *Information Risk Management* (IRM), Divisi Kepatuhan dan Hukum berperan sebagai pertahanan lapis kedua yang bertanggung jawab dalam pengawasan pengelolaan risiko operasional di Danamon.
- Divisi ORM berfungsi dalam perancangan, pendefinisian, pengembangan, dan pemeliharaan kerangka kerja risiko operasional secara keseluruhan, memantau penerapan kerangka kerja oleh RTU, memastikan kecukupan kontrol atas kebijakan dan prosedur, serta berperan sebagai koordinator/fasilitator atas aktivitas pengelolaan risiko operasional yang efektif.
- Sedangkan Satuan Kerja Auditor Internal (SKAI) secara independen berperan sebagai pertahanan lapis ketiga yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kelemahan yang ditemukan dalam pengelolaan risiko operasional dan menilai pelaksanaan kerangka manajemen risiko operasional telah berjalan sesuai dengan ketentuan.

- Direksi seperti halnya Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi efektivitas pelaksanaan dari kerangka kerja pengelolaan risiko operasional secara menyeluruh.

2) Pengelolaan Risiko Operasional

Pelaksanaan kerangka kerja manajemen risiko operasional di Danamon dan Perusahaan Anak dilakukan dalam proses manajemen risiko operasional secara terpadu yang terdiri dari proses identifikasi, penilaian/pengukuran, pemantauan serta pengendalian risiko.

Proses ini mencakup:

- Identifikasi risiko yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko melekat pada produk, jasa, sistem dan proses baru maupun perubahannya, serta memastikan adanya kecukupan kontrol preventif atas seluruh proses yang dijalankan.

- Pengukuran risiko di tingkat unit operasional didukung dengan perangkat *Risk/Loss Event Database (R/LED)*, *Risk Control Self Assessment (RCSA)*, *Key Risk Indicator (KRI)*, untuk mengetahui profil risiko Danamon secara kuantitatif sehingga dapat digunakan untuk mengetahui efektivitas penerapan manajemen risiko operasional.

Perhitungan Beban Modal Risiko operasional masih menggunakan pendekatan indikator dasar sesuai Surat Edaran BI No. 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009. Berdasarkan Surat Edaran ini, biaya modal dengan risiko operasional adalah sebesar 15% dari pendapatan kotor rata-rata selama tiga tahun terakhir.

Pengungkapan kuantitatif risiko operasional Danamon secara individu dan konsolidasi dimuat dalam tabel-tabel berikut.

1.a. Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional-Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Pendekatan Yang Digunakan	31 Desember 2017			31 Desember 2016		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendekatan Indikator Dasar	12.679.111	1.901.867	23.773.333	12.997.229	1.949.584	24.369.804
	Total	12.679.111	1.901.867	23.773.333	12.997.229	1.949.584	24.369.804

1.b. Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional-Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Pendekatan Yang Digunakan	31 Desember 2017			31 Desember 2016		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendekatan Indikator Dasar	18.030.095	2.704.514	33.806.429	18.236.164	2.735.425	34.192.807
	Total	18.030.095	2.704.514	33.806.429	18.236.164	2.735.425	34.192.807

- Pemantauan risiko operasional melalui penyusunan laporan secara berkala ke manajemen melalui Komite Manajemen Risiko untuk mengidentifikasi masalah yang muncul terkait dengan adanya kelemahan atau kegagalan di dalam penerapan fungsi kontrol.

Sebagai bagian dari upaya Danamon untuk meningkatkan pemantauan risiko operasional, berikut adalah beberapa hal yang telah diterapkan dan akan terus ditingkatkan:

- Perluasan cakupan pencatatan, analisis dan pelaporan *risk events* untuk mengetahui lebih detail posisi Danamon terhadap masalah-masalah yang timbul terkait dengan risiko operasional.
- Pengembangan aplikasi *Operational Risk Management System* (ORMS) untuk meningkatkan efektivitas dari manajemen risiko operasional.
- Efektivitas dari ORM *tools* seperti *Risk/Loss Event Database*, *Risk Control Self Assessment* dan *Key Risk Indicator* yang digunakan untuk mengetahui potensi risiko operasional dan agar dapat melakukan tindakan pencegahan.

Di samping itu, salah satu mitigasi utama risiko operasional adalah dengan penerapan asuransi yang terkoordinasi secara komprehensif melalui cakupan polis asuransi yang optimum terhadap pemaparan risiko operasional Danamon.

- d) Pengendalian risiko dilakukan di antaranya dengan memastikan ketersediaan kebijakan operasional dan kecukupan kontrol pada seluruh prosedur operasional untuk memitigasi risiko operasional.

Penerapan Manajemen Asuransi dilakukan sebagai salah satu mitigasi risiko operasional yang penting dan penerapannya dilakukan secara terkoordinasi untuk memastikan keseimbangan optimal antara paparan risiko operasional, efektivitas mekanisme kontrol, cakupan asuransi, biaya premi dan *risk appetite* Danamon.

3) Sarana Pendukung

Implementasi dari proses pengelolaan risiko operasional secara menyeluruh didukung dengan alat bantu *online real time* yaitu ORMS (*Operational Risk Management System*). ORMS memiliki fungsi sebagai berikut:

- Pencatatan *Risk Loss Event*
- Memonitor *Key Risk Indicator*
- *Risk Control Self Assessment*
- *Reporting*

ORMS memperkuat pencatatan, analisis dan pelaporan dari data risiko operasional dengan kemampuan melakukan identifikasi risiko, penilaian/pengukuran, pemantauan dan pengendalian/mitigasi yang dilaksanakan secara terintegrasi. Dengan demikian meningkatkan efektivitas dari penerapan manajemen risiko operasional pada Danamon.

ORM juga mempunyai sarana pendukung yang telah dikembangkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya risiko operasional, yaitu *E-Learning*. Hal ini telah dan sedang dilaksanakan di seluruh jajaran manajemen dan karyawan Danamon.

4) IT Risk Management

Dalam mengelola risiko operasional, Divisi ORM bekerja sama dengan Divisi IRM, khususnya Unit Kerja *IT Risk Management*.

Dalam menjalankan aktivitas kerjanya, Unit Kerja *IT Risk Management* mengacu dan mengikuti metodologi, kerangka kerja dan kebijakan manajemen risiko operasional yang berlaku, termasuk sarana pendukungnya, seperti telah diuraikan di atas, namun lebih berkonsentrasi pada aspek kontrol dan risiko yang berhubungan dengan penggunaan Teknologi Informasi yang luas dalam mendukung produk dan layanan Bank.

5) Information Security Management

Information Security adalah serangkaian kebijakan, dan kerangka kerja atau panduan yang bertujuan untuk melindungi informasi Bank, ditinjau dari aspek-aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan.

Kebijakan Keamanan Informasi dan kerangka kerja yang dikembangkan, memberikan persyaratan minimum dari penerapan keamanan informasi di Bank, yang wajib dipatuhi oleh seluruh karyawan (baik permanen maupun kontrak), termasuk pihak ketiga yang bekerja dan/ atau mendapatkan akses terhadap informasi yang dimiliki oleh Bank.

Kebijakan Keamanan Informasi dikembangkan dengan mengadopsi standar internasional yang mengatur mengenai Keamanan Informasi, yaitu ISO 27001. Selain itu juga mempertimbangkan regulasi dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kunci kesuksesan dari penerapan aspek-aspek yang diatur dalam Kebijakan Keamanan Informasi merupakan hasil dari kesadaran, budaya, komitmen dan usaha kolektif dari seluruh lini bisnis dan fungsi pendukung dalam Bank, baik dari tingkat karyawan hingga tingkat manajemen senior.

Untuk meningkatkan kesadaran akan keamanan informasi, seperti telah disampaikan diatas, maka telah dilakukan sebagai berikut:

- a. Pengembangan materi edukasi sebagai bagian dari pelatihan online bagi seluruh karyawan Bank.
- b. Memberikan sharing session bagi lini bisnis atau fungsi pendukung yang memerlukan.
- c. Menyebarkan materi edukasi dan tips praktis mengenai keamanan informasi melalui email secara periodik.

Sebagai bagian dari penerapan Kebijakan Keamanan Informasi, Unit Kerja *Information Security Management* juga memberikan dukungan bagi Unit Kerja *IT Risk Management* dalam melakukan penilaian risiko, dari perspektif keamanan informasi, terhadap produk dan layanan Bank yang didukung oleh teknologi informasi. Peran Unit kerja *Information Security Management* dalam aktivitas ini adalah untuk melakukan identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap informasi yang digunakan oleh Bank untuk mencapai tujuan bisnis, dan menyediakan arahan mengenai tindakan yang diperlukan, untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi, jika ada, berdasarkan nilai yang ditimbulkan dari klasifikasi informasi tersebut.

6) *Business Continuity Management* (BCM)

Sebagai bagian dari kerangka kerja IRM, BCM disusun sebagai langkah untuk meningkatkan ketahanan dan membangun kemampuan pencegahan untuk merespon setiap insiden

yang mengganggu kelangsungan aktivitas Bank tanpa mempermasalahkan penyebabnya, hal ini meliputi risiko yang diklasifikasikan memiliki dampak rendah hingga tinggi, guna melindungi kepentingan *stakeholders*, reputasi, *brand* dan aktivitas usaha yang bernilai dan untuk meningkatkan ketahanan Bank. Pengelolaan dan implementasi BCM di Bank tidak hanya fokus terhadap penanganan gangguan seperti bencana alam, tetapi juga fokus dan mencakup penyimpangan yang dapat merintangai rencana strategis operasional Bank.

Sesuai dengan tujuan tersebut di atas, maka Bank telah:

- a) Memperluas cakupan BCM (kerangka kerja dan penerapannya) ke semua lini bisnis Bank dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan akan BCM dari semua staf dengan memberikan pelatihan internal, sosialisasi ke regional, loka karya dan *email blast*.
- b) Memastikan BCM *plan* selalu dimuktahirkan dan efektif dengan melakukan pengujian secara periodik, pengkinian dan peninjauan secara berkala terhadap prosedur dan strategi yang telah dibuat.

Program dan kerangka kerja BCM disiapkan agar dapat diterapkan secara efektif, dengan sasaran untuk:

- a) Memastikan kelanjutan proses operasional/ aktivitas bisnis yang tepat waktu dari seluruh fungsi/unit saat terjadi krisis atau bencana.
- b) Menyiapkan sumber daya utama yang dibutuhkan dalam mendukung pemulihan aktivitas Danamon.
- c) Mengurangi dampak dari insiden terhadap layanan Danamon dan nasabah bersangkutan
- d) Mengurangi risiko reputasi.
- e) Meningkatkan kepercayaan publik dan sistem keuangan makro terhadap Danamon.
- f) Meningkatkan ketahanan Danamon dan/ atau kemampuan pemulihannya; dan
- g) Menjaga eksistensi Danamon.

Penerapan program-program terkait BCM di Danamon melibatkan seluruh komponen dan mendapat dukungan penuh dari manajemen sejak dari tahap perencanaan, penyusunan, pemeliharaan, pengawasan sampai penyempurnaannya. Dengan keterlibatan dan dukungan penuh dari seluruh komponen, Danamon mampu menjaga dan meningkatkan tingkat ketahanannya dengan menangani seluruh insiden yang terjadi selama tahun 2017.

7) *Fraud* & QA

Danamon memitigasi dan mengelola risiko yang muncul akibat *fraud* berdasarkan kerangka kerja strategi anti *fraud* sesuai yang tertuang

dalam “Kebijakan dan Kerangka Kerja *Fraud* Manajemen” dan telah diimplementasikan secara nasional serta ke Perusahaan Anak. Kebijakan dan strategi ini sejalan dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP perihal penerapan strategi anti *fraud* untuk bank komersial dimana Danamon telah melakukan pelaporan ke OJK tiap semester.

Dalam penerapan kebijakan, Danamon telah secara konsisten mengimplementasi 4 pilar dari strategi kontrol *fraud* yang saling berkaitan, yaitu, pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan & sanksi, dan pengawasan, evaluasi dan tindak lanjut.



***Fraud* dapat mempengaruhi setiap bagian dari sebuah institusi, maka kita perlu tetap waspada dan memberi penekanan lebih besar terhadap internal control dan manajemen risiko**

Danamon telah melakukan penerapan strategi dengan berbagai inisiatif melibatkan karyawan dan sistem termasuk melakukan peningkatan secara berkala terhadap efektivitas dari kontrol internal, supervisi aktif dari Manajemen serta pembentukan budaya dan perhatian terhadap *Anti Fraud* pada semua tingkatan karyawan di Danamon.

Implementasi dari fungsi *Quality Assurance*/Kontrol Internal pada setiap unit di Danamon mengacu pada praktik industri secara umum (COSO), aplikasi pengukuran kuantitatif atas efektivitas kontrol secara *bankwide* dan juga validasi silang dengan mekanisme kontrol yang dilakukan oleh pihak independen (SKAI). Fokus QA tahun ini dan tahun-tahun ke depan adalah untuk membangun aplikasi sistem QA yang terintegrasi, efektif, terukur dan informatif yang akan digunakan oleh semua Unit QA di Danamon dan Perusahaan Anak.

E. RISIKO HUKUM

Risiko hukum adalah risiko yang diakibatkan karena adanya gugatan atau tuntutan dari nasabah atau pihak ketiga, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan (yang dilakukan oleh pihak internal maupun external) dan/atau kelemahan perikatan yang dilakukan oleh Bank (termasuk ketiadaan dokumen hukum dan peraturan ataupun adanya kelemahan dalam dokumen pengikatan hukum). Dalam Kerangka Kerja manajemen risiko dan merujuk pada regulasi yang berlaku, risiko hukum merupakan salah satu aspek penting yang pada hakikatnya bertujuan mengantisipasi risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Seiring dengan meningkatnya cakupan bisnis Danamon dan perkembangan produk yang sangat dinamis yang juga dipengaruhi banyak faktor, maka tingkat risiko hukum menjadi bagian yang harus dikelola secara baik. Pada dasarnya tujuan utama dari penerapan manajemen risiko hukum adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalisir kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan dan proses litigasi atas suatu aktivitas Danamon dan Perusahaan Anak.

- 1) Organisasi Pengelola Risiko Hukum Danamon
Risiko hukum Danamon dikelola oleh tim yang dikoordinir oleh Divisi Hukum dan dipimpin oleh General Legal Counsel. Dalam pelaksanaan pengelolaan risiko hukum tersebut, tim pengelola risiko hukum di Divisi Hukum bekerja sama dengan beberapa unit kerja terkait yaitu: Divisi Litigasi, Hello Danamon, Divisi Industrial Relation, Divisi Consumer Legal dan Collection, dan Divisi Remedial pada masing-masing lini bisnis (terkait dengan eksekusi hak tanggungan dan kasus kepailitan).

Sementara itu terkait pengelolaan risiko hukum Danamon secara konsolidasi, Divisi Hukum (tim pengelola risiko hukum) bekerja sama dengan Divisi Hukum (tim pengelola risiko hukum) di PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk dan PT Adira Quantum Multifinance (dalam proses likuidasi).

- 2) Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Risiko Hukum

Danamon telah memiliki Kerangka Acuan Hukum dan standar prosedur operasional (*Standard Operating Procedure - SOP*) Penerapan Manajemen Risiko Hukum yang dievaluasi secara berkala sesuai perkembangan eksternal/internal Danamon dan perubahan peraturan perundangan yang berlaku dan telah disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan pelaksanaannya terkait dengan manajemen risiko

- 3) Mekanisme Pengelolaan dan Pengendalian Risiko Hukum

Manajemen Risiko Hukum dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen. Dalam proses identifikasi, seluruh lini bisnis, fungsi pendukung, serta Perusahaan Anak perlu mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang dapat menyebabkan munculnya risiko hukum di dalam lini bisnis, produk, proses serta teknologi informasinya yang berdampak kepada posisi keuangan maupun reputasi Danamon. Pengidentifikasian risiko juga mencakup penilaian risiko hukum yang timbul dari aktivitas operasional/produk/perjanjian dan risiko inheren.

Dalam menilai risiko inheren atas risiko hukum, parameter/indikator yang digunakan adalah:

- Faktor litigasi.
- Faktor kelemahan perikatan.
- Faktor ketiadaan/perubahan peraturan perundangan.

Terkait dengan implementasi manajemen risiko hukum tersebut, Danamon telah menerapkan beberapa hal yaitu:

- Pelaksanaan pengawasan risiko hukum oleh manajemen senior Danamon (khususnya kasus-kasus hukum yang memiliki risiko hukum yang tinggi).
- Pembuatan Kerangka Acuan Hukum dan SOP Penerapan Manajemen Risiko Hukum yang antara lain mengatur tentang identifikasi dan *mapping* risiko hukum berikut mitigasinya, serta matriks parameter, baik untuk risiko inheren maupun kualitas penerapan manajemen risiko hukum.
- Pembentukan unit kerja yang ditunjuk manajemen untuk melakukan monitoring dan mengelola risiko hukum yang melekat dari suatu produk dan aktivitas Danamon dan Perusahaan Anak agar kemungkinan risiko hukum yang ada tidak berdampak luas dan menjadi pemicu timbulnya risiko lain.

Penerapan proses pengelolaan risiko hukum yang komprehensif disertai adanya monitoring atas risiko hukum tersebut ditargetkan berjalan dengan konsisten dengan partisipasi aktif dari seluruh pihak terkait. Melalui upaya bersama dengan Divisi Hukum dan Divisi Litigasi sebagai penanggung jawab, maka risiko yang ada diharapkan tidak melampaui *risk appetite* yang telah ditetapkan sebelumnya oleh manajemen Danamon, serta kasus-kasus hukum yang ada semakin menurun. Untuk memastikan peningkatan kualitas pengelolaan risiko hukum, Danamon telah memberikan *legal training*/sosialisasi hukum terkait kepada karyawan secara berkala.

F. RISIKO STRATEJIK

Risiko stratejik dapat bersumber antara lain dari kelemahan maupun ketidak-akuratan formulasi strategi maupun kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Pengelolaan risiko stratejik ditujukan untuk mengatasi beragam risiko yang diakibatkan oleh penetapan serta implementasi strategi yang kurang memadai.

1) Organisasi Manajemen Risiko Stratejik

Unit Kerja Risiko Stratejik berperan dalam pengelolaan risiko stratejik dan berada di bawah pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Danamon. Kelompok kerja risiko stratejik Danamon mencakup keseluruhan lini bisnis dan unit-unit pendukung yang bekerja sama dengan divisi Keuangan dalam menganalisa dan memonitor risiko stratejik.

2) Pengelolaan Risiko Stratejik

Penerapan pengelolaan risiko stratejik dilakukan melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam mengarahkan dan menyetujui rencana bisnis, termasuk juga rencana stratejik Danamon dan Perusahaan Anak. Sementara itu Direksi bertanggung jawab dalam:

- Menyusun rencana strategis bisnis Danamon dan Perusahaan Anak.
- Menjamin bahwa sasaran strategi yang ditetapkan telah sejalan dengan misi, visi, kultur, arah bisnis dan toleransi risiko Danamon dan Perusahaan Anak.
- Menyetujui setiap perubahan rencana stratejik, serta mengkaji secara berkala atas kesesuaian rencana stratejik.
- Memastikan bahwa kondisi, kompetensi manajerial serta sistem dan mekanisme pengendalian di Danamon dan Perusahaan Anak telah memadai untuk mendukung implementasi strategi yang ditetapkan.
- Memantau perkembangan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi usaha Danamon dan Perusahaan Anak yang telah ditetapkan.
- Menetapkan satuan kerja/fungsi yang bertanggung jawab dan berwenang merumuskan dan memantau pelaksanaan strategi, termasuk rencana strategi dan rencana bisnis.

- Memastikan bahwa manajemen risiko untuk risiko stratejik telah diterapkan secara efektif dan konsisten.

Danamon dan Perusahaan Anak mengelola risiko stratejik dengan memantau risiko stratejik inheren serta kualitas implementasi manajemen risiko stratejik. Dalam menilai risiko stratejik inheren, parameter yang digunakan adalah:

- Pengaruh faktor risiko eksternal, termasuk kondisi ekonomi makro, peraturan, teknologi, nasabah yang dituju, kompetisi, serta posisi Danamon dan Perusahaan Anak dalam industri perbankan/industri keuangan.
- Pengaruh faktor risiko internal, termasuk keselarasan strategi bisnis, model bisnis dan fokus strategi, struktur organisasi yang efektif, kecukupan dan kualitas sumber daya manusia, teknologi dan efisiensi operasional.
- Pemantauan implementasi strategi, termasuk hasil implementasi strategi, kesuksesan implementasi proyek strategis dan pengaruh keputusan strategis.

Lebih lanjut, dalam menilai kualitas manajemen risiko stratejik, faktor yang dipertimbangkan adalah:

- Tata kelola risiko, termasuk preferensi risiko, toleransi risiko dan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
- Kerangka kerja manajemen risiko, termasuk kecukupan struktur organisasi maupun kecukupan kebijakan dan prosedur.
- Proses manajemen risiko, sumber daya manusia dan sistem informasi manajemen, termasuk proses identifikasi, pengukuran, pemantauan sistem informasi manajemen dan pengendalian risiko, serta jumlah dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung manajemen risiko.
- Sistem pengendalian risiko, termasuk kecukupan sistem pengendalian internal dan kecukupan penelaahan oleh pihak independen dalam Danamon dan Perusahaan Anak.

3) Risiko Strategik Inheren

Danamon dan Perusahaan Anak telah mengelola risiko strategik inheren dengan baik. Pada dasarnya, Danamon dan Perusahaan Anak mempunyai visi dan misi yang jelas dan terdefinisi dengan baik serta kultur organisasi yang baik sesuai dengan struktur dan proses bisnis. Danamon dan Perusahaan Anak juga memiliki strategi bisnis yang jelas, terukur serta selaras satu sama lain.

Danamon dan Perusahaan Anak mengantisipasi persaingan usaha yang semakin kompetitif dengan mengupayakan layanan yang lebih baik untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang ada.

Meski telah membaik, faktor ekonomi masih mempengaruhi pencapaian rencana strategis bank. Untuk itu Danamon dan Perusahaan Anak terus memantau beberapa indikator seperti tingkat inflasi, tingkat suku bunga BI dan perubahan nilai kurs Rupiah. Danamon dan Perusahaan Anak secara aktif menyesuaikan beberapa aktivitasnya, seperti penyaluran kredit dan juga mengusahakan peningkatan efisiensi biaya operasional.

Persaingan dalam pelayanan nasabah secara langsung berdampak pula pada persaingan antar perusahaan dalam memperoleh sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Tingkat perputaran dan kinerja karyawan serta adanya beberapa posisi yang kosong di beberapa divisi dan Perusahaan Anak, menjadi perhatian manajemen. Selain itu masih terdapat berbagai posisi dalam struktur organisasi yang belum ditempati oleh sumber daya yang ideal juga sumber daya pelapis (*bench strength*) relatif terbatas. Danamon merespon hal ini secara positif dengan menyesuaikan sumber daya manusia yang tersedia dengan kebutuhan Danamon dan Perusahaan Anak, memberikan pelatihan yang diperlukan, serta memberikan kesempatan berkembang pada sumber daya manusia yang ada. Selain itu, Danamon dan Perusahaan Anak juga terus memperbaiki mekanisme penilaian kinerja karyawan untuk dapat mendorong kinerja karyawan serta mengapresiasi karyawan yang memiliki kinerja baik dengan pantas.

4) Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Strategik
Penerapan manajemen risiko telah dilaksanakan dengan cukup memuaskan. Meski demikian Danamon dan Perusahaan Anak terus melakukan perbaikan atasnya. Perumusan tingkat risiko yang dapat diterima (*risk appetite*) cukup memadai dalam bentuk limit, kebijakan dan prosedur untuk proses berisiko. Para *risk manager* di masing-masing divisi dan Perusahaan Anak juga telah ditempatkan guna mendukung implementasi strategi bisnis yang telah ditetapkan.

Danamon dan Perusahaan Anak juga terus memantau berbagai elemen risiko strategik yang relevan serta secara terus-menerus melakukan pengkinian rencana tindakan mitigasi sebagai tanggapan atas perubahan situasi yang berisiko terhadap Bank dan Perusahaan Anak.

G. RISIKO KEPATUHAN

Risiko Kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Risiko Kepatuhan pada umumnya bersumber dari perilaku atau aktivitas yang menyimpang atau melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta aktivitas yang menyimpang dari standar yang berlaku umum.

Penerapan manajemen risiko untuk Risiko Kepatuhan dilakukan guna meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku Bank yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum dan/atau peraturan perundang-undangan. Dalam penerapan manajemen risiko, selain memperhatikan Risiko Kepatuhan Danamon secara individual juga memperhatikan Risiko Kepatuhan secara terintegrasi dengan Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan.

1) Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan
Organisasi manajemen risiko melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi terhadap Risiko Kepatuhan. Untuk mendukung fungsi pengawasan tersebut, Danamon membentuk komite-komite yang

diperlukan, antara lain Komite Pemantau Risiko pada Dewan Komisaris dan Komite Manajemen Risiko pada tingkat Direksi.

Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko termasuk pelaksanaan fungsi kepatuhan dalam pengelolaan risiko kepatuhan. Direksi berperan aktif dalam menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Danamon. Direksi memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan serta membentuk Satuan Kerja Kepatuhan.

Danamon memiliki Direktur Kepatuhan yang telah memenuhi persyaratan independensi dan tidak memiliki rangkap jabatan yang dilarang sesuai peraturan. Direktur Kepatuhan memiliki peranan penting dalam Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan dengan tanggung jawab melaksanakan fungsi kepatuhan Danamon.

Fungsi Kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Danamon telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, serta memastikan kepatuhan Danamon terhadap komitmen yang dibuat oleh Danamon kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Direktur Kepatuhan didukung oleh Satuan Kerja Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan merupakan unit yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan Danamon juga melaksanakan fungsi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.

Satuan Kerja Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain: membuat langkah-langkah dalam mendukung terciptanya budaya kepatuhan; melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terkait dengan manajemen risiko kepatuhan; melakukan kajian kepatuhan untuk menilai dan mengevaluasi kecukupan dan kesesuaian kebijakan; serta melaksanakan tugas-tugas lainnya terkait dengan fungsi kepatuhan.

2) Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Pengelolaan Risiko Kepatuhan secara umum diterapkan sesuai *Integrated Risk Management Policy* Bank dan Kerangka Acuan Kepatuhan Bank. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan terhadap hal-hal yang dapat meningkatkan eksposur risiko kepatuhan, baik yang berpotensi denda maupun reputasi.

Strategi pengelolaan risiko kepatuhan diterapkan melalui skema 3 (tiga) lini pertahanan.

Pertahanan lini pertama dalam mengelola Risiko Kepatuhan adalah Unit Kerja Bisnis/Operasional/Pendukung yang bertanggung jawab atas risiko yang timbul dalam setiap aktivitasnya.

Pertahanan lini kedua adalah Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh peraturan yang diterbitkan telah diterapkan oleh seluruh Unit Kerja Bisnis/Operasional/Pendukung, sedangkan Satuan Kerja Manajemen Risiko memastikan bahwa risiko yang diambil telah teridentifikasi secara tepat, terukur dan dikelola sesuai parameter yang disetujui.

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) berperan sebagai pertahanan lini ketiga melalui pengujian dan audit secara independen atas ketepatan proses Unit Kerja Bisnis/Operasional/Pendukung untuk memastikan unit kerja telah melakukan fungsi dan tanggung jawabnya dan mematuhi kebijakan serta prosedur manajemen risiko.

- 3) Proses Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan Penerapan pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Proses identifikasi dan pengukuran risiko kepatuhan dilakukan melalui pengkajian terhadap kebijakan Danamon, aktivitas penyediaan dan penghimpunan dana serta aktivitas usaha lainnya.

Proses ini dilakukan untuk mendeteksi adanya potensi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip kehati-hatian, dan standar etika bisnis yang sehat. Pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan dilakukan berdasarkan hasil uji kepatuhan kebijakan dan aktivitas Danamon, hasil uji kepatuhan *self assessment*, dan pemenuhan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia, termasuk pemenuhan persyaratan regulasi utama Danamon dan Perusahaan Anak. Danamon sebagai entitas utama melakukan koordinasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan Perusahaan Anak.

H. RISIKO REPUTASI

Risiko reputasi adalah risiko yang terkait dengan dampak atas persepsi negatif terhadap Bank yang dapat bersumber dari berbagai kejadian yang tidak diinginkan, antara lain: publikasi negatif atas operasional Bank, pelanggaran etika bisnis, keluhan nasabah, kelemahan tata kelola dan kejadian kejadian lainnya yang dapat mengakibatkan penurunan citra Bank.

- 1) Organisasi Pengelolaan Risiko Reputasi Risiko reputasi Danamon dikelola oleh Unit Sekretaris Perusahaan yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Unit Pengelola Risiko dan bekerja sama dengan *Unit Corporate Communication*, Unit Penanganan Keluhan nasabah, Unit Kepatuhan, Unit Keuangan dan unit-unit terkait lainnya.

Mengingat pentingnya reputasi Danamon, pengelolaan risiko reputasi dijalankan secara terintegrasi dengan dukungan dari satuan-satuan kerja yang bertugas menangani keluhan nasabah, menjalankan fungsi kehumasan, merespon pemberitahuan negatif, serta mengkomunikasikan informasi yang diperlukan kepada pemangku kepentingan.

Sementara itu, terkait dengan pengelolaan risiko reputasi Danamon secara konsolidasi, tim pengelola risiko reputasi Danamon menjalin kerja sama yang erat dengan tim pengelola risiko PT Adira Dinamika Multifinance Tbk dan PT Adira Quantum Multi Finance.

- 2) Kebijakan dan Mekanisme Pengelolaan Risiko Reputasi

Kebijakan dan mekanisme pengelolaan risiko reputasi disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dengan memusatkan upaya pada pengelolaan risiko reputasi inheren seperti:

- Berita negatif terkait dengan pemilik Danamon dan/atau perusahaan terkait dengan Danamon.
- Pelanggaran terhadap etika/norma-norma bisnis yang berlaku secara umum.
- Jumlah dan tingkat penggunaan nasabah atas produk Danamon yang kompleks serta jumlah dan materialitas kerja sama Danamon dengan mitra bisnis.
- Frekuensi, jenis media dan materialitas pemberitaan negatif Danamon, meliputi juga pengurus Danamon.
- Frekuensi keluhan nasabah dan materialitas keluhan nasabah.

Danamon senantiasa berupaya untuk menerapkan pengelolaan risiko reputasi dengan standar yang tinggi melalui perbaikan dan pembaharuan tata kelola, kebijakan dan prosedur yang lebih tepat, pemanfaatan sistem informasi yang lebih baik, serta peningkatan kualitas sumber daya yang dilakukan secara berkelanjutan.

- 3) Pengelolaan Risiko Saat Krisis

Danamon telah memiliki kebijakan dan prosedur tersendiri terkait dengan penanganan semua kegiatan Danamon pada saat krisis dan pengelolaan risiko reputasi pada saat krisis disesuaikan dengan kebijakan dan prosedur dimaksud.

I. RISIKO INVESTASI

Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) adalah risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*. Risiko ini timbul dari kegiatan pembiayaan yang dilakukan Bank dengan menggunakan akad mudharabah dan musyarakah.

Pembiayaan berdasarkan akad mudharabah adalah pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modal dan nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Pembiayaan berdasarkan akad musyarakah adalah pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

ORGANISASIDANKEBIJAKANMANAJEMEN RISIKO INVESTASI

Organisasi dan kebijakan manajemen risiko investasi sama dengan risiko kredit mengingat kedua risiko ini timbul dari kegiatan pembiayaan.

Unit Usaha Syariah (UUS) Danamon memiliki unit kerja yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menganalisa laporan aktual dibandingkan dengan target rencana bisnis. Danamon mempunyai infrastruktur yang memadai untuk melakukan evaluasi secara berkala kinerja dan operasional dari usaha yang dibiayai Danamon sebagai *partner*.

MITIGASI RISIKO INVESTASI

Untuk mencegah agar nasabah tidak melakukan penyimpangan dan sebagai jaminan bagi Bank jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian, Bank meminta agunan dari nasabah atas pembiayaan yang diberikan. Kebijakan jenis agunan dan penilaian agunan mengikuti kebijakan agunan yang berlaku seperti untuk pembiayaan pada umumnya.

J. RISIKO IMBAL HASIL

Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi

perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank. Manajemen Risiko Imbal berlaku bagi Unit Usaha Syariah. Proses Manajemen Risiko Imbal Hasil mengacu pada ketentuan OJK.

K. RISIKO TRANSAKSI INTRA-GRUP

Risiko Transaksi Intra-Grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana atau tidak.

1) Organisasi dan Kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Risiko Intra-Grup dikelola oleh Bank sebagai Entitas Utama beserta seluruh Perusahaan Anak sebagai anggota Konglomerasi Keuangan. Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup dilakukan dengan memperhatikan aktivitas transaksi antar entitas dalam Konglomerasi Keuangan.

Bank sebagai Entitas Utama telah mengatur penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup pada Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi yang dikaji secara berkala. Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta Sistem Informasi Manajemen.

2) Pengelolaan Risiko Transaksi Intra-Grup

Danamon bersama Perusahaan Anak mengidentifikasi jenis-jenis transaksi intra-grup yang dapat menimbulkan risiko terhadap Konglomerasi Keuangan serta bertanggung jawab dalam melakukan pengukuran risiko transaksi intra-grup secara terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.

Danamon dan Perusahaan Anak memantau transaksi intra-grup untuk memastikan bahwa transaksi intra-grup dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran dan ketentuan umum yang berlaku serta didokumentasikan dengan baik. Pemantauan transaksi intra-grup antara entitas pada Konglomerasi Keuangan dilakukan secara periodik.

Danamon beserta Perusahaan Anak yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan berkomitmen melakukan pengendalian atas transaksi intra-grup yang dapat menimbulkan risiko pada Konglomerasi Keuangan. Pengendalian risiko dilakukan atas hasil pemantauan terhadap transaksi intra-grup antar entitas dalam Konglomerasi Keuangan. Transaksi intra-grup antar entitas pada Konglomerasi Keuangan dimonitor dengan dukungan Sistem Informasi Manajemen yang ada pada tiap entitas dalam Konglomerasi Keuangan.

Danamon sudah melakukan penerapan profil risiko transaksi intra-grup bagi Konglomerasi Keuangan yang terintegrasi dengan Perusahaan Anak. Pelaporan manajemen risiko transaksi intra-grup dilakukan secara komprehensif dan periodik kepada manajemen dan regulator untuk memonitor, menilai dan mengevaluasi risiko secara berkelanjutan.

L. RISIKO ASURANSI

Risiko Asuransi merupakan risiko yang terkait dengan aplikasi dan praktik bisnis asuransi yang dapat mengakibatkan kerugian finansial. Penerapan Manajemen Risiko Asuransi pada Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi dilakukan oleh Anak Usaha Perusahaan Asuransi dengan pengawasan dari Danamon sebagai Entitas Utama.

Risiko Asuransi merupakan risiko akibat kegagalan perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*Underwriting*), penetapan premi (*Pricing*), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan klaim. Penerapan Manajemen Risiko Asuransi pada Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi dilakukan oleh Anak Usaha Perusahaan Asuransi dengan pengawasan dari Bank Danamon Indonesia sebagai Entitas Utama.

1) Organisasi dan Kebijakan Manajemen Risiko Asuransi

Risiko asuransi dikelola oleh Perusahaan Anak asuransi dengan pengawasan dari Bank Danamon Indonesia sebagai entitas utama. Anak usaha perusahaan asuransi telah memiliki kebijakan manajemen risiko perusahaan asuransi yang mengatur kerangka kerja manajemen risiko serta proses manajemen risiko pada perusahaan

asuransi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang ditinjau secara periodik. Kategori risiko yang dikelola antara lain: Risiko Asuransi, Risiko Strategi, Risiko Operasional, Risiko Aset & liabilitas, Risiko Kepengurusan, Risiko Tata Kelola, dan Risiko Dukungan Dana.

Dalam penerapan manajemen risiko di perusahaan asuransi, Perusahaan Anak telah mencakup:

- a) Pengawasan aktif direksi, dan dewan komisaris.
- b) Memastikan adanya kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.
- c) Memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
- d) Memastikan kecukupan sistem informasi manajemen risiko.
- e) Memastikan pelaksanaan sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Untuk mendukung penerapan manajemen risiko Perusahaan Asuransi, maka dibentuk komite yang berperan dalam pemantauan pelaksanaan penerapan manajemen risiko. Berdasarkan fungsinya, komite-komite yang dibentuk terbagi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- a) Komite di bawah Dewan Komisaris
 - Komite Audit
 - Komite Pemantau Risiko
 - Komite Nominasi dan Remunerasi
- b) Komite di bawah Direksi
 - Komite Manajemen Risiko
 - Komite Anti-Fraud
 - Komite Aset & Liabilitas
 - Komite Service
 - Komite Produk
 - Komite Human Capital

2) Pengelolaan Risiko Asuransi

Penerapan manajemen risiko asuransi dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen. Anak usaha perusahaan asuransi bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko asuransi yang dapat timbul dalam setiap produk maupun dari berbagai aktivitas perasuransian.

Pengelolaan risiko asuransi terdiri dari pengelolaan risiko bawaan dan pelaksanaan manajemen pengendalian, yaitu:

a) Pengelolaan risiko bawaan dari risiko asuransi mencakup:

- Sifat bisnis asuransi
Pengelolaan Produk *short-tail* versus *long-tail*, pertanggung jawaban jangka pendek dan pertanggung jawaban jangka panjang, dan tingkat risiko dari bisnis yang ditanggung.
- Komposisi dan Diversifikasi Portofolio Bisnis
Pengelolaan diversifikasi bisnis dan segmentasi pasar.
- Struktur Reasuransi
Pengelolaan porsi risiko yang direasuransikan, jenis dan program reasuransi, Perusahaan penanggung ulang, dan konsentrasi reasuransi.

b) Manajemen pengendalian risiko asuransi mencakup:

- Pemahaman Direksi dan Manajemen
Meningkatkan pemahaman atas isu-isu risiko asuransi dan pemantauan risiko asuransi.
- Desain Produk
Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam pengembangan produk, lini usaha/ jenis produk, proses persetujuan produk, penilaian atas risiko produk, modifikasi produk, ketentuan polis (*policy wording*), dan persyaratan reasuransi.
- Penetapan Premi
Menetapkan kebijakan dan prosedur penetapan premi, estimasi klaim (biaya klaim), tingkat hasil investasi, asumsi biaya-biaya dan komisi, kualitas data profil risiko, tingkat keuntungan, analisis kondisi pasar dan pesaing, reasuransi, *review* tarif premi, dan perubahan tarif premi.
- *Underwriting*
Menetapkan kebijakan dan prosedur *underwriting*, struktur fungsi *underwriting*, infrastruktur *underwriting*, pendelegasian wewenang, manual *underwriting*, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, monitoring portofolio, kualitas data, dan pertimbangan reasuransi dalam *underwriting*.

- Valuasi Liabilitas
Memastikan ketersediaan laporan valuasi liabilitas, laporan kondisi keuangan, dan integritas data.
- Reasuransi
Menetapkan struktur program reasuransi, struktur fungsi reasuransi, manajemen reasuransi, dokumentasi reasuransi, dan perusahaan reasuransi yang menjadi rekanan.
- Klaim
Menetapkan struktur fungsi penanganan klaim, kebijakan dan prosedur klaim, proses penanganan klaim, sumber daya manusia, sistem dan kualitas data, pemantauan portofolio, kebocoran klaim (*claim leakage*), reasuransi, dan kecurangan (*fraud*) klaim.
- Distribusi Produk
Mengkaji ulang pemilihan jenis jalur distribusi, sistem pemasaran dan *e-business*, perjanjian kerjasama, konflik jalur distribusi, struktur komisi, dan *mis-selling*.
- *Review* oleh Pihak Independen
- Memiliki pendapat auditor internal dan/ atau eksternal dan pengawasan fungsi manajemen risiko.

Perusahaan Anak usaha asuransi juga bertanggung jawab dalam melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap risiko asuransi yang melekat. Penerapan manajemen risiko asuransi didukung oleh sistem informasi manajemen yang akurat dan memadai serta dapat menyediakan data yang dibutuhkan dalam setiap proses manajemen risiko.

Bank Danamon Indonesia dan Perusahaan Anak usaha asuransi melakukan penerapan profil risiko asuransi bagi konglomerasi keuangan. Pelaporan manajemen risiko asuransi akan dilakukan secara komprehensif dan periodik kepada manajemen dan regulator untuk memonitor, menilai dan mengevaluasi risiko secara berkelanjutan.

PENERAPAN BASEL III

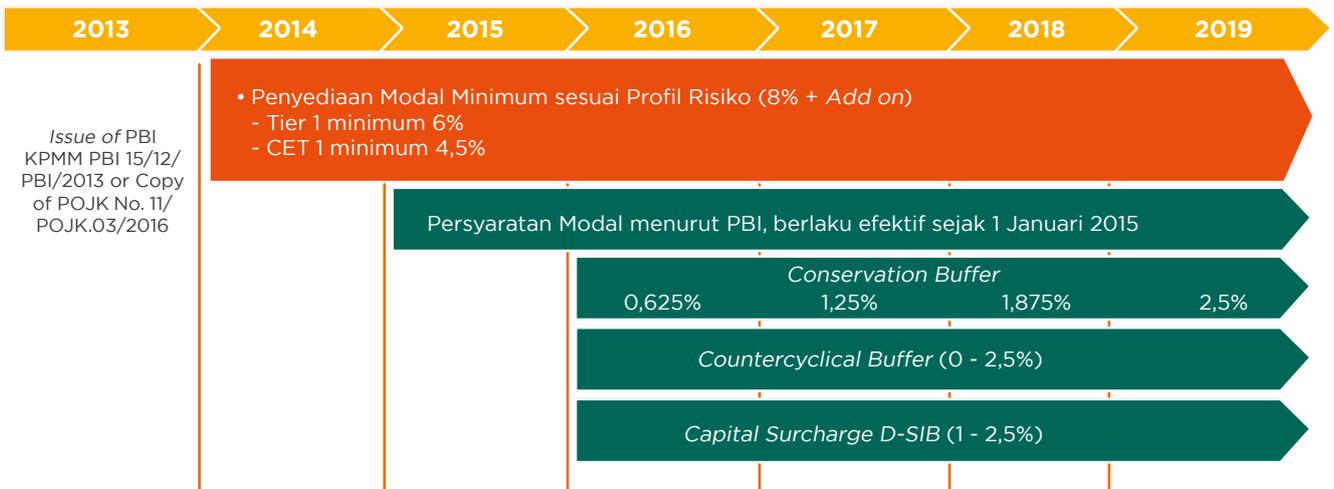
Perbankan menyempurnakan kembali kerangka permodalan yang ada melalui berbagai diskusi yang diselenggarakan di tingkat global dengan konsep penyempurnaan Basel II yaitu Basel III. Basel III bertujuan untuk mengelola perbankan dengan meningkatkan kemampuan sektor perbankan untuk menyerap potensi risiko kerugian akibat krisis keuangan dan ekonomi serta mencegah menjalarnya krisis sektor keuangan ke sektor ekonomi; meningkatkan kualitas manajemen risiko, *governance*, transparansi dan keterbukaan; dan memberikan resolusi terbaik bagi *systemically important cross border banking*. Melalui Basel III diharapkan dapat memperkuat sisi pengaturan mikro prudensial untuk meningkatkan kesehatan dan daya tahan individual bank dalam menghadapi krisis.

Dalam konteks mikropudensial, kerangka Basel III mensyaratkan definisi kualitas dan level permodalan yang lebih tinggi dengan fokus utama pada komponen *common equity* dan pentingnya tersedia kecukupan cadangan (*buffer*) modal yang harus dimiliki oleh individual bank yaitu dengan mensyaratkan pembentukan *conservation buffer*.

Basel III juga mencakup aspek makro prudensial dengan mengembangkan indikator untuk memantau tingkat *procyclicality* sistem keuangan dan mempersyaratkan bank terutama bank/institusi keuangan yang bersifat sistemik untuk menyiapkan *buffer* di saat ekonomi baik (*boom period*) guna dapat menyerap kerugian saat terjadi krisis (*boost period*) yaitu *countercyclical capital buffer*, serta *capital surcharge* bagi institusi lembaga keuangan yang dipandang sistemik. Keterkaitan antara aspek mikro dan makro tersebut sangat erat sehingga perlu dimonitor secara berkesinambungan.

Dalam rangka persiapan penerapan Basel III, Regulator telah menerbitkan peraturan terkait dengan Kecukupan Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Danamon mendukung persiapan penerapan Basel III tersebut, mengingat ketentuan tersebut merupakan *framework* untuk memperkuat tingkat kesehatan industri perbankan nasional dan mampu mengantarkan industri perbankan Indonesia untuk dapat mengambil peran dalam percaturan industri perbankan di tingkat global.

Berikut tahapan Danamon dalam mempersiapkan Basel III dalam kaitannya dengan pengelolaan di sisi Permodalan:



Dari sisi pengelolaan likuiditas perbankan, penerapan *Liquidity Coverage Ratio* didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*-LCR) Bagi Bank Umum yang diterbitkan pada bulan Desember tahun 2015, dan POJK No.32/POJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank pada bulan Agustus tahun 2016, yang penerapannya telah sesuai dengan kerangka likuiditas Basel III.

Mengacu kepada POJK tersebut, implementasi kerangka LCR dilakukan secara bertahap. Sebagai Bank yang berada dalam kelompok BUKU 3, Danamon masuk dalam skema waktu Tahapan Kedua. Periode efektif implementasi POJK tersebut dimulai pada 30 Juni 2016 dengan rasio awal sebesar 70% dan meningkat pada setiap akhir tahun hingga menjadi 100% pada 31 Desember 2018. Aspek-aspek LCR yang terkait dengan perhitungan, periode implementasi, pelaporan, publikasi, dan lainnya mengacu kepada POJK tersebut di atas.

Selain LCR, Basel juga memperkenalkan rasio tambahan yaitu *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) sebagai pelengkap pengelolaan risiko likuiditas, serta *leverage ratio* sebagai pelengkap dari rasio pemodal. Pengenalan terhadap *leverage ratio* adalah sebagai backstop rasio pemodal sesuai profil risiko untuk mencegah terjadinya proses *deleveraging* yang dapat merusak sistem keuangan dan perekonomian.

Penerapan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) akan didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*-NSFR) Bagi Bank Umum yang diterbitkan pada bulan Juli tahun 2017. Implementasi pemenuhan POJK tersebut akan efektif pada bulan Januari 2018, dengan minimum rasio sebesar 100%. Aspek-aspek NSFR yang terkait dengan perhitungan, periode implementasi, pelaporan, publikasi, dan lainnya mengacu kepada POJK tersebut di atas.

PENENTUAN LIMIT RISIKO (*RISK APPETITE*)

Risk Appetite merupakan sejumlah risiko yang siap untuk diambil/ditoleransi dalam mencapai tujuan bisnis. Penetapan *Risk Appetite* bukan untuk membatasi pengambilan risiko, namun bertujuan untuk memberikan transparansi dan memastikan kesesuaian profil risiko dengan strategi bisnis.

Bank telah menetapkan *Risk Appetite* secara Grup dengan persetujuan Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk melakukan penurunan ke tingkat Lini Bisnis dan Perusahaan Anak. Bank juga akan melakukan kaji ulang atas *Risk Appetite* secara berkala, guna memastikan bahwa *Risk Appetite* telah sesuai dengan perubahan kondisi internal dan eksternal Bank, ekspektasi manajemen, serta peraturan yang berlaku. Penetapan berbagai parameter *Risk Appetite* didasarkan pada risiko-risiko yang dinilai utama bagi Bank yang mencakup permodalan, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko konsentrasi kredit, risiko operasional, dan *fraud*. Selain itu, Bank juga menetapkan berbagai limit risiko untuk masing-masing jenis risiko serta aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko, dimana harus sesuai dengan *Risk Appetite* yang telah ditetapkan.

Guna memastikan efektivitas atas pengelolaan *Risk Appetite*, Bank juga telah memiliki Kebijakan *Risk Appetite Statements*. Kebijakan ini menguraikan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pengelolaan *Risk Appetite*, serta mengatur proses dalam mendefinisikan, mengkaji ulang, dan memantau, serta eskalasi atas pelampauan *Risk Appetite*.

RENCANA AKSI (*RECOVERY PLAN*)

Setelah adanya krisis keuangan, regulasi secara global mewajibkan lembaga keuangan untuk membuat rencana aksi dan resolusi (*recovery & resolution plans*). Pada April 2017, Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK") telah menerbitkan persyaratan dan regulasi, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.03/2017, untuk Bank Sistemik ("BS") di Indonesia untuk membuat dan

menerapkan Rencana Aksi (*Recovery Plan*). Rencana Aksi dibuat untuk menjamin bahwa Bank Sistemik membuat Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) yang kredibel dan layak untuk mempertahankan Bank dalam serangkaian skenario stres parah yang dapat diterima.

Sebagai salah satu Bank Sistemik di Indonesia, Danamon telah membuat Rencana Aksi yang sesuai dengan peraturan di atas, dimana Bank Danamon telah mengirimkan ke OJK pada bulan Desember 2017.

Danamon telah menilai kontribusi setiap lini bisnis dan Perusahaan Anak dari perspektif kuantitatif (seperti kontribusi terhadap laba, pendanaan dan pinjaman yang diberikan) dan kualitatif untuk mengidentifikasi materialitas dari lini bisnis dan Perusahaan Anak, termasuk jaringan kantor Bank.

Sebagai bagian dari persyaratan peraturan, BS di Indonesia diharuskan untuk melakukan analisis skenario yang luas untuk menilai ketahanan dan potensi kerentanan Bank terhadap beberapa indikator yang ditentukan oleh OJK (yaitu modal, likuiditas, kualitas aset dan profitabilitas). Hasil analisis skenario menunjukkan bahwa Danamon tetap tangguh bahkan dalam kondisi stres parah.

Danamon menerapkan sistem lampu lalu lintas untuk pelaksanaan Rencana Aksi dengan ambang batas yang terdefinisi dengan jelas sebagai *trigger* untuk ketiga fase pemulihan, yaitu “Pencegahan”, “Pemulihan” dan “Perbaikan”. Terdapat berbagai Opsi Pemulihan, yang telah dinilai dalam hal kelayakan, kredibilitas, kerangka waktu implementasi dan efektivitas. Opsi pemulihan ini mencakup indikator keuangan utama Danamon, yaitu modal, likuiditas, kualitas aset dan profitabilitas dan akan menjadi dasar Rencana Aksi dan strategi Bank dalam kondisi stres.

Rencana Aksi ini telah disetujui Direktur Utama, Komisaris Utama dan Pemegang Saham Pengendali untuk kemudian akan diagendakan ke dalam RUPST/ RUPSLB berikutnya di tahun 2018 dalam rangka memperoleh persetujuan pemegang saham.

RENCANA KEGIATAN MANAJEMEN RISIKO DI TAHUN 2018

Ekonomi Indonesia pada tahun 2018 diperkirakan akan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2017, menjadi sekitar 5,27%. Optimisme ini didukung kemungkinan pulihnya konsumsi domestik dan berlanjutnya aliran investasi. Situasi ekonomi global yang juga berangsur pulih akan berpengaruh positif terhadap ekonomi Indonesia. Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama di pasar keuangan global terkait risiko laju pengetatan kebijakan moneter di AS dan Uni Eropa.

Berikut ini adalah beberapa tantangan yang akan dihadapi di 2018:

- Nilai tukar Rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) berpotensi mengalami sedikit tekanan akibat sentiment *negative* di pasar keuangan domestik yang berimbas dari laju pengetatan kebijakan moneter AS, dan laju pengurangan jumlah pembelian *asset* (*quantitative easing*) di Uni Eropa.
- Tingkat inflasi diperkirakan akan *relative* stabil pada level 3,5%, dengan asumsi harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Namun demikian tetap akan ada *upside risk* pada inflasi terkait perkembangan harga minyak global.
- Dengan laju inflasi yang terkendali dan tekanan mata uang yang minimal, BI diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuannya (suku bunga Repo 7 hari) pada level 4,25%
- Harga komoditas bergerak variatif setelah mengalami kenaikan signifikan di tahun 2017. Harga komoditas ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) diperkirakan masih akan meningkat terbatas sejalan dengan meningkatnya permintaan dengan mulai pulihnya ekonomi global. Namun demikian prospek harga komoditas unggulan lainnya yaitu batu bara, diperkirakan akan *flat* dan cenderung turun. Dengan demikian prospek kinerja ekspor Indonesia diperkirakan masih akan membaik, walupun tidak sekuat tahun lalu.
- Implementasi kebijakan stimulus fiskal pemerintah serta intensifikasi penyaluran bansos dan dana desa akan memberikan bantalan positif terhadap ekonomi, terutama untuk kalangan *level* bawah dan miskin.

Mengantisipasi berbagai kondisi eksternal tersebut, Danamon telah menyiapkan berbagai inisiatif dalam kaitan pengelolaan risiko di tahun 2018, meliputi:

1) Pengelolaan Risiko Terintegrasi.

- a. Melakukan *review* secara berkala atas *Risk Appetite Statement*.
- b. Meningkatkan fungsi pemantauan dan pengendalian risiko dalam rangka Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
- c. Melakukan peninjauan secara komprehensif terhadap proses pemantauan dan pengukuran risiko secara terintegrasi.
- d. Menjaga pertumbuhan Danamon pada tingkat yang *acceptable* dengan tetap *prudent*;
- e. Memelihara pelaksanaan aktivitas Danamon secara optimal pada tingkat risiko likuiditas yang sehat sesuai dengan limit yang berlaku.
- f. Melakukan reorganisasi di Unit Kerja Integrated Risk untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas.
- g. Menerapkan hasil studi terhadap Budaya Risiko untuk membangun dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya Budaya Risiko di Danamon.
- h. Menyiapkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan OJK tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

2) Pengelolaan Risiko Kredit.

- a. Mengkaji Kebijakan perkreditan secara berkala.
- b. Melanjutkan implementasi sistem Model *Rating Internal* dan *Scorecard* untuk Risiko Kredit di semua lini bisnis secara bertahap, seperti implementasi sistem model *retail scorecard* untuk SME (Kredit Usaha Kecil Menengah) dan *Mortgage* (Kredit Perumahan/Tempat Tinggal). Melakukan peningkatan sistem Model *Scorecard* dengan menggunakan *Rule Based Engine* (RBE) pada lini bisnis Kartu Kredit dan Kredit Tanpa Agunan.

- c. Mengimplementasikan kerangka kerja ICAAP.
- d. Menggunakan Pendekatan Standar untuk perhitungan ATMR risiko kredit.
- e. Melakukan evaluasi secara berkala untuk model pemeringkatan/*Scorecard*.
- f. *Stress testing* dilakukan minimal sekali dalam setahun untuk level *Bankwide*. *Stress testing* juga dilakukan bila terdapat perubahan pada sektor industri dan ekonomi dan ketika terdapat permintaan *stress testing* khusus dari regulator;
- g. Melakukan *back testing* triwulanan untuk kecukupan CKPN bagi seluruh lini bisnis.
- h. Pengembangan sistem dalam penerapan Model *Internal* untuk PSAK 71/IFRS 9 dalam rangka persiapan menghitung CKPN/*Expected Credit Loss* (ECL) sesuai ketentuan PSAK 71/IFRS 9.
- i. Penerapan pembaharuan *Internal Rating* pada Korporasi dan Komersial.
- j. Implementasi model Deteksi Dini (*Early Warning Indicator*) untuk lini bisnis Korporasi dan Komersial.
- k. Melakukan pembaharuan *Risk Based Pricing* lini bisnis Korporasi dan Komersial.
- l. Mengembangkan dan memperbaharui *scorecard* model dengan menggunakan *Big Data Platform*.

3) Pengelolaan Risiko Operasional dan *Fraud*.

- a. Pelaksanaan siklus ORM telah dan akan terus dilakukan secara konsisten, meliputi identifikasi, pengukuran, pengawasan dan pengendalian risiko operasional pada Danamon dan Perusahaan Anak.
- b. Penerapan strategi *anti fraud* secara terus menerus diperbaiki dan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan *trend fraud* terkini, antara lain dengan penerapan sistem dan teknologi sebagai pendukung untuk pilar deteksi dan pilar pelaporan dan sanksi, mencakup area kredit dan non-kredit.

- c. Proses identifikasi risiko yang dilakukan melalui pelaksanaan *risk registration* dan *risk assessment* atas produk, proses dan sistem yang telah ada maupun sistem baru untuk mengetahui adanya risiko melekat serta mitigasi yang harus dilakukan.
 - d. Pencatatan kejadian berisiko (*risk/loss event data*) dan faktor penyebabnya terus dilakukan dalam *database* yang terpusat, melaksanakan aktivitas RCSA tiap triwulan, melakukan pelaporan risiko yang terkait dan melakukan pemantauan atas risiko operasional melalui *Key Risk Indicator* (KRI).
 - e. Pengembangan aplikasi *Operational Risk Management System* (ORMS) agar efektivitas pelaksanaan siklus ORM di seluruh unit kerja Danamon dan Perusahaan Anak dapat dilakukan dengan lebih optimal.
 - f. Asuransi aset dan finansial (*money insurance, property all risks, Bankers blanket bonds/electronic computer crime* dan *directors & officers*, serta *Electronic Equipment Insurance*) sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko operasional yang penting telah dikoordinir oleh koordinator asuransi dalam Divisi ORM.
 - g. *Workshop*/sosialisasi ORM dan kunjungan kerja kepada RTU serta pelatihan (*Risk School* dan *E-Learning*) kepada karyawan baru akan tetap dilaksanakan secara berkala untuk memastikan kelanjutan dan keseragaman tingkat kesadaran akan risiko operasional dan budaya pengenalan risiko di Danamon.
 - h. Melakukan penilaian untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan dan/atau potensi kerentanan terhadap penerapan aspek Keamanan Informasi terhadap kebijakan yang berlaku. Termasuk memberikan arahan bagi unit pengambil risiko, dari perspektif manajemen risiko, untuk melakukan rencana perbaikan dalam rangka menutup kesenjangan dan/atau potensi kerentanan tersebut.
 - i. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan, prosedur dan petunjuk penanganan insiden keamanan siber.
 - j. Mengembangkan program peningkatan kesadaran akan Keamanan Informasi dan *Business Continuity Management* (BCM), sehingga aspek-aspek tersebut dapat menjadi budaya bagi seluruh karyawan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.
 - k. Mengembangkan dan menerapkan BCM secara komprehensif, guna memastikan kesiapan lini bisnis dan fungsi pendukung dalam menjaga kelangsungan bisnis saat kondisi krisis atau darurat.
 - l. Memperbaiki proses eskalasi dan kampanye *self raise issue* untuk memastikan karyawan Danamon melakukan identifikasi risiko secara proaktif untuk dilakukan tindakan perbaikan yang diperlukan sebelum terjadi insiden risiko operasional.
- 4) Pengelolaan Risiko Pasar dan Likuiditas.
- a. Terus melakukan *Stress Testing* terkait ICAAP untuk memastikan bahwa Danamon berada pada kapasitas untuk mampu bertahan dalam kondisi stres likuiditas.
 - b. Melakukan implementasi pengukuran *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) melalui ALM sistem yang sejalan dengan Regulasi OJK.
 - c. Melakukan *study* dan persiapan terhadap Model sejalan dengan Regulasi OJK dan Bank Indonesia, termasuk pelaksanaan *Bottom Up Stress Test* (BUST).
 - d. Melakukan persiapan atas penerapan pengukuran *Interest Rate Risk in the Banking Book* (IRRBB) sesuai dengan dokumen Basel III dan *Consultative Paper* OJK yang diterbitkan pada Juni 2017 atau Peraturan OJK terkait yang akan diterbitkan pada tahun 2018.